

**RENSTRA**

**PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2018-2023**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**TAHUN 2021**



PERUBAHAN  
RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2018-2023

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**2021**



PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KESEHATAN  
TAHUN 2018-2023

LAMPIRAN 2  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 137 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78.A  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2018-2023

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**2021**



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 137 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 78.A  
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 342 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Perubahan RPJMD Kab. Purwakarta Tahun 2018-2023, maka Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 harus dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Purwakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, diubah sebagai berikut:

- 1 Ketentuan dalam Lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 2 Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. RSUD Bayu Asih;
  4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  6. Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  8. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  9. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
  11. Dinas Pangan dan Pertanian;
  12. Dinas Lingkungan Hidup;
  13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  16. Dinas Perhubungan;
  17. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian;

19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
22. Dinas Perikanan dan Peternakan;
23. Sekretariat Daerah;
24. Sekretariat DPRD;
25. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Inspektorat;
30. Kecamatan Jatiluhur;
31. Kecamatan Sukasari;
32. Kecamatan Maniis;
33. Kecamatan Tegalwaru;
34. Kecamatan Plered;
35. Kecamatan Sukatani;
36. Kecamatan Darangdan;
37. Kecamatan Bojong;
38. Kecamatan Wanayasa;
39. Kecamatan Kiarapedes;
40. Kecamatan Pasawahan;
41. Kecamatan Pondoksalam;
42. Kecamatan Purwakarta;
43. Kecamatan Babakan Cikao;
44. Kecamatan Campaka;
45. Kecamatan Cibatu;
46. Kecamatan Bungursari;
47. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

(2) Perangkat Daerah lama yakni Dinas Pekerjaan Umum, Binamarga dan Pengairan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tetap menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2021

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Mei 2021



Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 Mei 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 137

## **KATA PENGANTAR**

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan makin bertambah berat, kompleks, dan bahkan terkadang tidak terduga. Lebih dari pada itu, peran aktif masyarakat dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting. Oleh karenanya dipandang perlu untuk mengadakan tinjauan kembali dan menyesuaikan Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang ada.

Perubahan Rencana Kesehatan Dinas Kesehatan 2018-2023 mengacu kepada RPJMD yang telah disusun oleh Badan Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Kabupaten Purwakarta dan telah ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Purwakarta.

Program-program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kesehatan ini menggambarkan harapan yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Dalam pencapaian harapan yang ingin dicapai disusun target sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan dalam lima tahun ke depan. Penetapan target tersebut diharapkan dapat memacu seluruh potensi dan sumber daya di Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk berupaya secara maksimal mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas kesehatan.

Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada para pihak atas perhatian bantuan, maupun masukan serta kontribusinya dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan ini.

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berlindung dan berserah diri. Semoga upaya kita mendapatkan rahmat, hidayah dan ridha-Nya. Aamiin.

Purwakarta, Mei 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURWAKARTA,**



**dr. H. Depi Darmawan, MARS**  
**NIP. 197509132006041008**

# DAFTAR ISI

Halaman

**PERATURAN BUPATI NOMOR 137 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR  
78.A TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018-2023**

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I- 1
1.1. Latar Belakang	I- 2
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN</b>	II-1
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	II-1
2.1.1 Tugas	II-1
2.1.2 Fungsi	II-1
2.1.3 Susunan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Unsur Dinas Kesehatan	II-3
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan	II-14
2.2.1 Tenaga Kesehatan	II-14
2.2.2 Sarana Kesehatan	II-16
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	II-17
2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan	II-31
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN</b>	III-1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan	III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih	III- 9
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat	III-16
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-34 III-35
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	IV-1
4.1. Tujuan	IV-1
4.2. Sasaran	IV-2
<b>BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	V-1
5.1. Strategi Pembangunan Kesehatan	V-1
5.2. Kebijakan	V-5
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN</b>	VI-1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	VII-1
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	VIII-1
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB

## PENDAHULUAN

1

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, disusun sesuai tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta serta berpedoman kepada RPJMD di samping merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta periode 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta disusun dengan mengacu kepada visi misi Bupati terpilih dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Selain itu perlu juga melihat Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sehingga mempunyai kesinambungan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Bagan alur kedudukan Renstra dan Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dapat dilihat pada gambar 1.1. di bawah ini.





- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016

- Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran

- Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
  23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 3);
  29. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

- Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 100);
30. Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78.A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 137)

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta ini adalah tersedianya dokumen perubahan perencanaan kesehatan lima tahunan.

Tujuan :

- a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan masalah daerah.
- b. Tersedianya perencanaan arah kebijakan dan strategi.
- c. Tersedianya pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan.
- d. Menjadi acuan dan pegangan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta serta penyelenggara Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

##### 1.2 Landasan Hukum

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.4 Sistematika Penulisan

### BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

#### 2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

#### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan

#### 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

#### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Jawa Barat

#### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang / Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII PENUTUP

### LAMPIRAN

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Rencana Strategis/Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang memberikan detail dasar pemikiran dan dasar hukum penyusunannya. Bab ini juga dijelaskan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis serta hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta ditinjau dari aspek yang terkait erat dengan pelayanan seperti : tugas, fungsi, dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kesehatan.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, Telaahan Visi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam 5 (lima) tahun mendatang serta keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Purwakarta dan Visi Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merupakan pokok dari Renstra yang menguraikan mengenai strategi dan arah kebijakan. Dalam bagian ini penjelasan mengenai strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk pelaksana pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang.



## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai program yang diuraikan dengan sistematika rencana program, bentuk kegiatan, dan sasaran program. Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Purwakarta.

## BAB VIII PENUTUP

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2018-2023.

# **BAB**

## **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

2

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dimana berdasarkan pasal 2 huruf (d) nomor (2); Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

#### **2.1.1 Tugas**

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 3 ayat (1) menyatakan; Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) dimana Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

#### **2.1.2 Fungsi**

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, dimana pasal 5 ayat (2) menyatakan;

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;

- b. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan diuraikan pada pasal pasal 5 ayat (3) yaitu;

Urusan Pemerintahan bidang kesehatan, meliputi sub Urusan Pemerintahan:

- a. upaya kesehatan, yang terdiri atas :
  - 1. pengelolaan usaha kesehatan perorangan Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten;
  - 2. pengelolaan usaha kesehatan masyarakat Daerah Kabupaten dan rujukan tingkat Daerah Kabupaten; dan
  - 3. pemberian rekomendasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.
- b. sumber daya manusia kesehatan, yang terdiri atas :
  - 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; dan
  - 2. perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah Kabupaten
- c. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan/ minuman, yang terdiri atas :
  - 1. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal;
  - 2. pemberian rekomendasi untuk penerbitan izin usaha mikro obat tradisional;
  - 3. penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
  - 4. pemberian rekomendasi atas penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan
  - 5. pengawasan pascapasar (*post-market*) produk makanan dan minuman industri rumah tangga.

- d. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat Daerah.

### **2.1.3 Susunan, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Unsur Dinas Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan pada Pasal 4 maka Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a. Kepala:
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  1. Subbagian Program dan Informasi;
  2. Subbagian Keuangan, Akunting dan Aset; dan
  3. Subbagian Kepegawaian, Umum dan Hukum;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
  1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
  2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga; dan
  3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas:
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
  2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan; dan
  3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
  1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
  3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas:
  1. Seksi Kefarmasian;
  2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
  3. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, terbagi dalam dua jenis meliputi ;

1. UPTD pelaksana kegiatan teknis operasional, yang dalam hal ini adalah Puskesmas sebanyak 20 puskesmas
  2. UPTD pelaksana kegiatan teknis penunjang tertentu;
    - a) Laboratorium Kesehatan;
    - b) Perbekalan Kesehatan.
- h. Jabatan Fungsional.

Sedangkan perincian Tugas Unsur Organisasi Dinas kesehatan adalah sebagai berikut :

**1) Kepala Dinas kesehatan**

- (a) memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- (b) mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam pelaksanaan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- (c) memberikan pengarahan dan mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- (d) memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- (e) melakukan pembinaan kepada bawahan;
- (f) mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait.
- (g) Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**2) Sekretariat**

- a. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan program dan pelaporan informasi Dinas;
- b. menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dinas, yang meliputi anggaran, perbendaharaan, akunting dan aset;

- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkenaan dengan urusan kepegawaian; serta mengelola administrasi kepegawaian Dinas;
- d. mengkoordinasikan, mengendalikan serta melaksanakan administrasi dokumen dinas baik yang masuk maupun keluar, administrasi hukum dan kearsipan;
- e. mengelola sarana dan prasarana kerja Dinas;
- f. melaksanakan pembinaan kesekretariatan pada UPTD;
- g. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Penetapan Kinerja (Tapkin), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- h. memantau, mengkoordinasikan dan melaporkan setiap kegiatan Dinas kepada Kepala Dinas;
- i. memberikan telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis urusan kesekretariatan kepada Kepala Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Bidang Kesehatan Masyarakat**

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Kesehatan masyarakat;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional urusan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional urusan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan

- pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis urusan kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bidang kesehatan masyarakat;
  - f. menyelenggarakan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
  - g. melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat pada UPTD;
  - h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang Kesehatan Masyarakat;
  - i. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan kesehatan keluarga dan gizi, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - j. menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan Masyarakat; menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan Masyarakat;
  - k. memberikan telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis urusan kesehatan masyarakat kepada Kepala Dinas;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; dan
  - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit**

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional urusan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional urusan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;

- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis urusan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. menyelenggarakan kegiatan urusan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- g. menyelenggarakan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- h. melaksanakan pembinaan pencegahan dan pengendalian penyakit pada UPTD;
- i. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- j. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- k. melaksanakan pengelolaan data Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- l. memberikan telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis urusan pencegahan dan pengendalian penyakit kepada Kepala Dinas;
- m. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5) Bidang Pelayanan Kesehatan**

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan, jaminan pembiayaan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan, jaminan pembiayaan kesehatan dan mutu pelayanan



kesehatan;

- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan, jaminan pembiayaan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan, jaminan pembiayaan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan;
- f. merumuskan regulasi besaran tarif/biaya administrasi dan jasa pelayanan kesehatan;
- g. menyusun bahan penetapan pemberian perizinan dan rekomendasi bidang pelayanan kesehatan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan urusan bidang pelayanan kesehatan;
- i. menyelenggarakan kegiatan upaya pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
- j. menghimpun bahan-bahan penetapan pemberian registrasi, akreditasi sertifikasi sarana kesehatan;
- k. menyusun bahan pembinaan, penerapan perizinan dan akreditasi pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta;
- l. menyelenggarakan penilaian kinerja sarana pelayanan kesehatan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- o. menyelenggarakan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- p. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan, pelayanan laboratorium kesehatan dan pelayanan perbekalan kesehatan pada UPTD;
- q. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang pelayanan kesehatan;
- r. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan pelayanan kesehatan primer, kesehatan tradisional, kesehatan rujukan dan mutu pelayanan kesehatan;
- s. memberikan telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis urusan pelayanan kesehatan kepada Kepala Dinas;

- t. melaksanakan pengelolaan data bidang Pelayanan Kesehatan;
- u. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **6) Bidang Sumber Daya Kesehatan**

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan operasional urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- d. menyiapkan bahan bimbingan teknis urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bidang sumber daya kesehatan;
- f. menyelenggarakan kegiatan bidang sumber daya kesehatan;
- g. melaksanakan pembinaan sumber daya kesehatan pada UPTD;
- h. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bidang sumber daya kesehatan;
- i. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional urusan kefarmasian, sumber daya manusia kesehatan, dan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- j. melaksanakan penetapan rencana kebutuhan sumber daya kesehatan meliputi pengadaan kefarmasian, pengadaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, serta pengadaan dan pengembangan sarana prasarana dan alat kesehatan;
- k. memberikan telaahan staf, saran dan pertimbangan teknis urusan sumber daya kesehatan kepada Kepala Dinas;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **7) Kepala UPTD Puskesmas**

- a. menyusun rencana kerja Puskesmas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan teknis program dan kegiatan Puskesmas;
- c. menyusun rumusan kebijakan teknis sesuai dengan kewenangan tugas dan peraturan yang berlaku;
- d. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. melaksanakan koordinasi dan integrasi kegiatan puskesmas meliputi kegiatan loka karya mini, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi;
- f. melaksanakan pengkoordinasian penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
- g. melaksanakan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan;
- h. melaksanakan pusat pelayanan kesehatan medik dasar dan sistem rujukan;
- i. melaksanakan sebagian tugas dinas kesehatan sesuai bidangnya meliputi unit operasional penanggulangan penyakit, penyuluhan tentang pemberantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan lingkungan, promosi kesehatan dan peran serta masyarakat, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan medis atau pengobatan, laboratorium, pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan obat, pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung, pelayanan informasi kesehatan;
- j. melaksanakan dan pembinaan terhadap masyarakat melalui posyandu, posbindu, poskestren, poskesdes, pos obat desa, kunjungan rumah terhadap kelompok rentan dan UKBM serta institusi lainnya;
- k. menyusun data informasi pegawai, tenaga medis, sarana dan prasarana puskesmas;
- l. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar;
- m. menyusun rencana kebutuhan pegawai, tenaga medis dan anggaran serta usulan perbaikan dan pengadaan sarana prasarana puskesmas;
- n. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/perangkat daerah lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;

- o. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan**

- a. menyusun rencana kerja Laboratorium Kesehatan dan pelayanan pemeliharaan alat kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengelola pelaksanaan program dan kegiatan kerja Laboratorium Kesehatan dan pelayanan pemeliharaan alat kesehatan;
- c. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. menyusun data informasi dan rencana kebutuhan pegawai dan tenaga teknis operasional laboratorium;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan laboratorium dan reagensia;
- f. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana serta peralatan untuk pelayanan pemeliharaan alat kesehatan;
- g. mengawasi pelaksanaan prosedur dan keselamatan kerja dalam penganalisaan laboratorium pelayanan pemeliharaan alat kesehatan;
- h. melaksanakan pengawasan mutu pelayanan laboratorium kesehatan dan pelayanan pemeliharaan alat kesehatan;
- i. melaksanakan pengkoordinasian dan pengendalian teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. melaksanakan koordinasi teknis operasional di bidang laboratorium kesehatan meliputi pemeriksaan laboratorium klinik dan lingkungan secara kimia dan mikrobiologi serta pemeriksaan lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- k. mengendalikan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan laboratorium yang meliputi pemeriksaan sampel kimia sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta baik secara kimia, mikrobiologi, patologi klinik dan immunoserologi;
- l. mengendalikan pelaksanaan pelayanan pemeliharaan alat kesehatan;

- m. melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan secara kimia, mikrobiologi, patologi klinik dan imunoserologi;
- n. melaksanakan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan pemeliharaan alat kesehatan;
- o. melaksanakan pembuatan reagensia secara kimia, mikrobiologi, patologi klinik dan imunoserologi;
- p. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis kegiatan laboratorium di setiap laboratorium UPT Puskesmas;
- q. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis kegiatan pelayanan pemeliharaan alat kesehatan di setiap UPT Puskesmas;
- r. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/perangkat daerah lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **9) Kepala UPTD Perbekalan Kesehatan**

- a. menyusun rencana kerja Perbekalan Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengelola pelaksanaan program dan kegiatan kerja Perbekalan Kesehatan;
- c. membina dan mengendalikan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. menyusun dan melaksanakan pedoman pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
- e. menyusun rencana usulan kebutuhan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
- f. menyampaikan rencana usulan kebutuhan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan untuk persediaan maupun pemenuhan kebutuhan puskesmas kepada Kepala Dinas melalui Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- g. melaksanakan pengamatan dan penilaian mutu ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;

- h. melaksanakan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan meliputi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian serta penghapusan obat dan perbekalan kesehatan;
- i. mengelola dan menyusun administrasi dan laporan pencatatan mengenai persediaan dan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;
- j. melaksanakan penyampaian informasi dan pembinaan teknis mengenai pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan lainnya kepada Puskesmas;
- k. melaksanakan fasilitasi dan bimbingan teknis jaminan mutu pelayanan kefarmasian di Puskesmas;
- l. pelaksanaan pembinaan, advokasi dan promosi penggunaan obat rasional;
- m. melaksanakan koordinasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan teknis operasional;
- n. melaksanakan koordinasi dengan Instansi Pemerintah/perangkat daerah lain dalam memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan;
- o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **10) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas secara profesional sesuai dengan titelatur jabatan fungsionalnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan

## **2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan**

Pembangunan kesehatan sangat berkaitan erat dengan sumber daya kesehatan yang melaksanakannya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan telah mengupayakan terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kesehatan yang tepat dan memadai. Pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan rujukan di rumah sakit sangat ditentukan oleh ketersediaan tenaga kesehatan baik dalam hal jenis tenaga maupun ratio terhadap penduduk.

### 2.2.1 Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2018 sebanyak 4.086 orang meningkat sebesar 10,25% dibandingkan tahun 2017 dan tersebar di Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum baik pemerintah maupun swasta. Jumlah dan persentase tiap jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Dan Jenis Tenaga Kesehatan**  
**Di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020**

NO	JABATAN/ PUSKESMAS	PUSKESMAS	LABKES	PERBEKES	DINKES	TOTAL
1	DOKTER	45	1	0	0	46
2	DOKTER GIGI	21	0	0	0	21
3	PERAWAT	116	0	0	2	118
4	BIDAN	391	0	0	19	410
5	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	12	0	0	5	17
6	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN/ SANITARIAN	22	0	0	1	23
7	TENAGA GIZI/ NUTRISIONIS	27	0	0	2	29
8	TENAGA KEFARMASIAN	38	0	5	0	43
a	APOTEKER	15	0	2	0	17
b	ASS. APOTEKER	23	0	3	0	26
9	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK/PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	22	8	0	1	31
10	PERAWAT GIGI	23	0	0	0	23
11	EPIDEMIOLOGI KESEHATAN	0	0	0	1	1
12	TENAGA REKAM MEDIK	14	0	0	0	14
	SUB TOTAL KESEHATAN	754	9	8	31	802
	SUB TOTAL NON KESEHATAN	117	3	3	91	214
	TOTAL	871	12	11	122	1016

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Purwakarta Tahun 2021

Penyebaran sumber daya manusia lingkup kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta tahun 2020 sebagian besar

bekerja di puskesmas yaitu sebanyak 871 orang (85,7%), dan tenaga kesehatan terbanyak adalah bidan sebanyak 391 orang. Tenaga bidan paling banyak karena adanya kebijakan bidan desa dan Puskesmas Poned/dengan persalinan. Sedangkan tenaga kesehatan yang belum terpenuhi antara lain penyuluh kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, apoteker dan tenaga rekam medis. Penyuluh kesehatan, epidemiologi kesehatan, apoteker dan rekam medis merupakan jabatan fungsional yang baru sesuai dengan pengembangan dan tantangan kebutuhan puskesmas. Sedangkan kebutuh

Sedangkan dimana tenaga kesehatan sebesar 74,2%. Sedangkan di Dinas Kesehatan dan UPTD terdapat 1027 pegawai dengan jumlah tenaga kesehatan mencapai 881 orang (85,8%). Adapun jumlah tenaga terbanyak terdapat di puskesmas sebesar 88,9% dengan jumlah tenaga kesehatan tercatat sebesar 89,6%.

Dengan melihat komposisi jenis tenaga, masih terdapat kekurangan beberapa jenis tenaga kesehatan dan non kesehatan sesuai Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas. Untuk tenaga kesehatan antara lain apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, sanitarian, tenaga gizi, pranata laboratorium kesehatan, rekam medis dan serta tenaga kesehatan lainnya meskipun cukup, namun tidak merata, menjabat structural serta berstatus non PNS. Sedangkan tenaga non kesehatan masih banyak kekurangan tenaga teknis pendukung pelayanan kesehatan seperti akuntansi, ahli sistem informasi/teknologi informasi, perencana dan lain sebagainya, sementara saat ini masih didominasi tenaga administrasi.

### **2.2.2 Sarana Kesehatan**

Sarana kesehatan milik pemerintah terdiri dari 1 unit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Bayu Asih Purwakarta, 20 puskesmas, 44 puskesmas Pembantu, poskesdes 19 unit dan polindes 20 unit, sedangkan puskesmas keliling jumlahnya ada 86 unit, dan kendaraan roda 4 yaitu ambulans/puskesmas keliling sebanyak 43 unit.



Ratio puskesmas dengan desa adalah 1 : 9,6 dan ratio puskesmas pembantu dengan desa adalah 1 : 4,4. Ini berarti satu puskesmas melayani 9 sampai 10 desa dan satu puskesmas pembantu 4 sampai 5 desa. Sedangkan ratio puskesmas dengan penduduk 1 : 47.166, artinya 1 puskesmas melayani 47.166 penduduk dan ratio puskesmas pembantu dibanding penduduk 1 : 21.938, artinya 1 puskesmas pembantu melayani 21.938 penduduk. Dengan melihat data diatas maka jumlah puskesmas masih jauh dari rasio ideal yaitu 1: 30.000, sehingga dibutuhkan pembangunan puskesmas baru. Pembangunan puskesmas baru dengan mengembangkan puskesmas pembantu yang ada atau membangun baru. Sedangkan puskesmas pembantu yang tidak dapat dikembangkan menjadi puskesmas diarahkan untuk menjadi poskesdes dimana setiap desa diharapkan satu poskesdes/polindes.

Sarana pelayanan kesehatan lain seperti Balai pengobatan/klinik ada 96 buah Apotek 68 unit, laboratorium klinik 6 unit dan laboratorium puskesmas dan rumah sakit 29 unit. Jumlah tempat praktek perorangan tenaga medis seperti dokter umum ada 1.023 orang, dokter gigi 108 dan 227 praktek bidan.

## **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan**

### **2.3.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

#### **A. Produk Domestik Regional Bruto**

Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki, ini dapat dilihat dari nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktivitas ekonomi dalam daerah tersebut. Total dari nilai tambah tersebut dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada dua cara perhitungan PDRB, yaitu PDRB menurut harga berlaku dan PDRB berdasarkan harga konstan. PDRB digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui

pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh factor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Purwakarta dari tahun 2017- 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Kabupaten Purwakarta dari Tahun 2017-2020**

No	PDRB	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Atas dasar harga berlaku (milyar)	58.529,83	63.072,83	67.574,87	67.176,20
2.	Atas dasar harga konstan 2010 (milyar)	42.239,30	44.344,27	46.287,98	45.332,65
3.	Laju Pertumbuhan Atas dasar konstan 2010	5,15	4,98	4,38	-2,05

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Perda No 3 Tahun 2021)

Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta (Data Diolah)

Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari berbagai indikator, seperti pertumbuhan ekonomi makro, struktur perekonomian, pendapatan perkapita dan indikator ekonomi lainnya yang terus menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Data PDRB Kabupaten Purwakarta Atas Dasar Harga Konstan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, hal ini diakibatkan karena dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang menghantam seluruh sektor perekonomian baik daerah, nasional bahkan global, dimana banyak para pelaku usaha industry mengalami keterpurukan dalam menjalankan

usahanya akibatnya banyak karyawan yang dirumahkan sehingga hal ini menurunkan daya beli masyarakat pada beberapa sektor industry, seperti pariwisata, otomotif, manufaktur, perhotelan, travel, perdagangan, transportasi dll. Hal ini sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang semakin meluas yang dapat mengancam keselamatan nyawa banyak seseorang.

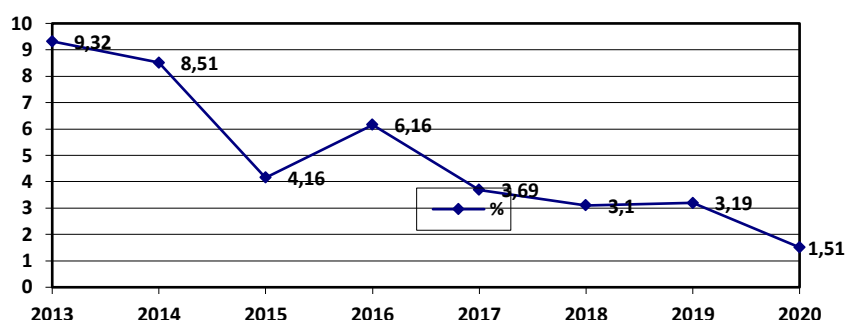
## **B. Laju Inflasi**

Dalam ilmu ekonomi, inflasi memiliki pengertian suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinyu). Dengan kata lain peristiwa dan bukan tinggirendahnya tingkat harga. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga umum yang terjadi pada suatu wilayah, hal ini dipengaruhi oleh harga barang dan jasa serta kebijakan pemerintahan. Dengan kata lain, Inflasi merupakan dinamika harga barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat yang berdampak langsung terhadap daya beli dan biaya hidup masyarakat, perubahan nilai asset/kewajiban serta nilai kontrak/transaksi bisnis. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pengukuran inflasi bisa dilakukan dengan menggunakan indeks harga konsumen atau dengan menggunakan deflator PDRB.

Perkembangan inflasi sebagaimana yang tercermin pada nilai PDRB atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan, menunjukkan adanya bentuk keseimbangan antara permintaan (demand) dengan penyediaan (supply). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta inflasi tahun 2019 mencapai angka 3,19 persen dan tahun 2020 sebesar 1,51 persen. Berikut adalah grafik Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten

Purwakarta Tahun 2013 – 2020:

**Grafik 2.1**  
**Laju Inflasi Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020**



Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Perda No 3 Tahun 2021)

### C. Penduduk Miskin

Kemiskinan menurut pengertian umum adalah keadaan dimana individu atau sekelompok masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti makanan, pakaian tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan yang layak. Adapun data penyaluran Raskin Kabupaten Purwakarta tahun 2013-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**Penduduk Miskin Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)	Jumlah penduduk Miskin (Orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	217.270	83.600	9,28
2014	281.524	80.300	8,8
2015	296.477	83.940	9,14
2016	312.449	83.550	8,98
2017	325.607	85.250	9,06
2018	352.061	75.940	7,99
2019	367.273	71.860	7,48
2020	378.287	80.170	8,27

Sumber: Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Perda No 3 Tahun 2021)

Dalam rangka melindungi kesehatan penduduk miskin, maka setiap penduduk miskin didaftarkan sebagai peserta Jamkesmas (jaminan kesehatan Masyarakat) yang kemudian berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Berdasarkan data peserta PBI JKN tahun 2020 tercatat sebanyak 376.488 jiwa (43,61%) dari seluruh peserta JKN yang terdiri dari 292.428 jiwa PBI APBN dan 84.060 jiwa peserta PBI APBD Kabupaten Purwakarta. Jumlah peserta PBI JKN khususnya PBI APBN masih fluktuatif terkait dengan data kepesertaan itu sendiri, seperti adanya yang meninggal dan pemutakhiran data di lapangan. Data kepesertaan PBI JKN dan capaian JKN tahun 2018 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Peserta PBI JKN APBN dan APBD dan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2018-2020**

Peserta JKN	Tahun					
	2018	%	2019	%	2020	%
Peserta PBI JKN						
PBI APBN	290.357	37,49	286.296	34,78	292.428	33,87
PBI APBD	80.035	10,33	84.058	22,70	84.060	9,74
Jumlah PBI	370.392	47,82	370.354	45,00	376.488	43,61
Pekerja penerima upah (PPU)	234.250	24,57	263.780	27,4	281.284	28,9
Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri	152.173	15,96	180.582	18,8	163.695	16,8
Bukan pekerja (BP)	16.153	1,69	16.180	1,7	13.797	1,4
Jamkesda/ JAMPIS	1.592	0,17				
Jumlah seluruh Peserta JKN	774.560	81,24	823.084	84,69	863.396	88,84

Sumber : Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan JPK/ Profil Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2020

Dengan melihat data peserta PBI JKN dengan penduduk miskin menunjukkan PBI JKN jauh lebih tinggi yaitu 376.488 orang atau 38,74

persen dari jumlah penduduk dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 80.170 orang (8,27%) tahun 2020. Dengan demikian secara kuantitas seharusnya seluruh masyarakat miskin sudah terlindungi Jaminan Kesehatan Nasional. Namun dalam kenyataan di lapangan masih adanya keluhan penduduk miskin yang termasuk peserta PBI JKN, hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan sehingga masyarakat tidak ada kesulitan dalam pelayanan kesehatan maupun penanganan ketika sakit, khususnya penyakit-penyakit yang membutuhkan biaya sangat besar seperti penyakit katastropik antara lain kanker, cuci darah dan lain sebagainya.

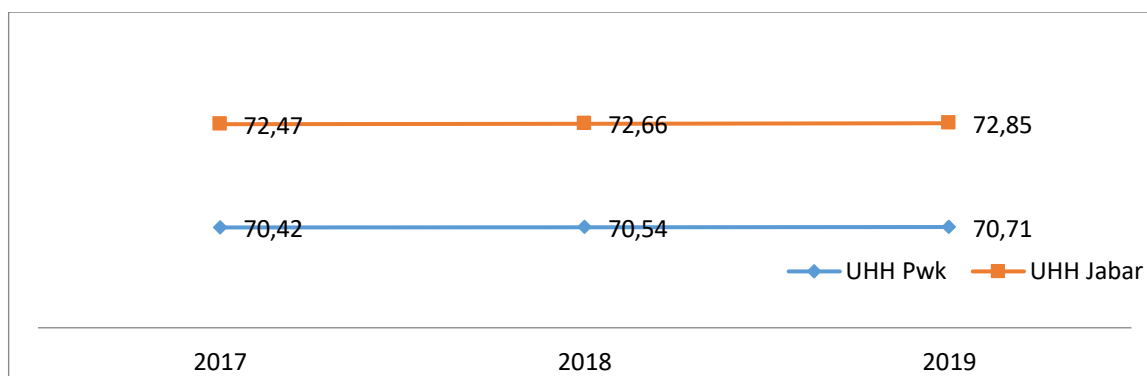
Disisi lain, masyarakat seringkali terlena saat sehat dan tidak memikirkan biaya ketika sakit, sehingga akhirnya kesulitan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan maupun penanganan sakit dan penyakitnya. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya peserta JKN mandiri, dimana dimana masih cukup rendahnya kepesertaan masyarakat yaitu 16,8 persen pada Pekerja bukan penerima upah (PBPU)/mandiri dan 1,4 persen pada bukan pekerja. Untuk itu perlu didorong kepesertaan mandiri pada masyarakat sehingga dapat mencapai Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen, dimana tahun 2020 capaiannya baru 88,84%.

### **2.3.2 Derajat Kesehatan Masyarakat**

#### **A. Umur Harapan Hidup (E<sub>0</sub>)**

Umur Harapan Hidup waktu lahir merupakan salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan secara luas. Tinggi rendahnya Umur Harapan Hidup dapat menggambarkan taraf kesejahteraan hidup suatu daerah, termasuk pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Pada Grafik 3.1 dapat dilihat perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Purwakarta berdasarkan data dari Bappeda Kabupaten Purwakarta pada RPJMD tahun 2013-2018 dan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut :

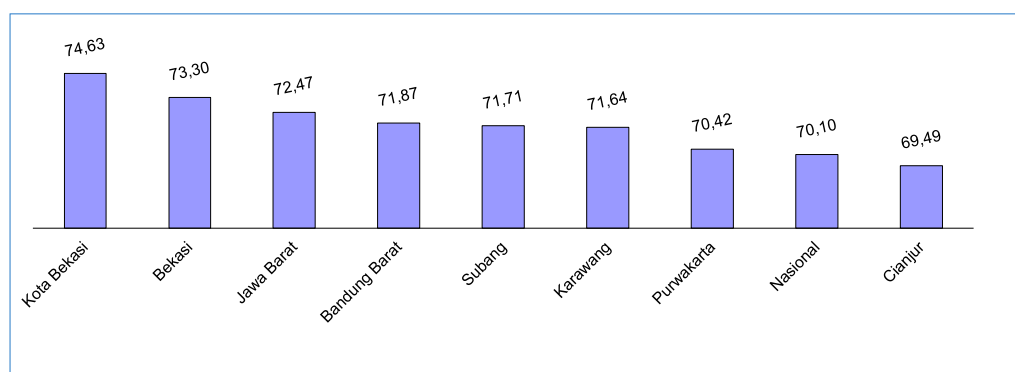
**Grafik 2.2**  
**Umur Harapan Hidup di Kabupaten Purwakarta**  
**dan Provinsi Jawa Barat**  
**Tahun 2017 s/d 2019**



Sumber: RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018 dan Tahun 2018-2023

Pada grafik di atas dapat diketahui bahwa Umur Harapan Hidup menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 70,42 tahun pada tahun 2017 meningkat hingga mencapai 70,71 pada tahun 2019. Namun capaian tersebut masih dibawah UHH Provinsi Jawa Barat dimana tahun 2017 tercatat sebesar 70,42 dan meningkat menjadi 72,85 tahun 2019. Peningkatan UHH ini memberi indikasi bahwa telah terjadi peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang diikuti dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat.

**Grafik 2.3**  
**Perbandingan Umur Harapan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan**  
**Wilayah Sekitar, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2017**



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Berdasarkan grafik diatas maka UHH di Kabupaten Purwakarta masih diatas nasional tetapi dibawah Jawa Barat, begitu pun dengan wilayah

sekitar, Kabupaten Purwakarta masih dibawah UHH wilayah sekitar tetapi lebih tinggi dibandingkan Cianjur.

## **B. Kematian**

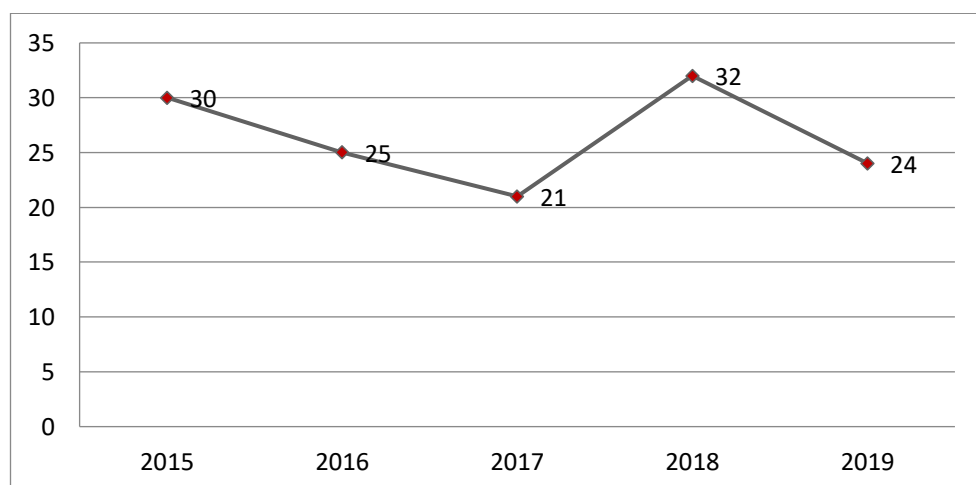
### **a. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)**

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) atau Maternal Mortality Rate (MMR) menggambarkan besarnya risiko kematian ibu pada fase kehamilan, persalinan dan masa nifas di antara 100.000 kelahiran hidup dalam satu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Jumlah kasus kematian ibu maternal cenderung menurun meskipun masih fluktuasi. Kematian ibu tahun 2019 tercatat sebesar 24 kasus menurun dibandingkan tahun 2018 yang tercatat sebanyak 32 kasus.

Hal ini terlihat data laporan program KIA/KB, sebagai berikut:

**Grafik 2.4**  
**Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Maternal**  
**di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 s/d 2019**



Sumber: Dinas Kesehatan, 2009-2019

Sedangkan jumlah kematian Ibu di Jawa Barat tahun 2019 berdasarkan pelaporan profil kesehatan kabupaten/kota sebanyak 684 kasus atau 74,19 per 100.000 KH, menurun 16 kasus dibandingkan tahun 2018 yaitu 700 kasus.



**Grafik 2.5**

Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019

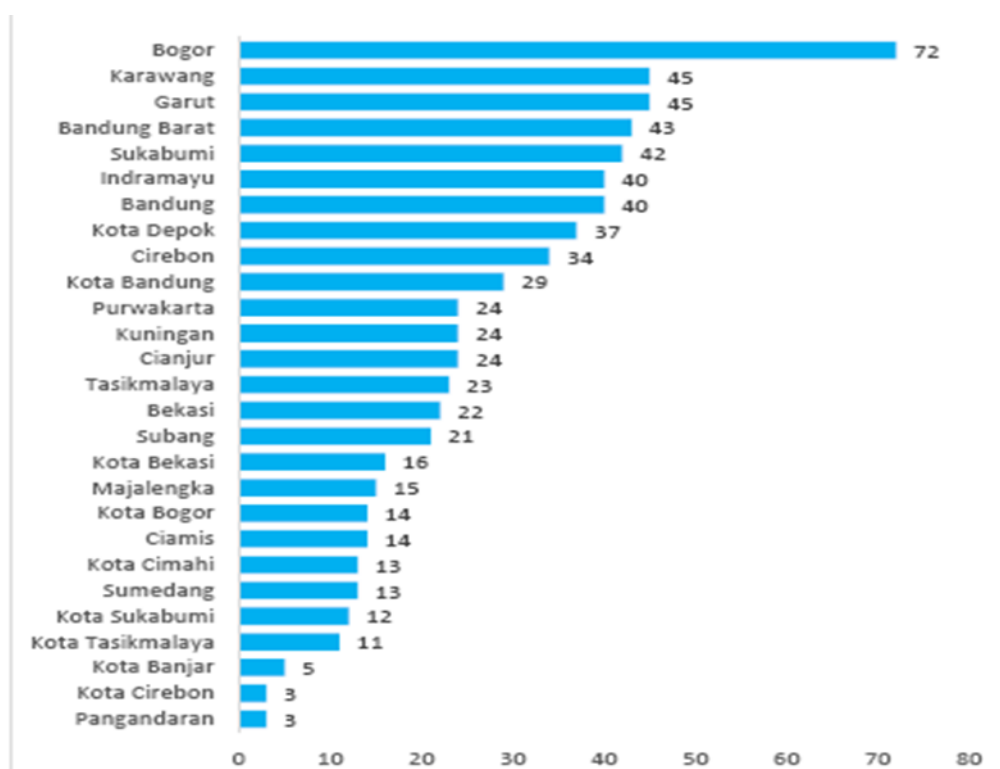


Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2019

Sedangkan jumlah kematian ibu di Jawa Barat tahun 2019 berada di urutan 11 dari 27 Kabupaten/kota se Jawa Barat.

**Grafik 2.6**

**Jumlah Kematian Ibu (Dilaporkan) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2019

Berdasarkan penyebab kematian ibu yaitu perdarahan masih mendominasi pada tahun 2017 dan tahun 2019 diikuti penyakit lainnya, sedangkan tahun 2018 eklamsi menduduki peringkat pertama. Sedangkan pada tahun 2019 kematian akibat hipertensi meningkat menggeser trias klasik (perdarahan, eklamsi dan infeksi) dan sebab lain yang tidak diketahui.

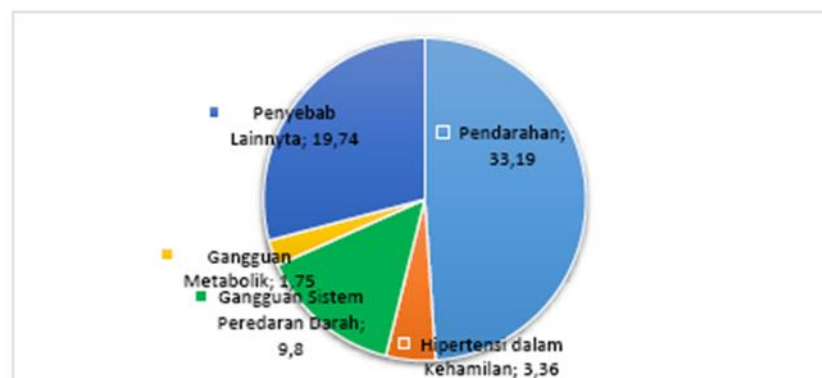
**Tabel 2.5**  
**Faktor Penyebab Kematian Ibu Maternal di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 - 2019**

KASUS	2017	2018	2019
a. Perdarahan	7	7	7
b. Eklamsi	6	12	4
c. Hipertensi	0	0	4
d. Infeksi	0	2	1
e. Lain-lain	8	11	5
Jumlah	21	32	24

Sumber: Laporan Program Kesga dan Gizi, Tahun 2017-2019

Hal ini tidak berbeda jauh dengan penyebab kematian ibu di Jawa Barat dimana masih didominasi oleh 33,19 % pendarahan, 32,16 % hipertensi dalam kehamilan 3,36 % Infeksi 9,80 % gangguan sistem peredaran darah (jantung), 1,75 % gangguan metabolik dan 19,74 % penyebab lainnya.

**Grafik 2.7**  
**Penyebab Kematian Ibu (Dilaporkan) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2019

**Tabel 2.6**  
**Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Masa Maternal dan Umur**  
**di Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 s/d 2019**

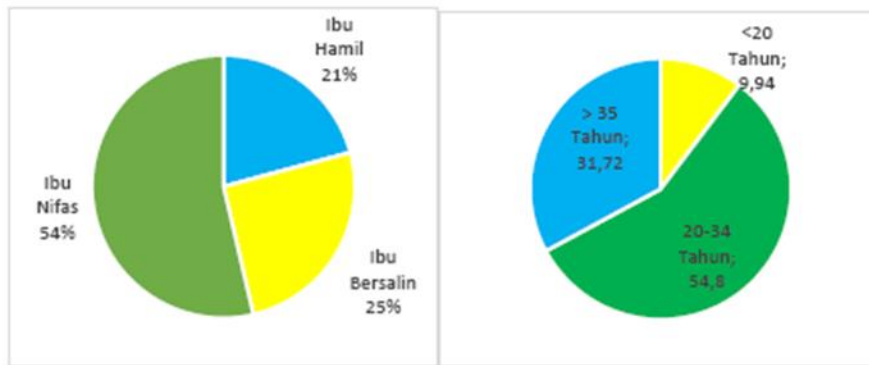
Masa Maternal	Kelompok Umur	2017		2018		2019	
		Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
Ibu Hamil	<20 tahun	0	0	0	0	0	0
	20-34 tahun	6	66,67	6	66,67	1	33,33
	≥ 35 tahun	3	33,33	3	33,33	2	66,67
Ibu Bersalin	<20 tahun	0	0	0	0	0	0
	20-34 tahun	1	100,0	1	100,0	2	40,00
	≥ 35 tahun	0	0	0	0	3	60,00
Ibu Nifas	<20 tahun	6	54,55	6	54,55	1	6,25
	20-34 tahun	5	45,45	5	45,45	10	62,5
	≥ 35 tahun	0	0	0	0	5	31,25
Kematian Ibu	<20 tahun	6	28,57	6	28,57	1	4,17
	20-34 tahun	12	57,14	12	57,14	13	54,16
	≥ 35 tahun	3	14,29	3	14,29	10	41,67
Kematian Ibu	Ibu Hamil	9	42,86	9	42,86	3	12,5
	Ibu Bersalin	1	4,76	1	4,76	5	20,83
	Ibu Nifas	11	52,38	11	52,38	16	66,67

Sumber: Dinas Kesehatan, 2017-2019

Kematian ibu maternal tertinggi adalah pasca persalinan atau masa nifas pada setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan kelompok umur tertinggi terjadi pada umur 20-34 tahun. Hal ini harus menjadi perhatian terkait penanganan pasca persalinan dan usia ibu hamil yang masuk dalam kelompok usia produktif. Sedangkan data Provinsi Jawa Barat tahun 2019 kematian ibu sebanyak 684 orang terjadi pada ibu hamil sebanyak 18,7%, ibu bersalin sebanyak 22,95 % dan ibu nifas sebanyak 48,2 %. Kematian

Ibu berdasarkan pada kelompok umur <20 tahun sebesar 9,94 %, kelompok umur 20 - 34 tahun sebesar 54,82 % dan >35 tahun sebesar 31,72 %.

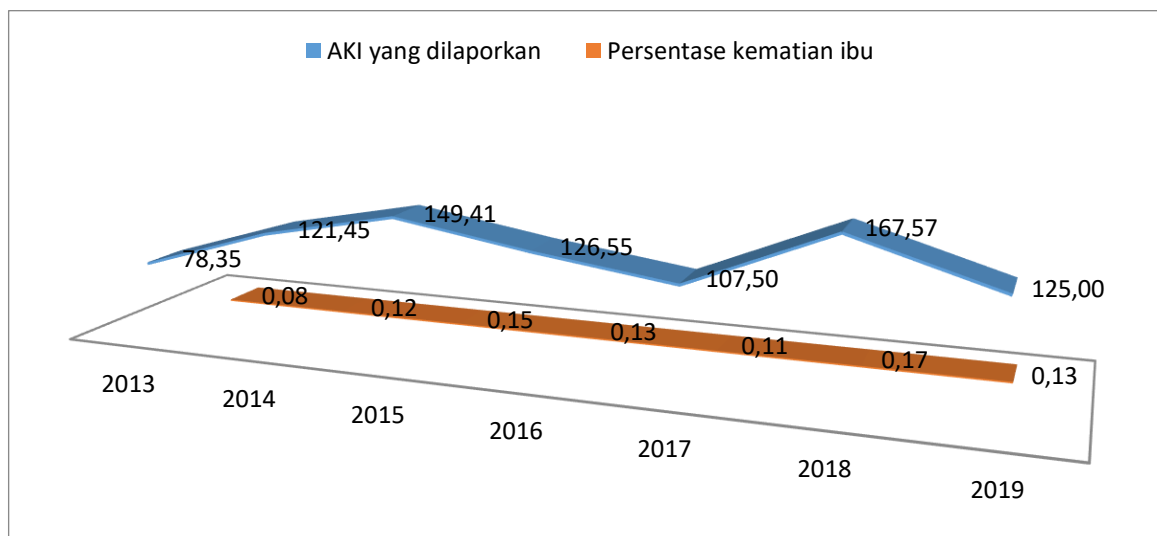
**Grafik 2.8**  
**Persentase Kematian Ibu Berdasarkan Kelompok Umur dan Persalinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019**



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2019

Apabila kasus tersebut diproporsikan dalam AKI berdasarkan data pelaporan dan persentase kematian ibu maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:

**Grafik 2.9**  
**Perkembangan AKI yang dilaporkan dan Persentase Kematian Ibu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 s/d 2019**



Sumber: Dinas Kesehatan, 2013-2019

Berdasarkan grafik diatas maka AKI yang dilaporkan dan persentase kematian ibu memperlihatkan trend yang baik yaitu cenderung menunjukkan penurunan, meskipun masih terjadi fluktuatif sehingga perlu upaya kerja keras untuk menekan kematian ibu baik dari sarana prasarana maupun sumber daya manusia serta dukungan masyarakat terhadap pentingnya gerakan penyelamatan ibu melahirkan tersebut.

Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

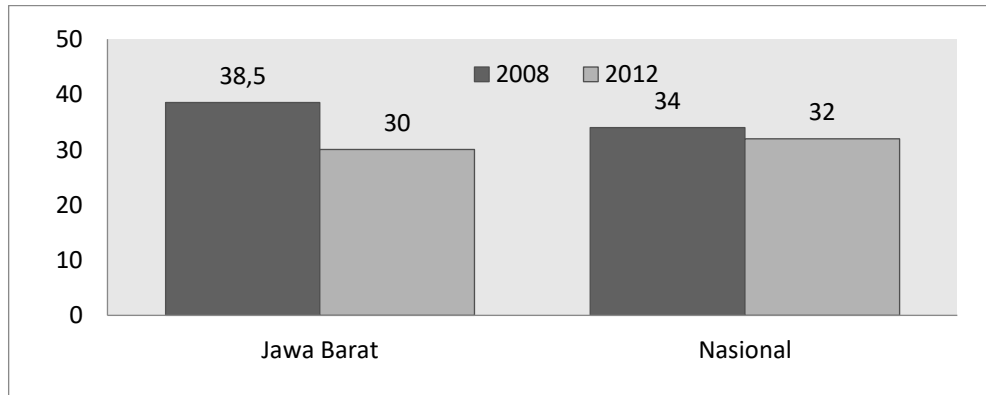
#### **b. Angka Kematian Bayi (AKB)**

Upaya kesehatan anak diatur dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

AKB menggambarkan besarnya risiko kematian bayi (<1 tahun) dalam 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun pada setiap 1000 kelahiran hidup. AKB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Angka Kematian Bayi di Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup drastis dan tahun 2012 telah melampaui angka nasional sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini

**Grafik 2.10**

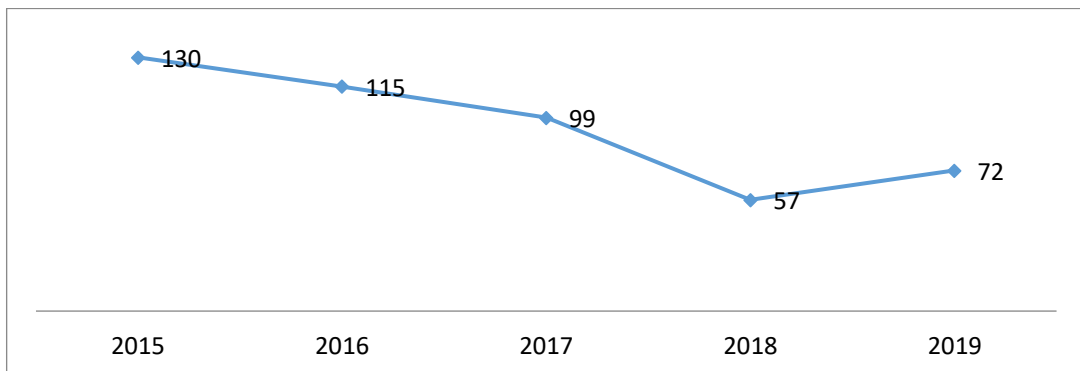
**Perbandingan AKB Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2008, 2012**



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 dan Indonesia Tahun 2012

Menurut data laporan program kesga dan gizi, perkembangan jumlah kasus kematian bayi digambarkan sebagai berikut:

**Grafik 2.11**  
**Jumlah Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 s/d 2019**

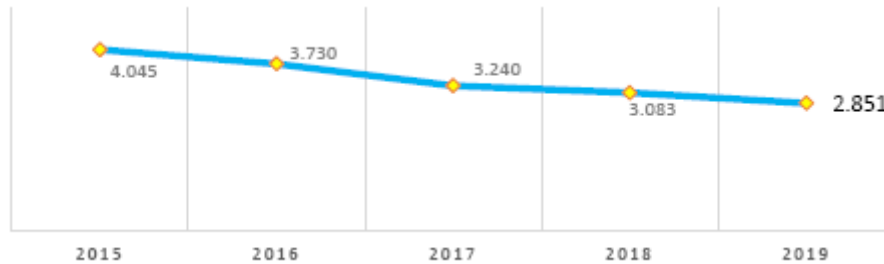


Sumber : Dinas Kesehatan, 2015-2019

Berdasarkan grafik diatas maka jumlah kasus kematian bayi dari tahun ke tahun menggambarkan trend yang baik yaitu terus menunjukkan penurunan dimana tahun 2015 dengan jumlah kasus 130 kasus menjadi 57 kasus di tahun 2018 dan 72 kasus di tahun 2019. Sedangkan data di Provinsi Jawa Barat rasio Kematian Bayi pada tahun 2019 sebesar

3,26/1000 kelahiran hidup atau 2.851 kasus, menurun 0,14 poin dibanding tahun 2018 sebesar 3,4/1000 kelahiran hidup atau 3.083 kasus.

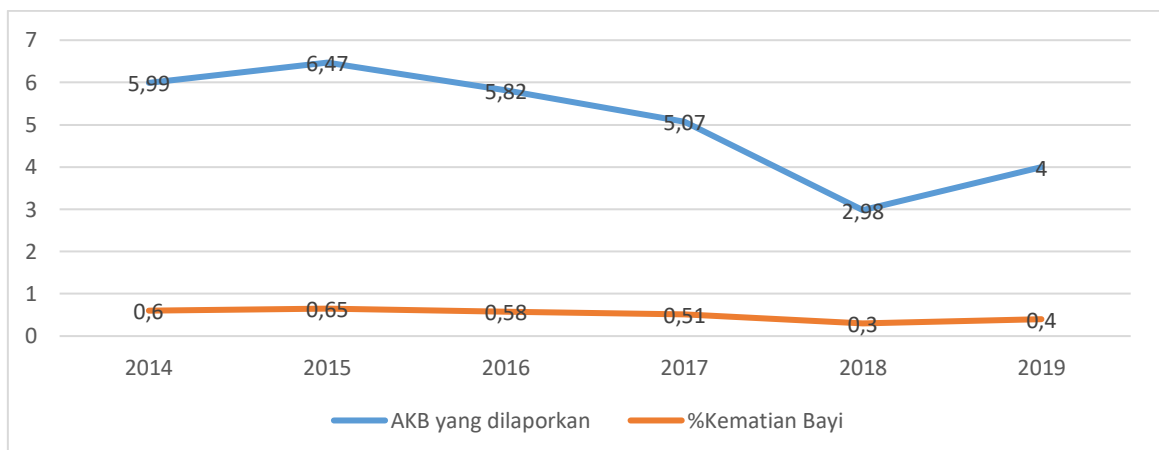
**Gambar 2.12**  
**Jumlah Kematian Bayi**  
**di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2019**



Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 2019

Apabila kasus tersebut diproporsikan dalam AKB berdasarkan data pelaporan dan persentase kematian bayi maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:

**Grafik 2.13**  
**Perkembangan AKB yang dilaporkan dan Persentase Kematian Bayi**  
**di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 s/d 2019**



Sumber: Dinas Kesehatan, 2013-2019

Berdasarkan grafik diatas maka AKB yang dilaporkan dan persentase kematian bayi memperlihatkan trend yang baik yaitu cenderung

menunjukkan penurunan walaupun masih adanya fluktuasi, dimana tahun 2014 tercatat AKB yang dilaporkan sebesar 5,99 perseribu kelahiran hidup atau 0,6 persen kematian bayi menjadi 2,98 perseribu kelahiran hidup atau 0,3 persen kematian bayi di tahun 2018 dan 4 perseribu kelahiran hidup atau 0,4 persen kematian bayi di tahun 2018.

### **C. Kinerja Strategis Dinas Kesehatan**

Kinerja pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan keberhasilan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Untuk mengukur kinerja pelayanan kesehatan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta mengacu pada indikator Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Untuk mengukur kinerja Renstra Dinas Kesehatan maka mengacu kepada indikator kesehatan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023, dengan melihat hasil capaian tahun 2017-2019 sebagai berikut:



**Tabel 2.7 (Tabel T C-23 Permendagri No 86 tahun 2017)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2017 s/d 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Rensta Dinas Kesehatan (Tahun Ke-)					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-						
						1	2	3	4	5	-1	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
						2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	5-1	6	7	8	9	10	11-2	11-1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>A</b>	<b>Indikator pada RPJMD 2018-2023 berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b>																					
1	Umur Harapan Hidup		IKU	RPJMD	Indeks	70.65	70.77	70.89	71.01	71.13	70.42	70.54	70.71	70.99				100.1	100.3			
2	Persentase kematian ibu		IKU	RPJMD	%	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.11	0.17	0.13	0.17				86.7	130.8			
3	Persentase kematian bayi		IKU	RPJMD	%	0.5	0.49	0.46	0.44	0.41	0.53	0.29	0.4	0.21				80.0	42.9			
1	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial		IKU	RPJMD	%	90	90	90	95	95	85	88.33	85	97.67				94.4	108.5			
2	Prosentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja		IKU	RPJMD	%	66.67	66.67	75	75	83.33	58.33	58.33	41.67	75				62.5	112.5			
3	Cakupan sarana farmasi yang dibina		IKU	RPJMD	%	85.71	90	92	95	100	77.92	80.52	76.67	100				89.5	111.1			
4	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri		IKU	RPJMD	%	62.02	62.71	63.3	63.89	65.16	60.94	61.63	59.2	63.76				95.5	101.7			
5	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS		IKU	RPJMD	%	65.68	65.84	65.87	66	66.09	64.87	65.25	62.83	65.99				95.7	100.2			
6	Cakupan pelayanan anak balita		IKU	RPJMD	%	71.54	74.35	78.57	83.03	85.99	68.72	70.13	71.35	62.5				99.7	84.1			

7	Cakupan pelayanan bayi		IKU	RPJMD	%	98.8	98.8	98.8	98.8	98.8	98.35	98.43	99.9	100				101.1	101.2			
8	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)		IKU	RPJMD	%	75.83	75.94	75.95	75.96	75.97	75.73	75.79	78.1	79.9				103.0	105.2			
9	Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat		IKU	RPJMD	%	57.09	58.28	59.14	61.24	61.83	54.43	55.61	58.25	50.61				102.0	86.8			
10	Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita DBD		IKU	RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100.0	100.0			
11	Prosentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap		IKU	RPJMD	%	84.77	85.02	85.3	85.41	85.9	84.18	84.64	95.7	92.06				112.9	108.3			
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)					83.12	83.92	84.41	85.05	86.01	81.99	82.48	68.84	65.94				82.8	78.6			
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		IKU	RPJMD	%	1.22	1.26	1.31	1.34	1.4	1.19	1.07	61.16	26.26				5013.1	2084.1			
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin		IKU	RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	56.76	67.85				56.8	67.9			
15	Prosentase kepesertaan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan		IKU	RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100.0	100.0			
16	Prosentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik		IKU	RPJMD	%	46.15	53.85	63.08	69.23	75.38	38.46	46.15	61.16	66.67				132.5	123.8			
17	Prosentase fasilitas kesehatan yang dibina		IKU	RPJMD	%	31.2	43.2	53.6	63.2	69.6	20	24	100	100				320.5	231.5			
18	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4		IKU	RPJMD	%	99.06	99.09	99.14	99.19	99.25	98.68	99.06	100	99.41				100.9	100.3			
19	Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani		IKU	RPJMD	%	70.14	72.69	75.23	77.77	82.86	94.95	70.13	103.2	100				147.1	137.6			
20	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan		IKU	RPJMD	%	98.88	99.04	99.14	99.57	99.62	98.68	98.66	101	100				102.1	101.0			
21	Persentase Cakupan Pelayanan Individu, Keluarga dan masyarakat dalam menumbuhkan					80	80	80	80	80	64,87	65,25	62.83	65.99				78.5	82.5			

	perilaku hidup sehat dan mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat																						
22	Prosentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya		IKU	RPJMD	%	90	90	95	100	100	75	80	90	90				100.0	100.0				
23	Meningkatnya jumlah kunjungan pemeriksaan Labkesda (5% per tahun)		IKU	RPJMD	%	80	85	90	95	100	70	75	95	89.41				118.8	105.2				
24	Meningkatnya jumlah parameter pemeriksaan Labkesda		IKU	RPJMD	%	84.47	88.35	92.23	96.12	100	76.7	80.58	109	83.5				129.0	94.5				
25	Prosentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang masih berlaku		IKU	RPJMD	%	83.54	85.23	89.03	93.25	100	78.9	80.17	100	100				119.7	117.3				
<b>B</b>	<b>Indikator pada RPJMD 2018-2023 berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b>																						
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah			RPJMD	Opini		BB	BB	BB	BB												100.0	
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran			RPJMD	%		70	75	80	85				65	68								97.1
3	Rerata capaian SPM bidang kesehatan			RPJMD	%		70	75	75	80				67	75								107.1
4	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial			RPJMD	%		90	90	95	95				90	97.67								108.5
5	Pemenuhan tenaga kesehatan minimal (9 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar			RPJMD	%		85	90	95	100				80	80								94.1
6	Cakupan sarana farmasi yang dibina			RPJMD	%		88	92	95	100				86	100								113.2
7	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri			RPJMD	%		63	63	64	65				62	63.76								101.7
<b>C</b>	<b>Standar Pelayanan</b>																						

<b>Minimal Bidang Kesehatan (Permenkes No 43 tahun 2019)</b>																					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Permenkes			%	100	100	100	100	100		97.74	100.53	99.4				100.5	99.4		
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Permenkes			%	100	100	100	100	100		98.67	101.04	92.9				101.0	92.9		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Permenkes			%	100	100	100	100	100		103.92	107.17	107.1				107.2	107.1		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Permenkes			%	100	100	100	100	100		47.55	71.35	62.5				71.4	62.5		
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Permenkes			%	100	100	100	100	100		86.74	100	98.2				100.0	98.2		
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Permenkes			%	100	100	100	100	100		1.05	23.04	26.3				23.0	26.3		
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Permenkes			%	100	100	100	100	100		42	13.14	18				13.1	18.0		

8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Permenkes			%	100	100	100	100	100		6.18	9.44	22.4				9.4	22.4			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Permenkes			%	100	100	100	100	100		2.17	74.46	73.4				74.5	73.4			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Permenkes			%	100	100	100	100	100		118.25	99.85	69.6				99.9	69.6			
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Permenkes			%	100	100	100	100	100		93.58	88.78	65.9				88.8	65.9			
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Permenkes			%	100	100	100	100	100		83.3	48.9	63.5				48.9	63.5			

**Tabel 2.8 (T-C. 2.4 Permendagri No 86 tahun 2017)  
Alokasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2017-2023**

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan												
		-1	0	1	2	3	4	5	-1	0	1	2	3	4	5	-1	0	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2021 Parsial 1	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
1.02 . 1.02.01	<b>Dinas Kesehatan</b>	103,145,674,946	116,758,948,038	137,516,871,095	168,517,545,050	144,034,772,969	234,991,255,133	151,567,791,595	159,494,787,096	78,054,675,504	89,662,768,749	114,427,574,136	121,732,326,551				0.00	0.00	0.00	75.67	76.79	83.21	72.24	0.00	0.00	0.00	5.23	77.00	
1.02 . 1.02.01.0 1 . 07	<b>Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran</b>				14,522,292,900							14,150,405,720										97.44							
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9,181,110,000	11,135,160,000	12,182,940,000						8,846,179,657	10,839,417,507	11,414,224,931							96.35	97.34	93.69								











1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					11,484,588,257	26,789,593,130	12,085,232,223	12,717,289,868												5.23		
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					597,635,651	560,577,147	628,891,996	661,783,047													5.23	
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					224,991,173	176,361,774	236,758,211	249,140,666													5.23	

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan berkaitan dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesehatan, berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta :

### **2.4.1 TANTANGAN**

- a) Banyaknya jenis kegiatan di Kabupaten Purwakarta yang berakibat terjadinya perubahan pemanfaatan ruang, terdapatnya permukiman kumuh dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat, dan belum tersedianya ruang untuk sektor informal yang memberikan tekanan berat pada kondisi fisik alam Kabupaten Purwakarta.
- b) Kependudukan dan sumber daya manusia di Kabupaten Purwakarta yang cukup tinggi. Selain itu tingginya kontak dengan dunia luar, besarnya pengaruh narkoba dan seks bebas dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi memiliki resiko lebih tertular penyakit.
- c) Perilaku masyarakat tentang kesehatan khususnya pencegahan penyakit masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan upaya dalam memberikan informasi yang benar tentang pencegahan penyakit.
- d) Belum semua masyarakat Kabupaten Purwakarta terjamin pembiayaan asuransi kesehatan.
- e) Sistem transportasi Kabupaten Purwakarta yang tidak tertata dengan baik dapat menjadi penghambat pembangunan kesehatan.

### **2.4.2 PELUANG**

- a) Telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 - 2031, tentunya dapat memberikan peluang pembangunan infrastruktur kesehatan.
- b) Adanya komitmen politis/dukungan politis Pemda dalam memenuhi kebutuhan anggaran bidang kesehatan.

- c) Kebiasaan dan perilaku masyarakat berobat kesarana kesehatan cukup baik.
- d) Dekat dengan pusat pelayanan kesehatan dengan kualifikasi pelayanan yang lebih tinggi, seperti rumah sakit kabupaten dan provinsi.

# **BAB**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **DINAS KESEHATAN**



#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan**

Faktor kesehatan masyarakat merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting mengingat bahwa pada pelaksanaannya upaya penanganan kesehatan disamping upaya kuratif berupa pengobatan setelah masyarakat terkena penyakit, ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit.

Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan menjadi penting mengingat bahwa beberapa penyakit yang berjangkit luas pada warga masyarakat berawal dari rendahnya kualitas kesehatan lingkungan. Untuk itu diperlukan peningkatan layanan kesehatan preventif dan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

Disamping upaya promotif dan preventif tersebut di atas, upaya penting lain yang menjadi lini terdepan dalam isu kesehatan adalah upaya kuratif dan rehabilitatif, yaitu pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan. Bentuk pelayanan kuratif tersedia melalui pelayanan Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), pos kesehatan desa (poskesdes)/bidan desa, saung ambu, Klinik Kesehatan, dan rumah sakit.

Selain itu identifikasi permasalahan masih didominasi masalah klasik kesehatan antara lain :

1. Tingginya angka kematian ibu

Kasus kematian ibu di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 tercatat sebanyak 24 kasus mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 tercatat sebanyak 32 kasus tetapi masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 tercatat sebanyak 21 kasus. Sedangkan apabila dikonversikan dengan AKI maka tahun 2019 menjadi 125/100.000 kelahiran hidup dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 sebesar 168/100.000 kelahiran hidup tetapi lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 108/100.000 kelahiran hidup. Secara Angka tersebut menunjukkan telah mencapai target sesuai MDGs tahun 2015 yaitu 125/100.000 kelahiran hidup dan target RPJMN 2020-2024 sebesar 183/100.000 kelahiran hidup tahun 2024.

Namun melihat fluktuasi kasus kematian ibu maka kematian ibu tetap menjadi permasalahan utama dan prioritas di Kabupaten Purwakarta. Penyebab utama kematian ibu adalah perdarahan (29,2%), eklamsi (16,7%), dan hipertensi (16,7%). Penyebab lainnya antara lain infeksi dan jantung.

2. Tingginya angka kesakitan penyakit menular

Dari tahun ke tahun selama lima tahun terakhir profil kesehatan masyarakat di Kabupaten Purwakarta angka kesakitan atau

morbiditas masih didominasi oleh penyakit infeksi yang lama seperti ISPA, Diare, TBC, dan penyakit infeksi baru seperti HIV/AIDS.

Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (community based data) menunjukkan infeksi masih merupakan yang terbanyak pada pasien rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

Selain terjadinya perubahan penyakit dan epidemiologi penyakit yang dinamis dan sangat cepat berubah. Hal ini ditunjang dengan mobilitas penduduk yang cepat memungkinkan terjadinya perubahan dinamika penularan penyakit yang terjadi di masyarakat. Adanya kasus covid-19, demam berdarah, HIV/AIDS dan berbagai penyakit lainnya merupakan kasus import dari mobilitas penduduk yang berpergian ke luar dan masuk ke wilayah Kabupaten Purwakarta

Kasus pandemi covid-19 sangat mendominasi pada tahun 2020 dan 2021 menjadi permasalahan utama dan prioritas kesehatan, disamping merupakan penyakit baru dan penyebaran sangat cepat, serta belum adanya vaksinasi. Untuk itu tahun 2020 dan 2021 menjadi fokus penanganan baik melalui 3 T (testing, tracking, dan treatment) serta penyadaran masyarakat melalui 5 M (pengetatan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak fisik, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) serta percepatan vaksinasi covid-19 untuk membentuk imunitas kelompok. (herd immunity).

3. Kuantitas dan kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang

Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih sangat kurang bila dibandingkan dengan standar tenaga kesehatan yang seharusnya bila dihitung berdasarkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Dengan tingginya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan kesehatan yang meningkat, bila hal ini kurang diantisipasi oleh tenaga kesehatan maka akan berakibat buruk dari berbagai aspek kehidupan khususnya untuk peningkatan



kualitas kesehatan masyarakat.

4. Alokasi anggaran kesehatan yang terbatas dan tidak memadai untuk anggaran program dan kegiatan kesehatan

Dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kesehatan merupakan salah satu urusan wajib dan pelayanan dasar di daerah. Dimana berdasarkan dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mensyaratkan pembiayaan kesehatan pada Bab XV pasal 171 ayat 2 dan 3 sebagai berikut:

- (2). Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
- (3). Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Permasalahan lain pada urusan kesehatan di Kabupaten Purwakarta, diantaranya adalah:

1. Integrasi aktivitas pelayanan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan belum optimal.
2. Jumlah SDM kurang dan kualitas SDM belum memenuhi standard
3. Pelaksanaan Administrasi (Kebijakan dan SOP) belum berjalan optimal.
4. Penempatan SDM belum sesuai dengan beban kerja.
5. Sistem Data dan Informasi belum terintegrasi secara optimal.
6. Fungsi Pengawasan belum optimal.
7. Usulan perencanaan sering kali berubah dan tidak tepat waktu dalam penyelesaiannya.
8. Perubahan orientasi kerja.

**Tabel 3.1.**  
**Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kesehatan**  
**Kabupaten Purwakarta**

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN/ KONDISI (2019)	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN
			Internal	Eksternal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Masih tinggi dan fluktuasinya kematian ibu dan bayi	125/100.000 KH lebih tinggi dari tahun 2018 (168/100.000 KH) dan tahun 2017 (168/100.000 KH)	183/100.000 KH dan konstan menurun	Belum efektifnya penanganan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas	Belum efektifnya peran serta masyarakat, dukungan keluarga (terlambat pengambilan keputusan), dukungan lintas sektor, tokoh masyarakat/tokoh agama,serta stakeholder	Pelayanan kesehatan belum didukung dengan sistem informasi dan sumber daya kesehatan yang adekuat, implementasi kebijakan yang belum optimal seperti desa siaga aktif, kemitraan bidan-paraji, pemanfaatan dan pengkajian AMP yang belum terintegrasi, holistik dan berkesinambungan.

<p>Masih belum terjangkaunya seluruh sasaran ibu hamil dan belum aksesnya sasaran pada fasyankes ditunjukkan dengan indikator persalinan oleh tenaga kesehatan di fasyankes</p>	<p>92,8%</p>	<p>100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya sweeping dan kunjungan rumah oleh bidan desa</li> <li>• Belum optimalnya kunjungan rumah dan PWS/register kohort/kantong persalinan ibu hamil</li> <li>• Belum terpantaunya semua pelayanan ibu hamil di masyarakat</li> <li>• Pemeriksaan ANC yang belum sesuai standar</li> <li>• Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang belum sesuai standar</li> <li>• Belum optimalnya peran bidan desa dan puskesmas</li> <li>• Belum optimalnya penyuluhan dan konseling ibu hamil di posyandu maupun di fasyankes lainnya</li> <li>• Belum efektifnya persalinan 4 tangan oleh tenaga kesehatan sesuai standar</li> <li>• Belum optimalnya sistem rujukan maternal baik selama kehamilan, persalinan maupun pasca persalinan dengan rumah sakit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan ulangan ke 4</li> <li>• Rendahnya keterlibatan suami dan keluarga</li> <li>• Masih adanya persalinan di luar tenaga kesehatan yang tidak didampingi (persalinan oleh dukun/paraji tanpa pendamping nakes)</li> <li>• Belum semua desa telah memiliki kesepakatan desa/peraturan desa tentang persalinan di fasilitas memadai dan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten</li> <li>• Belum optimalnya desa siaga</li> <li>• Belum optimal kemitraan bidan dan paraji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan Kesehatan dasar belum berkualitas</li> <li>- Ante natal care belum berkualitas</li> <li>- Keterjangkauan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan ke masyarakat belum optimal;</li> <li>- Kualitas, kuantitas serta jenis tenaga kesehatan masih kurang;</li> </ul>
---	--------------	-------------	--	--	--

Masih belum terjangkaunya seluruh sasaran bayi yang ditunjukkan dengan indikator kunjungan neonatus lengkap (KN3)	98,5 %	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas dan kuantitas serta jenis tenaga kesehatan yang kurang</li> <li>• Belum optimalnya peran bidan desa dan puskesmas</li> <li>• Belum optimalnya kunjungan rumah dan PWS/ register kohort bayi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya kesadaran Ibu dan keluarga untuk memeriksakan kesehatan bayinya ke posyandu, poskesdes dan puskesmas</li> <li>▪ Akses sarana kesehatan sulit terjangkau karena kondisi wilayah</li> </ul>	– Keterbatasan tenaga kesehatan di desa, sehingga kunjungan rumah masih rendah
Masih belum terjangkaunya seluruh sasaran anak balita yang ditunjukkan dengan indikator Cakupan Desa Imunisasi (Universal Child Immunization/ UCI ) dan Cakupan Imunisasi dasar lengkap	99,5% & 95,7%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan vaksin masih terbatas di kabupaten</li> <li>• Kendala biaya dalam penyediaan di provinsi sehingga pada waktu-waktu tertentu stok vaksin kosong</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya partisipasi masyarakat</li> <li>▪ Rendahnya dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama</li> <li>▪ Masih adanya budaya /kepercayaan pada sebagian kecil masyarakat yang menolak/ tidak mengimunisasikan bayinya</li> </ul>	– Terlambatnya realisasi anggaran untuk pengambilan vaksin di provinsi

Masih belum terjangkaunya seluruh sasaran anak balita yang ditunjukkan dengan indikator Cakupan pelayanan anak balita	64,2%	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya kunjungan rumah oleh bidan</li> <li>• Kurangnya pembinaan dan evaluasi capaian posyandu oleh petugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam mengelola posyandu</li> <li>▪ Masih rendahnya kesadaran orang tua tentang manfaat posyandu</li> </ul>	– Keterbatasan tenaga dan kurangnya pembinaan posyandu oleh tenaga kesehatan
Masih tingginya angka stunting pada baduta	27,7%	14%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlambatnya penemuan kasus</li> <li>• Belum optimalnya penanganan kasus di wilayah</li> <li>• Keterlambatan merujuk ke RS</li> <li>• Rendahnya monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pengetahuan orang tua dalam menemukan tanda-tanda gizi buruk stunting</li> <li>• Kurangnya kepatuhan orang tua dalam mengikuti proses perawatan</li> <li>• Kurang pengetahuan ibu dalam mengolah makanan bayi dalam rangka proses pemulihan</li> </ul>	– Penemuan dini kasus penanganan lanjutan kasus gizi buruk belum optimal

Cakupan peserta KB aktif yang belum mencapai standar	62 %	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua tenaga teknis (dokter, bidan dan perawat) mendapat pelatihan CTU</li> <li>• Belum optimalnya penemuan kasus</li> <li>• Konseling pratindakan dan pasca tindakan oleh petugas belum optimal</li> <li>• Penanganan efek samping pemasangan alat kontrasepsi belum terkordinir dengan baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk PUS untuk mengikuti KB</li> <li>- Kebijakan nasional Jampersal belum terintegrasi dengan kewajiban masyarakat untuk mengikuti KB karena tidak ada lagi kendala biaya persalinan</li> <li>- Kerjasama lintas sektor BPM &amp; KB belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenaga teknis KB belum semuanya terlatih CTU</li> </ul>
Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB belum mencapai SPM	88,8%	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penemuan semua kasus (Case detection Rate/CDR) TB</li> <li>• Belum semua tenaga teknis (dokter, bidan dan perawat) mendapat pelatihan TB</li> <li>• Belum semua puskesmas memiliki ATLM</li> <li>• Belum optimalnya sosialisasi TOSS (Temukan Obati Sampai Sembuh) TB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan dan pengobatan TB</li> <li>- Belum semua desa memiliki Pengawas Minum Obat (PMO)</li> <li>- Belum efektifnya peran serta masyarakat, dukungan keluarga, dukungan lintas sektor, tokoh masyarakat/tokoh agama,serta stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian CDR yang belum mencapai dan potensi penularan di masyarakat</li> <li>- Meningkatnya kasus MDR di masyarakat akibat penanganan dan kesadaran masyarakat untuk berobat sampai tuntas yang tidak adikuat</li> </ul>

Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	48,9	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemantauan kelompok kunci HIV/AIDS</li> <li>• Belum optimalnya konseling dan pengobatan HIV/AIDS</li> <li>• Belum semua tenaga teknis (dokter, bidan dan perawat) mendapat pelatihan HIV/AIDS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya stigma negatif pada ODHA (orang dengan HIV/AIDS)</li> <li>- Perilaku dan gaya hidup masyarakat</li> <li>- Belum efektifnya peran serta masyarakat, dukungan keluarga, dukungan lintas sektor, tokoh masyarakat/tokoh agama,serta stakeholder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian pemantauan dan pengobatan yang belum mencapai dan potensi penularan di masyarakat</li> </ul>
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	23,0	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya</li> <li>• Masih terbatasnya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan usia produktif</li> <li>• Masih kurangnya sosialisasi tentang pelayanan screening dan medical ceck up berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin/ screening dan medical ceck up berkala</li> <li>- Belum adanya kerjasama dengan faskes swasta dan klinik perusahaan dalam pencatatan dan pelaporan kesehatan usia produktif</li> <li>- Belum semua desa/sarana memiliki Pos Bindu PTM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan dan pelayanan kesehatan usia produktif yang belum optimal dapat meningkatkan potensi penyakit tidak menular baik katastrofik maupun degeneratif sehingga menjadi beban pembiayaan kesehatan yang besar dan tingginya kematian/kesakitan akibat penyakit tersebut.</li> </ul>

Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	13,1	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya</li> <li>• Masih terbatasnya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan lansia</li> <li>• Masih kurangnya sosialisasi tentang pelayanan screening dan medical ceck up berkala bagi lansia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin/ screening dan medical ceck up berkala untuk lansia</li> <li>• Belum adanya kerjasama dengan faskes swasta dan klinik perusahaan dalam pencatatan dan pelaporan kesehatan lansia</li> <li>• Belum semua desa/sarana memiliki Pos Bindu lansia</li> </ul>	<p>– Penanganan dan pelayanan kesehatan lanjut usia yang belum optimal dapat meningkatkan potensi penyakit tidak menular baik katastrofik maupun degeneratif sehingga menjadi beban pembiayaan kesehatan yang besar dan tingginya kematian/kesakitan akibat penyakit tersebut.</p>
--------------------------------------	------	------	---	--	--



<p>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</p>	<p>9,4</p>	<p>100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya</li> <li>• Masih kurangnya sosialisasi tentang pelayanan screening dan medical ceck up berkala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin/ screening dan medical ceck up berkala</li> <li>• Belum adanya kerjasama dengan faskes swasta dan klinik perusahaan dalam pencatatan dan pelaporan kesehatan usia produktif</li> <li>• Belum semua desa/sarana memiliki Pos Bindu PTM</li> </ul>	<p>– Penanganan dan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang belum optimal dapat meningkatkan potensi penyakit tidak menular sehingga menjadi beban pembiayaan kesehatan yang besar dan tingginya masalah kesehatan kematian/kesakitan termasuk kematian ibu akibat hipertensi.</p>
---	------------	-------------	--	--	--

<p>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</p>	<p>74,5</p>	<p>100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pencatatan dan pelaporan di puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan lainnya</li> <li>• Masih terbatasnya sarana prasarana untuk pelayanan kesehatan penderita DM</li> <li>• Masih kurangnya sosialisasi tentang pelayanan screening dan medical ceck up berkala termasuk penanganan DM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya kesadaran untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin/ screening dan medical ceck up berkala</li> <li>- Belum semua desa/sarana memiliki Pos Bindu PTM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan dan pelayanan kesehatan penderita DM yang belum optimal dapat meningkatkan potensi penyakit tidak menular sehingga menjadi beban pembiayaan kesehatan yang besar dan tingginya kematian/kesakitan akibat penyakit tersebut.</li> </ul>
---	-------------	-------------	--	---	--

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih/ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023**

Berdasarkan visi misi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disebutkan visi dan misi tujuan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Visi

#### **"MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA"**

Misi

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.

Selain itu, sesuai dengan janji Kepala Daerah terpilih termaktub dalam **"9 Langkah Melanjutkan Purwakarta Istimewa (Program Prioritas Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih)"** yaitu:

1. Pelayanan Pendidikan Terintegrasi Dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat Melalui Program Satu Desa Satu SMP dan Satu SMA/SMK Berbasis Pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta Penambahan Layanan Angkutan Sekolah Gratis Untuk Daerah Prioritas yang Disesuaikan Dengan Rasio Jumlah Siswa Pada Setiap Desa/Kelurahan.
2. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan Berbasis Online serta Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya.

3. Pengembangan Pola Infrastruktur Pertanian Primer, Sekunder dan Tersier Secara Terintegrasi Berupa Pembangunan Irigasi, Bendungan Kecil dan Bendungan Besar serta Pengembangan Produk Asuransi Produk Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
4. Pengembangan Desa Berbasis Teknologi Dengan Mendorong Tumbuhnya Produk Unggulan Melalui Program Satu Desa Satu Produk Unggulan, serta Pengembangan Kelembagaan Usaha Desa Melalui Program Investasi Desa, Baik yang Dikelola Oleh Badan Usaha Milik Desa Maupun Lembaga Usaha Lainnya.
5. Optimalisasi Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Berbasis Industri dan Pariwisata Melalui Penambahan Lebar Jalan Kabupaten Dari 6 Meter Menjadi 9 – 12 Meter dan Dilengkapi Dengan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang Berestetika serta Penataan Seluruh Jalan Lingkungan Dengan Pengelolaan Teknologi Jalan yang Ramah Lingkungan, Pengembangan Bangunan Pemerintah, Mesjid, Mushola, Madrasah, Majelis Taklim dan Rumah Ibadah, Rumah Rakyat Miskin, Penambahan Ruang Terbuka Hijau dan Pusat Kebugaran Publik Seperti Sport Center, Lapangan Sepakbola dan Sarana Olahraga Lainnya di Setiap Desa/Kelurahan, serta Penataan dan Pengembangan Jaringan Listrik dan Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan.
6. Pengembangan Pariwisata Berbasis Pedesaan Melalui Program Pengembangan Kampung Budaya, Pendidikan Pariwisata Berbasis Alam dan Penyiapan Sawah-Sawah Abadi dan Sumber Air Abadi Oleh Pemerintah Daerah yang Dikelola Oleh Masyarakat Serta Jaminan Kesejahteraan Publik Melalui Pembagian Beras Premium Bagi Warga Miskin Melalui Program ATM Beras.
7. Pengembangan Pendidikan Profesional Bagi Siswa di Sekitar Industri Melalui Program Sekolah Manager Setingkat Diploma dan S 1, serta Pengembangan Beasiswa Bagi Para Calon Doktor di Bidang Studi Agama
8. Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa, RT, RW, Linmas, Guru Ngaji, Karang Taruna, BPD, Bamusdes, Imam Masjid, Muadzin, Bilal,

Khotib, Melalui Program Asuransi Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Hari Tua.

9. Pengembangan Iklim Investasi Melalui Pembangunan Pusat Pelayanan Perijinan Terpadu Dengan Pembangunan Mall Layanan Perijinan yang Berstandar Nasional untuk Layanan Dasar Publik Seperti Penerbitan Izin Investasi, IMB, KTP, Akte Kelahiran, Surat Nikah dan Layanan Publik Lainnya Serta Menumbuhkembangkan UMKM Melalui Program Stimulus Permodalan, Pengembangan Inovasi Produk, Pemasaran dan Revitalisasi Pasar Tradisional yang Ramah Lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas maka langkah/kebijakan strategis Dinas Kesehatan ada pada strategi ke-2 yaitu:

“Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan Berbasis Online serta Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya.”

Dengan memperhatikan hal tersebut maka fokus program kesehatan terkait visi bupati terpilih dengan RPJMD dan RENSTRA Dinas Kesehatan yaitu:

- Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi;
- Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan;
- (Aplikasi) Berbasis Online; dan
- Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya.

Selain berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 dimana arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan

pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai pengaturan pelaksanaannya. Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya.

**Tabel 3.2**  
Arah Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2019-2023

Arah Kebijakan					
Tahun 2019	Tahun 2020	Setelah Perubahan			
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1 Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pendidikan Kesetaraan	1 Penyediaan Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1 Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas dan Berdaya Saing	1 Optimalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan guna Mewujudkan Kualitas SDM yang Unggul dan Mandiri	
2 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar	2 Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Bagi Masyarakat Miskin	2 Peningkatan Akses dan Produksi Pangan Masyarakat	2 Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan Hidup, dan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban	2 Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Maju dan Modern	
3 Peningkatan Kualitas Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	3 Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik Yang Modern	3 Penguatan Peran UMKM dan Kewirausahaan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat	3 Peningkatan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin	3 Pemantapan Kualitas Infrastruktur Dasar, dan Strategis yang Terintegrasi	
4 Penguatan Kewirausahaan dan Peningkatan Akses Permodalan Usaha	4 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	4 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Daerah	4 Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengembangan Inovasi Daerah yang Berbasis IPTEK	4 Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing	

Sumber : RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023

Dengan melihat hal diatas maka dirumuskan faktor pendorong maupun penghambat terhadap pencapaian visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2018 dalam bidang kesehatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi, misi dan program**  
**Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018-2023**

No	MISI & PROGRAM KDH & WAKIL	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	1. Tingginya angka kematian ibu hamil, melahirkan, dan nifas/ Maternal Mortality Rate (MMR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih ada persalinan oleh dukun dan dirumah penduduk</li> <li>• Faktor 3 terlambat dan 4 terlalu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Digalakkannya Kemitraan bidan dan dukun</li> <li>○ Pemantauan ketat melalui dinas kesehatan</li> <li>○ Adanya jampersal, jamkesmas, jampis</li> </ul>
		2. Tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular</li> <li>• Rendahnya penemuan dini kasus penyakit/ masalah kesehatan</li> <li>• Rendahnya dukungan alat penunjang diagnostik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tersedianya tenaga terlatih untuk penemuan dini kasus penyakit</li> <li>○ Tersedianya tatalaksana penanggulangan penyakit</li> </ul>

		3. Kuantitas dan kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuota penerimaan PNS</li> <li>• dari tenaga kesehatan</li> <li>• masih terbatas pada jenis profesi tertentu</li> <li>• kualitas rekrutmen yang belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Regulasi pemerintah pusat untuk penerimaan dan penempatan Bidan dan dokter PTT</li> <li>○ Program pemerintah daerah untuk peningkatan jenjang pendidikan minimal menjadi Diploma III</li> <li>○ Ketersediaan anggaran yang memadai untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan yang berkesinambungan</li> </ul>
		4. Alokasi anggaran tidak mencukupi biaya kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan pagu anggaran tidak memenuhi kebutuhan skala prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Adanya suport dana BOK Puskesmas, JKN BPJS, jampersal dan NGO/LSM</li> </ul>



### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI dan Renstra Provinsi Jawa Barat**

#### **A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024**

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai bidang yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tatanan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, khususnya dalam bidang kesehatan ditandai dengan:

- 1) Terjaminnya keamanan kesehatan negara melalui kemampuan dalam melakukan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap ancaman kesehatan global;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat yang ditunjukkan dengan jangkauan bagi setiap warga negara terhadap lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh;

- 3) Status kesehatan dan gizi masyarakat yang semakin meningkat serta proses tumbuh kembang yang optimal, yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dan *Healthy Adjusted Life Expectancy* (HALE).

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi

Angka kematian ibu (*maternal mortality rate*) dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai *major project*, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. Menurunkan angka *stunting* pada balita

Proporsi balita *stunting* sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan *stunting* sebagai *major project* yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional

Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun demikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami

ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (*cost containment*).

4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi, menurunnya Angka Kematian Ibu, menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan, maka strategi pembangunan kesehatan 2005- 2025 adalah:

- a. pembangunan nasional berwawasan kesehatan;
- b. pemberdayaan masyarakat dan daerah;
- c. pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan;
- d. pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan;
- e. penanggulangan keadaan darurat kesehatan.

Dalam RPJMN 2020-2024, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.

**Tabel 3.4**  
**Indikator Sasaran Strategis RPJMN 2020-2024**  
**yang Menjadi Tanggung Jawab Kementerian Kesehatan**

No	Indikator	Status awal	Target 2024
1	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS 2015)	183
2	Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	24 (SDKI 2017)	16
3	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGBI 2019)	14%
4	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Risksdas 2018)	7
5	Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18
6	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global TB Report 2017)	190
7	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405
8	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1 (Risksdas 2018)	8,7
9	Prevalensi obesitas pada penduduk umur >18 tahun (%)	21,8 (Risksdas 2018)	21,8
10	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9 (Risksdas 2018)	90
11	Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40 (Kemkes, 2018)	100
12	Persentase rumah sakit terakreditasi	63 (Kemkes, 2018)	100
13	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 (Kemkes, 2018)	83
14	Persentase puskesmas tanpa dokter	12	0

	(%)	(Kemkes, 2019)	
15	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86 (Kemkes, 2018)	96

Guna tercapainya lima belas indikator sasaran strategis nasional tersebut, arah kebijakan pembangunan kesehatan nasional adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Arah kebijakan nasional tersebut dicapai melalui lima strategi, yaitu peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi; percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda; peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit; pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS); dan penguatan sistem kesehatan.

**B. Sasaran RJMD Provinsi Jawa Barat dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:**

Berdasarkan visi misi Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat terpilih yaitu:

Visi: Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan inovasi dan kolaborasi

Misi:

1. Membentuk manusia Pancasila yang bertaqwa
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan

4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota

Dalam bidang kesehatan termasuk dalam misi kedua yaitu melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara dengan IPM dan angka stunting.

Adapun program unggulan yaitu desentralisasi layanan kesehatan untuk mewujudkan kesehatan juara/Jabar sehat/ nagri walagri melalui revitalisasi pukesmas dan rumah sakit, Jabar sehat, layad rawat, jamkesda dan germas Jabar.

Dengan sasaran rencana strategis Kementerian Kesehatan RI dan dibandingkan dengan permasalahan capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana dalam tabel 3.5, akan menjadi isu penting dalam pencapaian kinerja di tahun yang akan datang.

**Tabel 3.5**  
**Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Berdasarkan Sasaran**  
**Renstra Kementerian Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong**  
**Keberhasilan Penanganannya**

NO	SASARAN JANGKA MENENGAH	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Seluruh Kabupaten/ Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (berlaku untuk 12 indikator)	Dari 12 indikator SPM, yang telah Mencapai standar sebanyak 7 indikator, sedangkan yang belum mencapai standar sebanyak 5 indikator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya jumlah dan jenis tenaga kesehatan</li> <li>- Penyebaran yang belum merata</li> <li>- Kurangnya pembiayaan di bidang kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan</li> <li>- Suport dana BOK</li> </ul>
2.	Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.	Masih tingginya angka kematian ibu (MMR), prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, cakupan pertolongan persalinan masih rendah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Faktor 3 terlambat</li> <li>- Kurangnya Keterampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir yang bermasalah</li> <li>- Terlambat penemuan kasus</li> <li>- Penanganan kasus belum adekuat</li> <li>- Keluarga pasien kurang kooperatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Digalakkannya Kemitraan bidan dan dukun</li> <li>- Adanya jampersal</li> <li>- Tingginya rujukan ke RSUD Kabupaten</li> <li>- Adanya PMT bagi gizi buruk</li> <li>- Pelaksanaan posyandu yang maksimal</li> <li>- Adanya program keluarga sadar gizi</li> <li>- Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi</li> </ul>

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kebijakan penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang [UU 24/1992], yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 [UU 26/2007]. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dasar hukum tata ruang wilayah Kabupaten Purwakarta telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 – 2031.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan PD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka PD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, PD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dalam rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis terlihat bahwa pola penggunaan tanah di Kabupaten Purwakarta dititikberatkan pada perumahan permukiman, pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan lainnya dengan azas: Aman,



Tertib, Lancar Dan Sehat (ATLAS). Berdasarkan asas tersebut salah satu sasaran penataan ruang wilayah adalah terwujudnya kesehatan jasmani (fisik) melalui Pembangunan:

- a. Penciptaan lapangan kerja, perumahan, menarik PMA dan PMDN (Formal dan Informal)
- b. Hiburan (Taman publik dan non publik dan taman hiburan rakyat)
- c. Latihan (Gelanggang remaja, stadion, lapangan olah raga)
- d. Membangun, Menambah dan memelihara (Tempat sampah, rumah sakit, puskesmas, panti jompo/ cacat).

Selain itu dalam Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, disebutkan penyusunan KLHS juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pelaksanaan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan pembangunan dalam jangka menengah. Pembangunan dilaksanakan harus memperhatikan keseimbangan antara pencapaian target ekonomi, keseimbangan sosial dan lingkungan. Terkait dengan lingkungan, pelaksanaan program harus mengutamakan bentuk pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip meminimalkan resiko kerusakan lingkungan.

Pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian terhadap keseimbangan lingkungan, dimana lingkup kesehatan termasuk dalam dimensi sosial dan lingkungan. Dimana kesehatan merupakan salah tujuan pembangunan dunia atau Renacana Aksi Global yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yaitu menghilangkan kelaparan mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan melalui

upaya menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, dan memenuhi kebutuhan gizi dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua melalui upaya mengurangi rasio angka kematian ibu, bayi baru lahir dan balita, dan mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya. Dalam dimensi lingkungan yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi layak yang berkelanjutan untuk semua melalui upaya mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka/stop buang air besar sembarangan dan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Dari hasil penelaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dapat dikemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kesehatan adalah:

Faktor penghambat:

1. Dikarenakan belum luasnya lapangan kerja bagi putra-putri daerah, menyebabkan banyak sumber daya manusia (termasuk yang putra daerah yang terbaik) berpindah (merantau) ke kabupaten ataupun provinsi lain. Hal ini menyebabkan SDM yang ada di kabupaten masih rendah, khususnya SDM kesehatan.
2. Belum tersedianya tempat hiburan dan latihan olahraga bagi rakyat sehingga sarana penunjang bagi kesehatan fisik dan juga mental masih sangat minim
3. Minimnya dana bagi pembangunan, penambahan dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana puskesmas dan juga sarana dan prasarana penunjang kesehatan.
4. Masih rendahnya perilaku masyarakat dalam membuang sampah, sehingga akan memungkinkan terjadinya penularan penyakit, penyumbatan saluran pembuangan air

sehingga dapat menimbulkan genangan dan banjir. Hal ini juga dapat menimbulkan penularan dan sumber penyakit seperti diare, gatal-gatal dan demam berdarah.

Faktor pendorong:

1. Dinas Kesehatan dan jajaran sudah mempromosikan kepada masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, di dalamnya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari demi terpeliharanya kesehatan individu.
2. Walaupun dalam jumlah yang terbatas dan beberapa puskesmas masih dalam kondisi yang memprihatinkan, keberadaan sarana puskesmas sudah dapat menjangkau masyarakat sekitarnya dan juga adanya unit kesehatan berbasis masyarakat yang membantu pencapaian kerja dari puskesmas.
3. Adanya dukungan dana dari pihak NGO/LSM seperti PNPM, P2DTK, WVI untuk pembangunan sarana penunjang pelayanan kesehatan (Poskesdes dan Posyandu).

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Adanya permasalahan dalam pelayanan kesehatan dan memperhatikan telaah Visi, Misi Kepala Daerah, rencana strategis Kementerian Kesehatan RI, kajian tata ruang wilayah dan lingkungan hidup maka dilakukan identifikasi kekuatan (strengths), Kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) kemudian dianalisis dengan analisa SWOT.

Hasil evaluasi strategi dengan analisis SWOT didapat peta kekuatan Dinas kesehatan pada Kuardan I, yang berarti memiliki keunggulan kompetitif atau keunggulan daya saing. Strategi yang digunakan adalah mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang. Kunci keberhasilan yang diperoleh yaitu Berdasarkan hasil penilaian faktor nilai ketekaitan, bobot faktor, nilai dukungan, nilai keterkaitan didapatkan beberapa faktor kunci keberhasilan yang menjadi tujuan

pada Dinas Kesehatan sebagaimana pada tabel 3.6

**Tabel 3.6**  
**Faktor Kekuatan dan Peluang Kunci**

<b>FAKTOR KEKUATAN DAN PELUANG KUNCI</b>			
	<b>Kekuatan Kunci</b>	<b>Peluang Kunci</b>	<b>Alternatif Tujuan</b>
1	Adanya standar pelayanan minimal kesehatan dan standar operasional tindakan medis dan non medis di unit pelayanan kesehatan	Adanya dana BOK, jampersal, JKN	Mengoptimalkan dana BOK, jampersal Puskesmas untuk meningkatkan pencapaian SPM
2	Komitmen bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan	Adanya posyandu dan desa siaga yang aktif di semua desa	Meningkatkan komitmen SDM Kesehatan dalam memberikan pelayanan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan
3	Kerjasama antar petugas dinkes, puskesmas dan RS yang baik	Adanya kerjasama Toga, Toma dan lintas sektor	Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor serta stakeholders
4	Tersedianya SDM dalam berbagai jabatan Fungsional	Adanya dukungan pengembangan SDM kesehatan	Mewujudkan SDM yang profesional dan sejahtera

Adapun isu-isu strategis dari hasil analisis SWOT dan dengan melihat hasil telaahan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta, dan Renstra Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta pada saat ini sampai pada lima tahun

mendatang adalah :

1. Masih dominannya permasalahan kesehatan ibu, bayi dan stunting

Kasus kematian Ibu dan bayi meskipun menunjukkan trend penurunan, tetapi masih fluktuatif dimana kematian ibu tahun 2019 sebanyak 24 kasus menurun dibandingkan tahun 2018 tetapi lebih tinggi dibandingkan tahun 2017. Sedangkan kasus kematian bayi tercatat tahun 2019 sebanyak 27 kasus meningkat dibandingkan tahun 2018 meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2017. Kasus se, kematian bayi 142 kasus dan kematian Balita 5 kasus. Angka kematian ibu ini masih tinggi bila dibandingkan dengan standar nasional. Meningkatnya beberapa penyakit menular seperti TB paru, ISPA, Diare dan HIV-AIDS. Selain itu juga penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat seperti hipertensi dan Diabetes.

2. Munculnya masalah penyakit baik penyakit baru (new emerging diseases) maupun penyakit lama/klasik yang muncul kembali atau belum dapat tertangani (re-emerging diseases), penyakit menular maupun penyakit tidak menular sehingga menimbulkan beban ganda penyakit (double borne diseases).

Penyakit menular masih didominasi dengan penyakit klasik seperti Tuberkulosis, HIV/AIDS dan penyakit yang dicegah dengan imunisasi (PD3I). Selain masalah penyakit menular dengan munculnya penyakit infeksi baru dan kedaruratan kesehatan masyarakat seperti Corona Virus Deases pada bulan Desember tahun 2019 atau yang dikenal dengan nama Covid-19.

Selain itu perlu diperhatikan penyakit trofis yang terabaikan (*Neglected Trofical Diseases*), dimana penyakit-penyakit tersebut yang relatif sudah berkurang secara Internasional tetapi masih menjadi masalah di Indonesia termasuk Kabupaten Purwakarta. Penyakit tersebut antara lain filariasis, kusta, frambusia dan schistosomiasis (kecacangan). Penyakit-penyakit ini menjadi target yang harus

diselesaikan.

Disisi lain telah terjadi perubahan beban penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular meliputi penyakit degeneratif dan penyakit katastrofik. Hal ini dapat dilihat dari perubahan penyakit utama *Disability Adjusted Life Years* (DALYs) lost. Penyebab utama DALYs lost tahun 1990 adalah neonatal disorder, lower respiratory infection, diarrheal dease, tuberculosis dan stroke. Pada tahun 2017, lima penyebab utama DALYs lost adalah stroke, ishenic heart disease (penyakit jantung iskemik), diabetes, neonatal disorder, dan tuberculosis.

3. Terbatasnya sumber daya manusia kesehatan baik kuantitas maupun kualitas tenaga kesehatan yang di miliki serta pemanfaatannya melalui pendidikan formal dan non formal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan pemerataan serta keterjangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
4. Desentralisasi dan terbatasnya anggaran Pembangunan kesehatan Dengan adanya desentralisasi terjadi perubahan sistem administrasi dan pembiayaan pembangunan daerah. Tiap sektor harus bersaing mendapatkan kuota anggaran yang terbatas untuk membiayai pembangunan termasuk kesehatan. Prioritas SKPD tidak lagi menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran.
5. Peran serta masyarakat  
Meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi aktif untuk berperilaku hidup bersih sehat dan mampu menolong dirinya sendiri khususnya pada kasus-kasus darurat. Peran serta masyarakat termasuk sektor swasta dan LSM/NGO akan semakin penting karena sangat dibutuhkan sebagai mitra dalam melaksanakan pelayanan dan pembiayaan pembangunan kesehatan, tidak saja pada tahap pengobatan dan rehabilitasi tetapi lebih berperan pada tahap promotif dan preventif.

## **BAB**

# **TUJUAN DAN SASARAN**

4

### **4.1. Tujuan**

Pada dasarnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dimana meningkatnya kemampuan masyarakat sehingga mampu mengenali permasalahan kesehatan dan mengatasi permasalahan kesehatan sehingga tercapai suatu kondisi masyarakat yang sehat, mandiri dan berkarakter.

Berdasarkan berdasarkan visi misi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disebutkan visi dan misi tujuan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

**Visi** : **Mewujudkan Purwakarta Istimewa**

**Misi** :

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Profesional.
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Perekonomian Rakyat Berbasis Desa.

Selanjutnya pada Perda Nomor 3 Tahun 2021 tersebut, maka visi, misi, tujuan dan sasaran yang terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu :

**Visi** : **Mewujudkan Purwakarta Istimewa**

**Misi I** : **Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
- Strategi 1.3.1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Dengan memperhatikan RPJMD tersebut maka tujuan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat” dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,24 tahun pada tahun 2023 di Kabupaten Purwakarta.

#### **4.2 Sasaran**

Berdasarkan visi misi dan tujuan pada RPJMD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 terkait dengan Dinas Kesehatan yaitu ;

- Visi : Mewujudkan Purwakarta Istimewa**
- Misi I : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**
- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Profesional dan Berbudaya**
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**
- Strategi 1.3.1 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan**

Dengan memperhatikan RPJMD tersebut maka strategi yang dicapai oleh Dinas Kesehatan merupakan sasaran pada RPJMD yaitu: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan, maka falsafah dan motto yang ingin dibangun adalah :

**Waluya Jatining Hurip (Kesehatan adalah esensi Kehidupan)**  
**Sehat Bersama kami, sejahtera bersama keluarga**



Sasaran yang menjadi tujuan pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sesuai yang tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat” dengan indikator yang ingin dicapai yaitu meningkatnya umur harapan hidup menjadi 71,24 tahun 2023.

Sedangkan sasaran yang menjadi sasaran strategis pembangunan kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan indikator yang ingin dicapai yaitu menurunnya persentase kematian ibu dan bayi menjadi 0,09% untuk kematian ibu atau 90 perseratus ribu kelahiran hidup tahun 2023 dan 0,41% untuk kematian bayi 4 perseribu kelahiran hidup.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka dijabarkan secara lebih detail pada indikator tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut:

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**  
**TAHUN 2018- 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke-						
				TAHUN 2017 (Realisasi)	TAHUN 2018 (Realisasi)	TAHUN 2019 (Realisasi)	TAHUN 2020 (Realisasi)	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	<b>Umur Harapan Hidup</b>	70,42	70,54	70.71	70.99	70.98	71.11	71.24
			Persentase kematian ibu	0.11%	0.13%	0,14%	0.19%	0.12%	0.11%	0.09%
			Persentase kematian bayi	0.53%	0.49%	0,41%	0.21%	0.46%	0.44%	0.41%

# BAB

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5

### 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan

Berdasarkan visi misi Pemerintah Daerah yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 disebutkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Dalam arah kebijakan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan janji politik Bupati-Wakil Bupati terpilih tahun 2018-2023 yaitu **9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**, sebagai berikut :

1. Pelayanan pendidikan terintegrasi dengan pemerintah provinsi dan pusat melalui program satu desa satu SMP dan satu SMA/SMK berbasis pemahaman Al-Qur'an dan Kitab Kuning, serta penambahan layanan angkutan sekolah gratis untuk daerah prioritas yang disesuaikan dengan rasio jumlah siswa pada setiap desa/kelurahan;
2. Pola pengembangan pelayanan kesehatan gratis dan terintegrasi dengan penyiapan satu desa/kelurahan minimal satu ambulance, satu perawat, satu dokter dan satu bidan berbasis online serta jaminan perawatan kesehatan di sembilan rumah sakit pemerintah dan swasta bagi seluruh warganya;
3. Pengembangan pola infrastruktur pertanian primer, sekunder dan tersier secara terintegrasi berupa pembangunan irigasi, bendungan kecil dan bendungan besar serta pengembangan produk asuransi produk pertanian, peternakan dan perikanan;
4. Pengembangan desa berbasis teknologi dengan mendorong tumbuhnya produk unggulan melalui program satu desa satu produk unggulan, serta pengembangan kelembagaan usaha desa

melalui program investasi desa, baik yang dikelola oleh badan usaha milik desa maupun lembaga usaha lainnya;

5. Optimalisasi pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan berbasis industri dan pariwisata melalui penambahan lebar jalan kabupaten dari 6 meter menjadi 9–12 meter dan dilengkapi dengan penerangan jalan umum (PJU) yang berestetika serta penataan seluruh jalan lingkungan dengan pengelolaan teknologi jalan yang ramah lingkungan, pengembangan bangunan pemerintah, mesjid, mushola, madrasah, majelis taklim dan rumah ibadah, rumah rakyat miskin, penambahan ruang terbuka hijau dan pusat kebugaran publik seperti sport center, lapang sepakbola dan sarana olahraga lainnya di setiap desa/kelurahan, serta penataan dan pengembangan jaringan listrik dan air bersih perkotaan dan perdesaan;
6. Pengembangan pariwisata berbasis pedesaan melalui program pengembangan kampung budaya, pendidikan pariwisata berbasis alam dan penyiapan sawah-sawah abadi dan sumber air abadi oleh pemerintah daerah yang dikelola oleh masyarakat serta jaminan kesejahteraan publik melalui pembagian beras premium bagi warga miskin melalui program ATM beras;
7. Pengembangan pendidikan profesional bagi siswa di sekitar industri melalui program sekolah manager setingkat Diploma dan Srata 1, serta pengembangan beasiswa bagi para calon doktor di bidang studi agama;
8. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa, RT, RW, linmas, guru ngaji, karang taruna, BPD, bamusdes, imam masjid, muadzin, bilal, khotib, melalui program asuransi kesehatan, kecelakaan kerja dan hari tua; dan
9. Pengembangan iklim investasi melalui pembangunan pusat pelayanan perijinan terpadu dengan pembangunan mall layanan perijinan yang berstandar nasional untuk layanan dasar publik seperti penerbitan izin investasi, IMB, KTP, akte kelahiran, surat

nikah dan layanan publik lainnya serta menumbuhkembangkan UMKM melalui program stimulasi permodalan, pengembangan inovasi produk, pemasaran dan revitalisasi pasar tradisional yang ramah lingkungan.

Selanjutnya dalam arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun yang dirumuskan setiap tahunnya yang diselaraskan dengan tema pembangunan. Rumusan arah kebijakan pada Perubahan RPJMD telah disesuaikan kembali dan diselaraskan dengan Tema Pembangunan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Pada tabel dibawah memuat tema pembangunan dan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan pada gambar berikut:

Gambar  
Tema Pembangunan 5 (Lima) Tahunan  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023



Sumber : Bappelitbangda, 2020

Dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 maka arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang merupakan janji politik Bupati-Wakil Bupati terpilih tahun 2018-2023 termaktub dalam **9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA**, dimana kesehatan berada pada langkah kedua yaitu:

2. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi Dengan Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan Berbasis Online serta Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya.

Dari langkah tersebut maka upaya yang harus dilakukan dengan rincian langkah sebagai berikut:

1. Pola Pengembangan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Terintegrasi
2. Penyiapan Satu Desa/Kelurahan Minimal Satu Ambulance, Satu Perawat, Satu Dokter dan Satu Bidan
3. (Aplikasi) Berbasis Online dan
4. Jaminan Perawatan Kesehatan di Sembilan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta Bagi Seluruh Warganya.

Dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 maka strategi utama yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan tahun 2018-2023 yaitu **“Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang akuntabel dan dukungan stakeholder dan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi.”**

Selanjutnya sebagai penjabaran dari arah kebijakan sesuai janji politik Bupati-Wakil Bupati terpilih tahun 2018-2023 termaktub dalam **9 LANGKAH MELANJUTKAN PURWAKARTA ISTIMEWA** maka dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 5.1 ( T-C.26 Permendagri Nomor 80 tahun 2017)  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2018-2023**

VISI	: MEWUJUDKAN PURWAKARTA ISTIMEWA		
MISI I	: MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang akuntabel dan dukungan stakeholder dan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan melalui pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan, gerakan penyelamatan ibu melahirkan, bayi, balita dan anak remaja sehat, meningkatkan sistem pengamatan, pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap penyakit serta upaya penanggulangan penyakit terhadap penyakit menular dan tidak menular sesuai komitmen global, nasional maupun lokal spesifik, kualitas kesehatan lingkungan yang aman,nyaman, sehat dan layak, dukungan kebijakan pembiayaan dan kemandirian masyarakat terhadap jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (jaminan kesehatan semesta) serta penyediaan sumber daya kesehatan yang merata,

			bermutu dan terjangkau oleh masyarakat
			Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
			Meningkatkan kapasitas, kualitas, pemenuhan dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang aman dan berkualitas serta terlindung dari bahaya dan penyalahgunaan obat dan makanan serta bahan berbahaya lainnya.
			Meningkatkan peran serta, kemandirian, perilaku, pola pikir dan gaya hidup yang sehat dan produktif, dan upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dukungan lintas sektor dan stake holder terkait kesehatan

Untuk mencapai strategi dan arah kebijakan tersebut Dinas Kesehatan merumuskan dalam tahapan strategi sebagai berikut:

1) Pembangunan puskesmas rawat inap secara bertahap

Pembangunan puskesmas rawat inap seluruh kecamatan merupakan salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, mengurangi beban pelayanan pada tingkat rujukan (rumah sakit), meningkatkan fungsi dan kualitas puskesmas. Sehingga dapat mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau bagi semua masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah mudah karena membutuhkan biaya sangat besar untuk pembangunan infrastruktur, sarana bangunan, sarana dan alat kesehatan, penambahan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta keefektifan pelayanan itu sendiri. Untuk itu, pembangunan puskesmas rawat inap dilakukan secara bertahap dan mengklasifikasikan puskesmas ke depan menjadi puskesmas dengan unit gawat darurat (Puskesmas UGD), puskesmas rawat inap dengan pelayanan persalinan kegawatdaruratan dasar/pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (Puskesmas PONED) dan puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP).

2) Penguatan fungsi puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Puskesmas merupakan salah satu jaringan pelayanan kesehatan pemerintah dan unit pelaksana teknis dinas kesehatan dalam menjalankan fungsinya tidak terbatas pada pelayanan kesehatan strata pertama (pengobatan/kuratif) tetapi harus menjalankan dua fungsi lainnya yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan dan pusat pemberdayaan masyarakat. Sehingga dapat mendorong perubahan paradigma masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dari *paradigma sakit menjadi paradigma sehat*. Sehingga pelayanan kesehatan dapat bergeser dari *pelayanan kuratif menjadi*



*pelayanan promotif dan preventif* dengan tetap tidak meninggalkan pelayanan kuratif. Penguatan puskesmas juga didorong untuk menuju kemandirian puskesmas melalui penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan puskesmas yang akuntabel, adaptif dan inovatif sehingga memberikan mandat Puskesmas dapat untuk mengembangkan diri secara sehat, fleksibel dan mandiri dengan menggali seluruh potensi dan sumber daya di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan

- 3) Pengembangan upaya pelayanan kesehatan primer dan rujukan  
Pelayanan primer dan rujukan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi kesehatan dan tuntutan perkembangan masyarakat maka perlu upaya pengembangan pelayanan dasar dan rujukan yang *up to date* sesuai dengan kemampuan pembiayaan dan sumber daya yang tersedia. Pengembangan upaya pelayanan kesehatan meliputi pengembangan puskesmas
- 4) Perlindungan kesehatan kepada masyarakat melalui upaya pencegahan dan pengendalian penyakit  
Upaya Pencegahan dan pengendalian penyakit merupakan upaya memberikan perlindungan masyarakat dari kemungkinan terserang atau resiko yang lebih besar dari penyakit melalui upaya pencegahan, pengendalian, pengurangan/ eliminasi dan pemberantasan/eradikasi. Upaya yang dilakukan melalui preventif, promotive, kuratif dan rehabilitative melalui imunisasi, penyelidikan dan surveilan epidemiologi, penanganan KLB dan pengendalian terhadap sumber penularan dan pengobatan kepada masyarakat yang terinfeksi. Upaya tersebut diharapkan dapat memutuskan mata penularan penyakit sehingga masyarakat dapat merasa aman, nyaman dan bebas dari penyakit yang menular maupun tidak menular. Namun demikian, peran serta masyarakat dan masih adanya sumber, agent dan media penularan dapat memungkinkan

terjadinya penularan kembali di masyarakat. Di sisi lain, perubahan gaya hidup dan perilaku masyarakat serta perubahan lingkungan mendorong timbulnya penyakit baru termasuk penyakit tidak menular dan degeneratif. Untuk itu, upaya perlindungan kesehatan harus diikuti kesadaran masyarakat untuk melindungi dirinya dari penyakit melalui perilaku hidup bersih dan sehat, pola hidup sehat dan mengikuti petunjuk tenaga kesehatan serta berolahraga secara teratur. Dengan upaya tersebut akan mengurangi dan terhindar dari terkena resiko penyakit.

5) Peningkatan kualitas daya dukung lingkungan

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peningkatan kualitas daya dukung lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Dengan demikian pembangunan yang berwawasan kesehatan sesungguhnya merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Hal ini disebabkan apabila terjadi masalah lingkungan maka akan berdampak pada masalah kesehatan seperti kerusakan ekosistem dan habitat vektor penyakit, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, banjir, longsor dan kerusakan hutan akan menyebabkan penyakit yang berdampak pada kesehatan manusia. Untuk itu upaya menciptakan kawasan lingkungan sehat, keseimbangan beban lingkungan dengan penduduk, penataan kawasan lingkungan sesuai tata ruang dan pencegahan dampak lingkungan akan mendukung peningkatan kualitas daya dukung lingkungan.

6) Peningkatan kapasitas tenaga dan sarana pelayanan kesehatan

Upaya pelayanan kesehatan yang merata bermutu dan terjangkau harus didukung dengan kemampuan tenaga dan sarana pelayanan kesehatan yang ada di lingkup dinas kesehatan dan jaringannya. Kemampuan tenaga bukan hanya tenaga kesehatan tetapi juga tenaga non kesehatan yang bekerja di dinas kesehatan dan jaringannya untuk meningkatkan dedikasi, keahlian dan kemampuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik

kepada masyarakat. Kualitas tenaga harus didukung kemampuan dan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan layak baik bangunan, alat, obat dan sarana penunjang lainnya sehingga dapat mendukung pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat.

- 7) Pemberdayaan masyarakat dan dukungan stake holder dan lintas sektor, melalui peningkatan peran serta masyarakat menuju kemandirian dalam bidang kesehatan, penguatan perilaku hidup bersih dan sehat serta dukungan desa siaga sehat.

Peningkatan derajat kesehatan merupakan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, dukungan stake holder dan lintas sektor.

Masyarakat bukan hanya objek tetapi sekaligus subjek pembangunan kesehatan akan menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk itu peran serta masyarakat menjadi suatu keharusan dalam untuk terwujudnya kemandirian masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan.

Peran dan dukungan lintas stake holder dan lintas sektor sangat penting, karena masalah kesehatan bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi tanggung jawab semua pihak, dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, seringkali masalah kesehatan bukan masalah hulu tetapi muara atau hilirnya dari permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti sosial, ekonomi, kemiskinan, ketimpangan dan kesenjangan masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah kesehatan tersebut perlu diselesaikan masalah di hulunya, sehingga tidak menyebabkan masalah kesehatan di hilirnya.

Perubahan perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) merupakan pekerjaan yang “tidak sekali jadi” tetapi membutuhkan ketekunan, konsistensi, inovasi dan teladan yang nyata di lapangan. Hal ini disebabkan perubahan perilaku membutuhkan waktu yang relatif panjang bisa

lima, sepuluh tahun atau lebih dan tidak boleh pantang menyerah. Tetapi perubahan perilaku dapat berubah secara cepat apabila perilaku tersebut telah menjadi trend atau gaya hidup. Hal ini akan terasa terutama pada kelompok generasi muda dan perkotaan atau modern. Sedangkan pada kelompok masyarakat pedesaan tradisional dapat terjadi perubahan apabila telah merasakan manfaat atau melihat kelompok atau tokohnya telah menggunakan/melakukannya. Untuk itu dalam mendorong masyarakat ber-PHBS maka pemberdayaan masyarakat tersebut harus dapat mendorong PHBS sebagai trend dan pendekatan asas manfaat dan tokoh atau faktor kunci (key person atau stakeholder) di masyarakat harus terus dilakukan dengan berbagai upaya inovasi, konsistensi dan keberlanjutan program harus digalakan.

Desa siaga sehat merupakan sinergitas dari berbagai program kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan hingga ke tingkat desa/kelurahan dan penjabaran dari kabupaten sehat. Program yang berkaitan dengan konsep pelayanan hingga tingkat desa antara lain desa sehat yang dikembangkan oleh penyehatan lingkungan, desa Perilaku Hidup bersih dan sehat yang dikembangkan oleh promosi kesehatan dan desa siaga yang merupakan gabungan dari pelayanan kesehatan ibu dan anak, surveilans epidemiologi dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat sasaran dan objek kegiatan dalam peningkatan kesehatan masyarakat di tingkat desa serta kepentingan yang relatif sama maka perlu mensinergikan program tersebut dalam suatu wadah yang sama. Maka dengan penyatuan kegiatan dalam pengembangan desa siaga sehat dapat lebih mensinergikan kegiatan tersebut dapat efektif dan efisien. Untuk itu peran advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dengan berbagai pihak menjadi sangat penting dan kunci keberhasilan pembangunan kesehatan.

8) Pengembangan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat

Kesehatan merupakan hak dasar dan investasi bagi setiap warga negara. Namun meningkatnya biaya pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi seseorang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan serta tidak dapat diprediksi kebutuhan biaya pelayanan ketika sakit menyebabkan masyarakat harus selalu menyediakan biaya kesehatan setiap saat. Namun dalam kenyataannya masyarakat tidak selalu menyediakan uang yang cukup ketika sakit dengan biaya yang besar. Sementara pada saat tersebut biaya pelayanan kesehatan menjadi *konsumtif* dan tidak menjamin bahwa dia akan betul-betul sembuh dan tidak akan sakit lagi sehingga pernyataan kesehatan sebagai investasi menjadi suatu *anomali*.

Pada masyarakat miskin, pemerintah telah menjamin dengan adanya jaminan kesehatan sehingga beban pelayanan kesehatan akan berpindah masyarakat yang sedikit diatas miskin. Dan masyarakat ini rentan menjadi miskin apabila tidak terlindungi asuransi atau jaminan kesehatan. Pada sisi lain dengan adanya jaminan kesehatan dapat mendorong produktifitas masyarakat karena tidak perlu biaya pengobatan apabila sakit karena telah dijamin oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat mendorong pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat, terciptanya standar pelayanan kesehatan yang tidak membedakan status sosial, dan tidak adanya kasus penolakan oleh rumah sakit atau ketidakmampuan masyarakat membayar pelayanan kesehatan.

Dalam pelaksanaannya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat tidak dapat dilakukan sekaligus tetapi bertahap sesuai kemampuan pembiayaan dari anggaran daerah maupun pusat serta kesiapan masyarakat seperti perilaku masyarakat dalam berobat dan pembayaran premi atau iur biaya bila akan dikenakan pembebanan kepada masyarakat serta struktur organisasi maupun mekanisme pengelolaan jaminan kesehatan tersebut.

- 9) Penyusunan perencanaan, kajian dan regulasi pembangunan kesehatan berdasarkan masalah dan potensi daerah, isu strategis dan kebijakan pembangunan baik global, nasional, regional maupun lokal kabupaten.

Perkembangan kesehatan yang semakin kompleks, dinamis dan maju menyebabkan organisasi Dinas Kesehatan harus mampu mengantisipasi setiap perubahan tersebut. Untuk itu perlunya adanya perencanaan yang terukur dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Selain itu, perlu selalu mengadaptasi terhadap setiap perubahan melalui kajian yang komprehensif dan rasional sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pembangunan kesehatan maupun isu strategis baik dalam skala global (dunia), nasional, regional (propinsi atau kewilayahan) maupun kabupaten. Dalam penerapan pelayanan kesehatan yang semakin pesat berkembang perlu didukung regulasi kesehatan yang akuntabel untuk menjadi payung hukum dan perlindungan dalam setiap pelaksanaan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis.

# **BAB**

## **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**



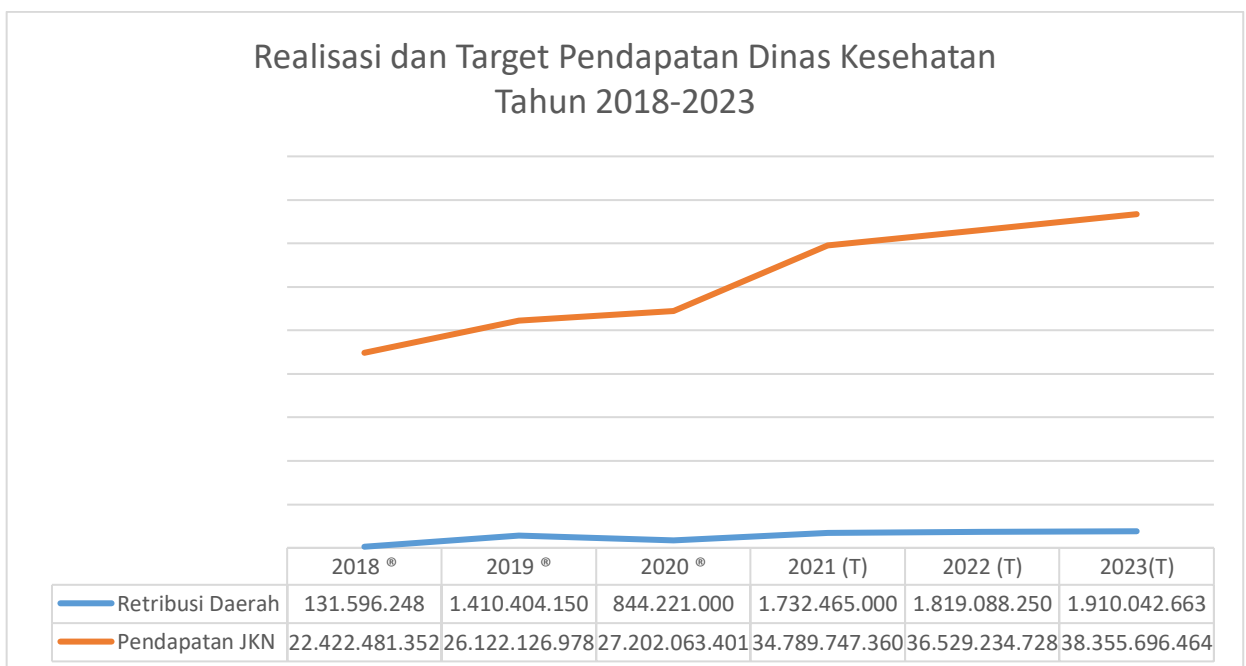
Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2021-2023. Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam bagian ini diuraikan hubungan Dinas Kesehatan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah. Hal ini terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Dalam mendukung rencana program dan kegiatan perlu didukung pula dengan pendanaan yang memadai. Sumber pendanaan Dinas Kesehatan melalui APBD Kabupaten meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil seperti DBH CHT, DBHPR, Bantuan Provinsi Jawa Barat, Pendapatan Asli Daerah, Hibah dan Pendapatan lain yang sah.

Selain itu Dinas Kesehatan sebagai organisasi pelayanan publik, yang melaksanakan jasa pelayanan publik, dimana adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan realisasi dan target pendapatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Hal ini tercermin dari realisasi pendapatan tahun 2018-2020 dan target tahun 2021-2023.

**Grafik 6.1**  
**Realisasi dan Target Pendapatan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta**  
**Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023**



Reribusi Daerah meliputi retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan pelayanan pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan sedangkan pendapatan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan pendapatan yang berdasarkan dari BPJS Kesehatan sesuai peraturan yang berlaku terkait kapitasi dan non kapitasi pelayanan kesehatan di puskesmas.



Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan mengacu kepada program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, selanjutnya berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.

Program-program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, yang dapat berubah secara dinamis sesuai perkembangan dan pelaksanaannya dapat dilaksanakan oleh lebih dari satu unit struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta. Oleh sebab itu dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) maupun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari unit-unit Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta perlu menerapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi Dinas Kesehatan pada Renstra tersebut.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018–2023 memuat tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kesehatan sesuai dengan yang ingin dicapai pada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Adapun rencana program, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kesehatan sebagaimana pada tabel 6.1. dan 6.2 dibawah ini.

**Tabel 6.2 (Tabel C.27 Permendagri No 86 tahun 2017)  
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas			Umur Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,55	70,71	70,85	70,98		
				Persentase kematian ibu	%	0,11	0,17	0,15	0,13	0,12		
				Persentase kematian bayi	%	0,532	0,29	0,50	0,49	0,46		
		<b>1.02 . 1.02.01</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>									
		<b>1.02 . 1.02.01 . 07</b>	<b>I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	%	70,9	70,9	100	100			
				Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	%	97,34	97,34	100	100			
				Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	93,04	93,04	100	100			
				Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	97,34	97,34	100	100			
				Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	%	100	100	100	100			
				Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	%	100	100	100	100			
		57 kegiatan										
		<b>1.02 . 1.02.01 . 15</b>	<b>II Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</b>	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	85	88,33	90	90			
		7 kegiatan										
		<b>1.02 . 1.02.01 . 16</b>	<b>III Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	Prosentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja	%	58	58	67	67			
		50 kegiatan										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01 . 17	IV Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	78	81	86	90			
			3 kegiatan									
		1.02 . 1.02.01 . 19	V Program Promosi Kesehatan / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	60,94	61,63	62,02	62,71			
				Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	%	64,87	65,25	65,68	65,84			
			8 kegiatan									
		1.02 . 1.02.01 . 20	VI Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan pelayanan anak balita	%	68,72	70,13	71,54	74,35			
				Cakupan pelayanan bayi	%	98,35	98,43	98,80	98,80			
			6 kegiatan									
		1.02 . 1.02.01 . 21	VII Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	%	75,73	75,79	75,83	75,94			
				Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	%	54,43	55,61	57,09	58,28			
			5 kegiatan									
		1.02 . 1.02.01 . 22	VIII Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prosentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	%	84,18	84,64	84,77	85,02			
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)	%	81,99	82,48	83,12	83,92			
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)	%	81,99	82,48	83,12	83,92			
			31 kegiatan									

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01 . 24	IX Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100			
				Prosentase kepesertaan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	%	100	100	100	100			
			29 kegiatan									
		1.02 . 1.02.01 . 25	X Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Prosentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	%	38	46	46	54			
				41 kegiatan								
		1.02 . 1.02.01 . 28	XI Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Prosentase fasilitas kesehatan yang dibina	%	20	24	31	43			
				9 kegiatan								
		1.02 . 1.02.01 . 32	XII Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	98,68	99,06	99,06	99,09			
				Cakupan Ibu Haamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	94,95	70,13	70,14	72,69			
				Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	98,68	98,66	98,88	99,04			
			8 kegiatan									
		1.02 . 1.02.01 . 35	XIII Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan	Prosentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	%	75	80%	90%	90%			
				20 kegiatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01 . 38	XIV Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan	Meningkatnya jumlah kunjungan pemeriksaan Labkesda (5% per tahun)	%	70%	75%	80%	85%			
				Meningkatnya jumlah parameter pemeriksaan Labkesda	%	77%	81%	84%	88%			
			7 kegiatan									
		1.02 . 1.02.01 . 39	XV Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Prosentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang masih berlaku	78,90%	80,17%	83,54%	89,03%	100,00%			
			4 kegiatan									
			285 kegiatan	jumlah kegiatan pada aplikasi lama (SIMDA)								
		1.02 . 1	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	-	-			B	B	B
				Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	0,00	0,00			75,00	80,00	85,00
		1.02 . 1.02.01.01 . 01	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Dinas Kesehatann evaluasi kinerja dinas	%					75	75	80
			3 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 02	1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi keuangan Dinas Kesehatan	%					75	75	80
			5 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 03	1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 05	1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas administrasi pegawai pada dinas kesehatan	%					75	75	80
			2 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01.01 . 06	<b>1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi umum pada Dinas Kesehatan	%					75	75	80
			6 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 07	<b>1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah pada Dinas Kesehatan	%					75	75	80
			3 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 08	<b>1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%					75	75	80
			2 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 09	<b>1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%					75	75	80
			2 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
			<b>24 sub kegiatan</b>	total sub kegiatan Program								
		<b>1.02 .2</b>	<b>II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	0,00	0,00			75,00	75	80
				Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	0,00	0,00			90,00	95	95
		1.02 . 1.02.01.01 . 15	<b>2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			10 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01.01 . 16	<b>2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			31 sub kegiatan dan 23 unit	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 17	<b>2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			3 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 18	<b>2.4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			2 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
			<b>46 sub kegiatan</b>	<b>total sub kegiatan Program</b>								
		<b>1.02 .3</b>	<b>III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	0,00	0,00			90,00	95	100
		1.02 . 1.02.01.01 . 19	<b>3.1 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			2 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01.01 . 20	<b>3.2 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			3 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 21	<b>3.3 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
			<b>6 sub kegiatan</b>	<b>total sub kegiatan Program</b>								
		1.02 .4	<b>IV PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	0,00	0,00			92,21	94,81	100
		1.02 . 1.02.01.01 . 22	<b>4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			2 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01.01 . 24	<b>4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 25	<b>4.3 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 26	<b>4.4 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01.01 . 27	<b>4.5 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
			<b>6 sub kegiatan</b>	<b>total sub kegiatan Program</b>								
		<b>1.02 .4</b>	<b>V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	%	0,00				63,30	63,89	65,16
		1.02 . 1.02.01.01 . 28	<b>5.1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
		1.02 . 1.02.01.01 . 29	<b>5.2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					75	75	80
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan				
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1.02 . 1.02.01.01 . 30	<b>5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%					<b>75</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
			1 sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan								
			<b>3 sub kegiatan</b>	<b>total sub kegiatan Program</b>								
			<b>85 sub kegiatan</b>	<b>total sub kegiatan Dinas Kesehatan</b>								

**Tabel 6.3 (Tabel C.27 Permendagri No 86 tahun 2017)  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat**

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-							
		-1 2017	0 2018	1 2019	2 2020	3 2021	3.1 2021 Parsial 1	4 2022	5 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(5)	(6)
<b>1.02 . 1.02.01</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>103.145.674.946</b>	<b>116.758.948.038</b>	<b>137.516.871.095</b>	<b>168.517.545.050</b>	<b>144.034.772.969</b>	<b>234.991.255.133</b>	<b>151.567.791.595</b>	<b>159.494.787.096</b>
1.02 . 1.02.01.01 . 07	<b>Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran</b>				<b>14.522.292.900</b>				
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.181.110.000	11.135.160.000	12.182.940.000					
1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	726.060.000	918.229.406	1.304.000.000					
1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	41.055.000	270.000.000	130.000.000					
1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	85.000.000	90.000.000	97.500.000					
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.699.382.000	5.177.872.000	4.720.897.000	3.616.092.000				
1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	11.138.567.000	13.795.449.000	17.116.000.000	15.427.727.000				
1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	75.000.000	150.000.000	175.000.000	281.391.000				
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	100.000.000	175.000.000	1.325.485.000	1.510.999.000				
1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	250.000.000	510.000.000	380.000.000	125.000.000				

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-							
		-1	0	1	2	3	3.1	4	5
		2017	2018	2019	2020	2021	2021 Parsial 1	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	
1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	63.561.090.946	59.986.680.632	77.488.933.432	93.153.308.050				
1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	7.643.000.000	13.089.740.000	10.037.291.663	13.279.242.000				
1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	3.072.495.000	250.000.000	350.000.000	520.000.000				
1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	650.000.000	5.480.662.000	3.491.000.000	1.145.312.000				
1.02 . 1.02.01 . 33	Program Promosi Kesehatan/ Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*)	507.915.000	450.000.000	1.850.000.000	225.000.000				
1.02 . 1.02.01 . 34	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	925.000.000	2.726.155.000	3.182.224.000	8.665.595.000				
1.02 . 1.02.01 . 35	Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan	490.000.000	2.554.000.000	3.685.600.000	1.597.385.000				
1.02 . 1.02.01.01 . 38	Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan*)				1.157.817.000				
1.02 . 1.02.01.01 . 39	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan*)				13.290.384.100				

Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-							
		-1	0	1	2	3	3.1	4	5
		2017	2018	2019	2020	2021	2021 Parsial 1	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.390.979.390	68.625.881.006	<b>15.143.627.612</b>	<b>15.935.639.336</b>
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					117.336.578.498	138.838.842.076	123.473.281.553	129.930.934.179
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					11.484.588.257	26.789.593.130	12.085.232.223	12.717.289.868
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					597.635.651	560.577.147	628.891.996	661.783.047
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					224.991.173	176.361.774	236.758.211	249.140.666

Capaian kinerja pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta pada tabel diatas hanya dapat dicapai dengan kontribusi para pelaku pembangunan kesehatan. Para pelaku pembangunan kesehatan baik dari, oleh dan untuk Kabupaten Purwakarta maupun kontribusi dari luar Kabupaten Purwakarta yang mempunyai kepentingan untuk memajukan kesehatan di Kabupaten Purwakarta. Untuk itu Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 perlu mendapatkan dukungan baik lintas program maupun lintas sektoral, baik secara internal maupun eksternal Dinas Kesehatan melalui upaya kolaborasi, sinkronisasi, sinergitas dan integritas dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 - 2023.

# **BAB**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG**

### **URUSAN**

7

Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta untuk periode 2018-2023 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan kesehatan.

Indikator-indikator kinerja SKPD Dinas Kesehatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja SKPD Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD ditampilkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :



**Tabel 7.1(Tabel C.28 Permendagri No 86 tahun 2017)  
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG MENGACU PADA  
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2023**

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL DAN CAPAIAN TAHUN 0 S/D TAHUN KE-2 PERIODE RPJMD(PERUBAHAN RPJMD NO 3 TAHUN 2021)				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PEIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A.	Tujuan										
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<b>Umur Harapan Hidup</b>	Ind ex	70,43	70,55	70.71	70.85	70.98	71.11	71.24	71.24
B.	Sasaran										
	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase kematian ibu	%	0.11	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09
		Persentase kematian bayi	%	0.53	0.29	0.50	0.49	0.46	0.44	0.41	0.41
C.	Program (PerMendagri Nomor 90/2019)/ KepMendagri Nomor 050-3708/2020										
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	65	68	70	70	75	80	85	85
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%	65	68	70	73	75	75	80	80
		Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	85	88	90	90	90	95	95	95
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar (minimal 9 jenis tenaga kesehatan)	%	81	83	85	88	90	95	100	100
2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	78	81	86	88	92,21	94,81	100	100
2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	60,94	61,63	62,02	62,71	63,30	63,89	65,16	65,16

Selanjutnya dalam mendukung capaian kinerja kinerja SKPD Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD, maka disusunlah indikator kinerja turunan yang akan dicapai oleh perangkat organisasi Dinas Kesehatan, meliputi bidang/sekretariat, seksi/ sub bagian dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan. Indikator kinerja bidang/secretariat, seksi/sub bagian dan UPTD di lingkungan Dinas Kesehatan ditampilkan dalam tabel 7.2 sebagai berikut :

**Tabel 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA BIDANG/SEKRETARIAT, SEKSI/SUB BAGIAN**  
**DAN UPTD DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN**  
**TAHUN 2018-2023**

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi dan Target Kinerja Renstra						
				Realisasi			Target			
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	
KINERJA BIDANG/SEKRT,UPTD										
A. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT										
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi										
1	Kesehatan Ibu	1	Cakupan pelayanan ibu hamil	%	97,74	100,49	99,41	100	100	100
		2	Cakupan Linfaskes	%	89,38	92,78	92,87	100	100	100
		3	Cakupan Linakes	%	98,66	101	101,2	100	100	100
		4	Cakupan Penanganan komplikasi kebidanan	%	68,88	156,57	136,48	100	100	100
		5	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	99,31	102,3	101,4	100	100	100
		6	Cakupan peserta KB aktif	%	71,48	80,3	85,8	85	90	95
		7	Cakupan peserta KB pasca persalinan	%		77,6	92,7	95	98	100

		8	Cakupan Puskesmas melaksanakan kegiatan Deteksi Dini IVA (Inspeksi Visual dengan Asam asetat) & SADANIS(Pemeriksaan payudara secara klinis)	%	100	100	100	100	100	100
2	Kesehatan Bayi	9	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	84,91	99,94	90,57	100	100	100
		10	Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3)	%	97,28	98,5	107,1	100	100	100
		11	Cakupan Penanganan komplikasi Neonatal	%	72,73	82,1	76,5	100	100	100
		12	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi	%	57,23	56,6	62,2	63	64	65
3	Pelayanan Gizi Masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	48	71	62,5	65	70	75	80
		13	Cakupan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dibawah 5%	%	1,94	2,4	2,3	<5	<5	<5
		14	Cakupan Balita ditimbang (D/S)	%	88,67	88,1	58,1	85	90	95
		15	Cakupan Balita gizi kurang (BB/umur)	%	0,97	3,5	3,7	<5	<5	<5
		16	Cakupan Balita pendek dan sangat pendek/ stunting (TB/umur)	%		3,3	3,3	<5	<5	<5
		17	Cakupan Balita kurus dan sangat kurus/wasting (BB/TB)	%		0,9	0,9	<5	<5	<5
		18	Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi	%	98,27	99,08	99,45	100	100	100
		19	Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita	%	96,79	98,37	97,99	100	100	100

4	Kesehatan Anak dan Remaja	20	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (anak kelas 1 s/d 9 di sekolah dan usia 7-15 tahun diluar sekolah)	%			42,5	100	100	100
		21	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI	%	100	99,83	98,9	100	100	100
		22	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs	%		100,0	98,0	100	100	100
		23	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA	%		99,0	97,8	100	100	100
		24	Cakupan puskesmas PKPR	%	25	25	40	40	45	50
		25	Penerapan model sekolah sehat	%	4,9	4,9	4,9	20	20	20
5	Kesehatan Lansia	26	Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia	%	42	45,8	48,19	50	60	70
		27	Cakupan puskesmas santun lansia	%	25	25	40	40	45	50
2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga										
1	Kesehatan Lingkungan	28	Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	%	77,68	78,1	94,1	95	95	95
		29	Cakupan sarana air minum yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)	%	26,25	51,50	44,65	50	55	60
		30	Cakupan Desa yang melaksanakan STBM	%	76,56	83,9	88,5	90	93	95
		31	Cakupan Desa yang mencapai Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ Open Defecation Free(ODF)	%	18,23	25,5	30,7	35	40	45

		32	Cakupan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana Tempat fasilitas Umum (TFU)	%	74,86	77,9	58,8	60	65	70
		33	Cakupan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)	%	39,79	38,6	44,2	45	48	50
2	Kesehatan Kerja	34	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100	100	100	100	100	100
3	Kesehatan Olahraga	35	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	%	100	100	100	100	100	100
3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
1	Promosi dan Pengembangan Media Kesehatan	36	Cakupan puskesmas memiliki paket media kampanye kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
2	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	66,07	62,8	65,99	65,9	66,0	66,1
3	Pemberdayaan Masyarakat	38	<b>Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri</b>	%	<b>61,63</b>	<b>62,02</b>	<b>62,71</b>	<b>63,3</b>	<b>63,89</b>	<b>65,16</b>
		39	Rasio posyandu per desa	%	5,4	5,4	5,4	≥5	≥5	≥5
		40	Rasio posyandu per 100 balita	%	1,16	1,2	1,2	1	1	1
		41	Persentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri	%	4,2	13,5	29,7	30	33	35
B. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT										
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi										
1	Surveilans Epidemiologi	42	Kelengkapan laporan dan ketepatan sistem kewaspadaan	%	100	100	100	100	100	100

			dini							
		43	Persentase KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100
2	Imunisasi	44	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	92,40	95,7	90,0	85	90	95
		45	Cakupan desa UCI	%	98,96	99,5	80,2	85	90	95
		46	Cakupan Imunisasi campak/MR BIAS	%	89,99	93,22	88,12	75	85	90
		47	Cakupan Imunisasi DT-TD BIAS	%	88,2	93,69	75,95	75	80	85
		48	Cakupan Imunisasi Td2+ pada ibu hamil	%	80,79	82,3	76,0	80	83	85
		49	Cakupan Imunisasi Covid-19	%				70	70	70
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular										
1	P2 Tuberculosis	50	Cakupan pelayanan dengan orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	93,57	89	65,9	100	100	100
		51	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate/SR) Semua Kasus Tuberkulosis	%	76,18	90,6	90,9	92	93	95
		52	Angka Kesembuhan (Cure Rate) Tuberkulosis Paru terkonfirmasi Bakteriologis	%	71,32	63,8	64,9	70	75	80
2	Pengendalian Penyakit Filariasis	53	Persentase penderita filariasis yang ditemukan dan ditangani	%	100	100	100	100	100	100
3	Pengendalian Penyakit Pneum	54	Persentase penderita pneumoni yang ditemukan dan ditangani	%	96,84	100,0	107,1	100	100	100

	oni									
4	Pengendalian Penyakit Diare	55	Persentase penderita Diare ditemukan dan ditangani pada balita	%		102,0	70,0	100	100	100
5	Pengendalian Penyakit DBD	56	Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani	%	100	100	100	100	100	100
6	Pengendalian Penyakit Kusta	57	Cakupan Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB)	%	93,3	100	83,33	90	95	100
		58	Cakupan Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB)	%	100	100	100	100	100	100
7	P2 HIV/AIDS	59	Cakupan pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar	%	83,30	49	63,5	65	70	75
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular										
1	Kesehatan Indera	60	Cakupan deteksi dini gangguan indera	%		14,37	38,37	100%	100%	100%
2	Kesehatan Jiwa	61	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (Berat) sesuai standar	%	16,47	28,95	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	62	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar	%	22,89	26,34	26,27	100	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	63	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	%	1,86	14,61	22,03	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	64	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar	%	59,66	89,68	100	100	100	100

	s Melitus									
	Pelayanan Posbindu	65	Cakupan Posbindu (PTM)	buah	237	239	192	192	192	192
C. Bidang Pelayanan Kesehatan										
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional										
1	Pelayanan Rawat Jalan dan rawat inap	66	Cakupan kunjungan rawat jalan (kunjungan baru) di Puskesmas	%	34,73	36,57	23,7	38	40	42
		67	Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas	%		4.3	4.5	5.0	5.5	5.5
2	Pelayanan Kesehatan Tradisional	68	Cakupan pembinaan penyehat tradisional terdaftar	%		65.0	65.2	65.3	65.4	65.5
3	Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	69	Cakupan Kunjungan Perkesmas	%		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
4	PIS PK	70	Indek Keluarga Sehat	%		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0
5	Pembinaan Yankes	71	Puskesmas yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan										
1	Pelayanan Kesehatan Rujukan	72	Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk	%	1,21	1,29	1,37	1,5	1,65	1,8
		73	Persentase Rumah sakit yang dibina	%	100	100	100	100	100	100
2	Jamina dan pembiayaan kesehatan	74	Cakupan masyarakat miskin yang memiliki kartu JKN	%	100	100	100	100	100	100
		75	Cakupan kepesertaan JKN menuju UHC min 95%	%	81,24	77,6	88,8	90	92	95



		76	Cakupan Rumah sakit bekerja sama dalam jaminan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100
3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan										
1	Mutu Pelayanan Kesehatan FKTP	77	Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100
		78	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	%	75	65	65	60	70	60
		79	Persentase puskesmas yang terakreditasi utama	%	5	25	25	25	25	30
		80	Persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna	%	0	0	0	0	5	10
		81	Persentase klinik yang terakreditasi	%	0	2	2	10	15	25
		82	Persentase klinik yang terakreditasi minimal madya	%	0	0	0	0	0	0
		83	Persentase klinik yang terakreditasi utama	%	0	1	1	6	8	15
		84	% Puskesmas hasil PKP yang mencapai strata baik	%	0	1	1	4	7	10
2	Mutu Pelayanan Kesehatan FKTR	85	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	%	70	100	100	100	100	100
		86	Persentase rumah sakit yang terakreditasi paripurna	%	20	30	30	30	40	50
D. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN										
1) Seksi Kefarmasian										
1	Pengawasan kefarmasian	87	Cakupan Monitoring obat di puskesmas	%	100	100	100	100	100	100
		88	Cakupan sarana Apotek yang dibina	%	100	87,5	77	100	100	100
		89	Cakupan sarana Toko Obat yang dibina	%	100	100	59	100	100	100

		<b>90</b>	<b>Cakupan sarana farmasi yang dibina</b>	%	<b>81</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>92,21</b>	<b>94,81</b>	<b>100</b>
3	Pengawasan Makanan	91	Cakupan sarana distribusi makanan dan minuman yang dibina	%		70	29	80	85	90
		92	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang memiliki SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan)	%	47	149	124	120	130	140
		93	Jumlah Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang telah memiliki Sertifikat	%	2	2	2	23	25	27
		94	Jumlah Tenaga Pengawas Makanan (District Food Inspector/DFI) yang telah memiliki Sertifikat	%	2	2	3	13	15	17
2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan										
1	Pengembangan SDM kesehatan	95	<b>Pemenuhan tenaga kesehatan (minimal 9 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar</b>	%	<b>83</b>	<b>85</b>	<b>88</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>100</b>
		96	Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	63,25	64,73	67,32	70	75	80
3) Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan										
1	Pengembangan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	97	Cakupan gedung UPTD Puskesmas dan UPTD lainnya sesuai standar	%		84.6	88.5	92.3	100.0	100.0
		98	Kelengkapan ASPAK Puskesmas yang tervalidasi Dinas Kesehatan	%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
E. SEKRETARIAT										
1) Sub Bagian Program dan Informasi										

1	Penyusunan Perencanaan Program	99	Tersusunnya Renja Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		100	Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		101	Tersusunnya Rekapitulasi Usulan Dinas Kesehatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		102	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		103	Cakupan Puskesmas dan UPTD lainnya yang menyusun Renstra/Perencanaan Lima tahunan dan Renja/Perencanaan Tahunan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	Pengelolaan Data dan Informasi	104	Tersusunnya Profil Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		105	Tersusunnya laporan SPM Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	Evaluasi dan Pelaporan	106	Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		107	<b>Capaian SAKIP Perangkat Daerah/ Nilai opini SAKIP</b>	%	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>
		108	Tersusunnya LKPJ Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		109	Tersusunnya LPPD Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2). Sub Bagian Keuangan, Akunting dan Aset										
	Penatausahaan keuangan	110	Ketepatan waktu pembayaran gaji ASN	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		111	Cakupan Laporan Realisasi	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

			Anggaran (LRA)							
		112	Cakupan dokumen Neraca Keuangan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		113	Cakupan laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum										
1	Pengelolaan kepegawaian	114	Cakupan pelayanan kenaikan Pangkat pegawai	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		115	Cakupan pelayanan kenaikan gaji berkala	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		116	Cakupan kehadiran pegawai sesuai jam kerja	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2)	Pengelolaan Umum dan Hukum	117	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran</b>	%	<b>68</b>	<b>70,00</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>80,00</b>	<b>85,00</b>
		118	Kelengkapan SIMBADA Puskesmas dan Dinas Kesehatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		119	Cakupan pegawai yang mendapat pembinaan hukum kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
F	UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)									
1)	Puskesmas	120	Cakupan 6 pelayanan dasar (basic six)	%	100	100	100	100	100	100
		121	Cakupan upaya pelayanan pengembangan sesuai kemampuan sumber daya dan potensi wilayah	%	100	100	100	100	100	100

		122	<b>Rerata capaian SPM bidang kesehatan</b>	%	<b>68</b>	<b>70</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>80</b>
		123	Cakupan Puskesmas dengan tidak ada kematian neonatal	%	50	30	25	30	40	50
		124	Cakupan Puskesmas dengan tidak ada kematian bayi	%	45	30	20	30	40	50
		125	Cakupan Puskesmas dengan tidak ada kematian balita	%	90	70	85			
		126	% Puskesmas dengan tidak ada kematian ibu	%	20	45	15	20	30	50
		127	Cakupan Puskesmas dengan tindak lanjut kematian ibu dan bayi dengan AMP/RMP	%	100	100	100	100	100	100
2)	Perbekalan Kesehatan	128	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	90	90	97,67	95	95	95
		129	Cakupan distribusi Obat dan Vaksin Esensial ke puskesmas	%	100	100	100	100	100	100
3)	Laboratorium Kesehatan	130	Angka kesalahan laporan hasil pemeriksaan laboratorium 0%	Kasus	0	0	0	0	0	0
		131	Peningkatan pencapaian jumlah pemeriksaan, 20% per tahun	Jumlah pemeriksaan	12.383	14.860	17.832	21.398	25.678	30.813
		132	Prosentase jumlah alat lab terkalibrasi ≥ 75%	%	75	80	85	90	90	95
		133	Prosentase tersediaan reagen lab	%	80	85	90	95	95	98
		134	Parameter pemeriksaan laboratorium yang	%	10	12	14	16	16	18

		terakreditasi							
	135	Prosentase Jenis Parameter/pemeriksaan yang mengikuti PME/ Uji Banding/Uji silang	%	70	75	80	85	85	90
	136	Tingkat kepuasan Pelanggan	%	80	80	81	83	83	85

# **BAB**

## **PENUTUP**

# 8

Perubahan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta merupakan penyesuaian terhadap Renstra Dinas Kesehatan tahun 2018- 2023 sesuai dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 serta perubahan landasan hukum dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Secara umum dokumen Rencana Strategis adalah sebuah garis kebijaksanaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang disusun sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan kreatifitas, inovasi dan kemampuan pemasaran produk/jasa pelayanan kesehatan Kabupaten Purwakarta. Secara teknis Renstra dijabarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta lebih lanjut dalam bentuk program-program kerja, yang selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Dinas Kesehatan agar tercipta sinergi dalam pelaksanaannya.

Dokumen Renstra diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi seluruh komponen yang terlibat, dan memperjelas rangkaian

pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya bidang kesehatan sehingga diharapkan akan dapat mereduksi setiap deviasi pelaksanaan dan hambatan yang mungkin timbul, sehingga pada akhirnya pembangunan Kabupaten Purwakarta khususnya pada tahun 2018-2023 benar-benar akan terwujud sesuai visi yang telah ditentukan yaitu **“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”**. Untuk itu diharapkan Renstra ini menjadi pedoman teknis dan evaluasi strategi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta yang dilaksanakan dalam periode tahun 2018- 2023.

Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra ini berisikan tentang kebijakan, program dan indikasi kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sangat tergantung pada faktor-faktor kunci keberhasilan dan dukungan partisipasi masyarakat dan lembaga pemerintah, baik dalam perencanaan, penggerakan pelaksanaan serta pengawasan pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana strategi pembangunan kesehatan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Kesehatan tersebut.

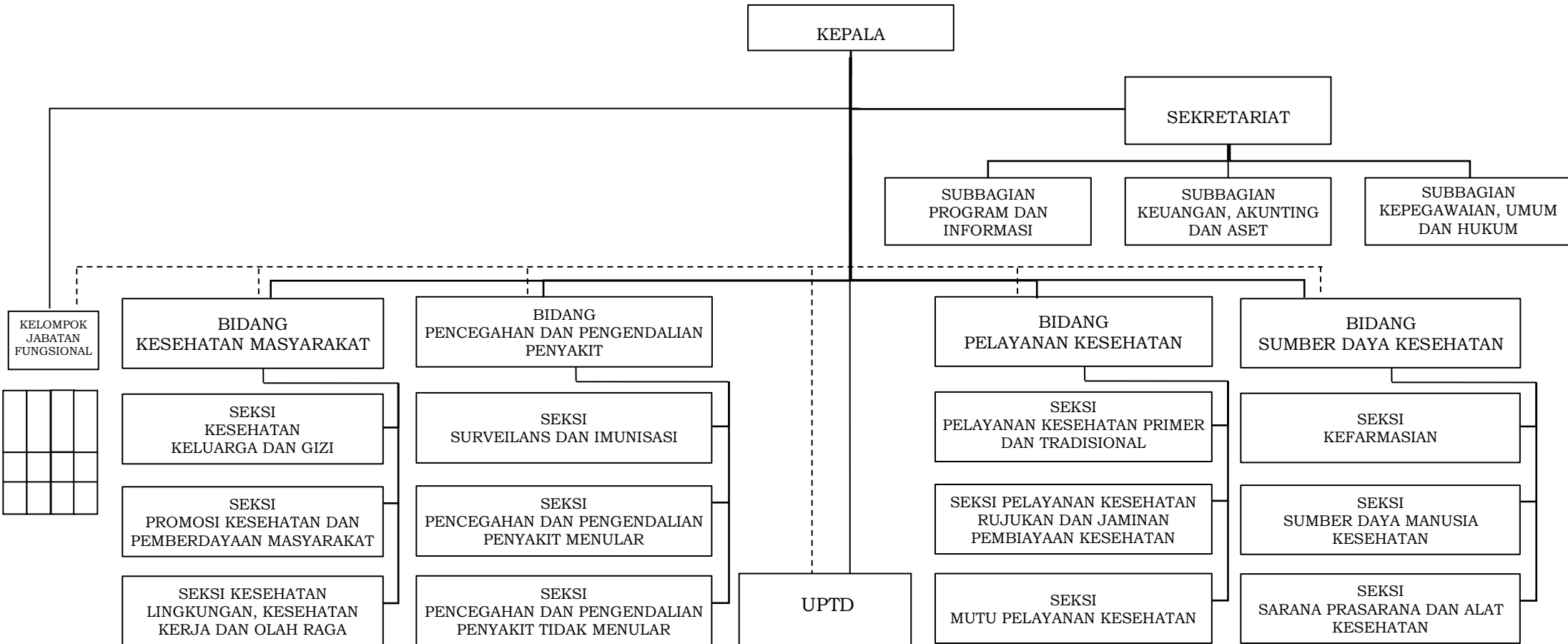


# LAMPIRAN

Lampiran 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 100 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020  
 TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**



BUPATI PURWAKARTA,

**Ttd**

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

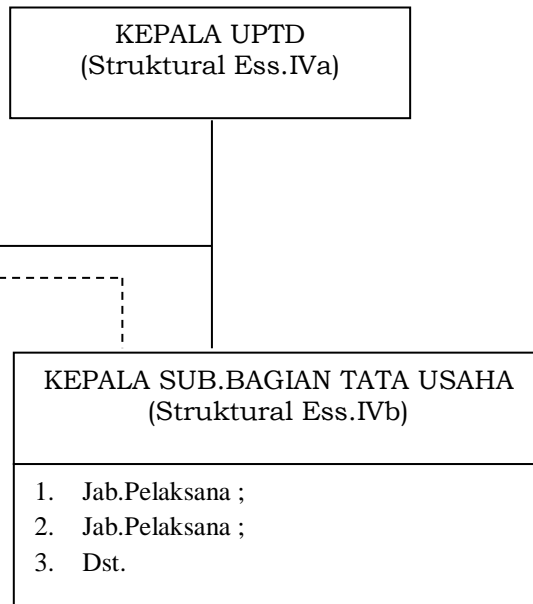
NOMOR : 100 FEBRUARI 2020

TANGGAL : 17 FEBRUARI 2020

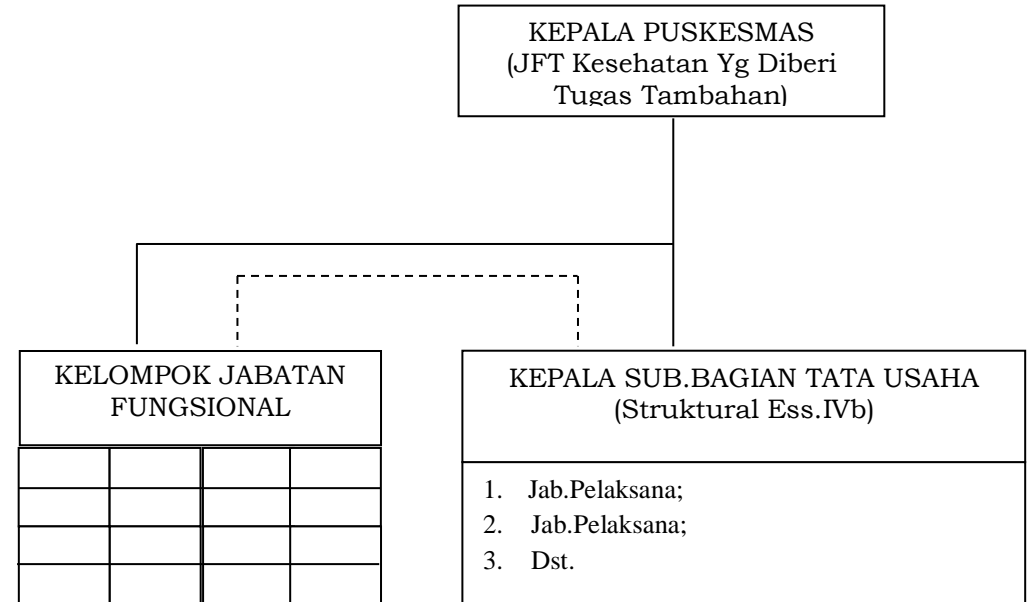
TENTANG : KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA :**

I. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN; dan  
UPTD PERBEKALAN KESEHATAN



II. PUSKESMAS



BUPATI PURWAKARTA,

**Ttd**

ANNE RATNA MUSTIKA

Lampiran 2

Tabel c.23  
 Anggaran dan Realisasi Capaian Indikator Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

NO	Indikator Kinerja Utama	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Rensta Dinas Kesehatan (Tahun Ke-)					Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(-1)	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
						2019	2020	2021	2022	2023	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11-2)	(11-1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
<b>A</b>	<b>Indikator pada RPJMD 2018-2023 berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b>																					
1	Umur Harapan Hidup	RPJMN	IKU	RPJMD	Indeks	70,65	70,77	70,89	71,01	71,13	70,42	70,54	70,71	70,99				100,1	100,3			
2	Persentase kematian ibu	Renstra	IKK	RPJMD	%	0,15	0,13	0,12	0,11	0,09	0,11	0,17	0,13	0,17				86,7	130,8			
3	Persentase kematian bayi	Renstra	IKK	RPJMD	%	0,5	0,49	0,46	0,44	0,41	0,53	0,29	0,4	0,21				80,0	42,9			
1	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Renstra	IKK	RPJMD	%	90	90	90	95	95	85	88,33	85	97,67				94,4	108,5			
2	Prosentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja	Renstra	IKK	RPJMD	%	66,67	66,67	75	75	83,33	58,33	58,33	41,67	75				62,5	112,5			
3	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Renstra	IKK	RPJMD	%	85,71	90	92	95	100	77,92	80,52	76,67	100				89,5	111,1			
4	Cakupan Srata Posyandu Purnama Dan Mandiri	Renstra	IKK	RPJMD	%	62,02	62,71	63,3	63,89	65,16	60,94	61,63	59,2	63,76				95,5	101,7			
5	Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS	Renstra	IKK	RPJMD	%	65,68	65,84	65,87	66	66,09	64,87	65,25	62,83	65,99				95,7	100,2			
6	Cakupan pelayanan anak balita	Renstra	IKK	RPJMD	%	71,54	74,35	78,57	83,03	85,99	68,72	70,13	71,35	62,5				99,7	84,1			
7	Cakupan pelayanan bayi	Renstra	IKK	RPJMD	%	98,8	98,8	98,8	98,8	98,8	98,35	98,43	99,9	100				101,1	101,2			
8	Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)	Renstra	IKK	RPJMD	%	75,83	75,94	75,95	75,96	75,97	75,73	75,79	78,1	79,9				103,0	105,2			

9	Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat	Renstra	IKK	RPJMD	%	57,09	58,28	59,14	61,24	61,83	54,43	55,61	58,25	50,61				102,0	86,8			
10	Cakupan Penemuan dan penanganan Penderita DBD	Renstra	IKK	RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100,0	100,0			
11	Prosentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap	Renstra	IKK	RPJMD	%	84,77	85,02	85,3	85,41	85,9	84,18	84,64	95,7	92,06				112,9	108,3			
12	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)	Renstra	IKK			83,12	83,92	84,41	85,05	86,01	81,99	82,48	68,84	65,94				82,8	78,6			
13	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Renstra	IKK	RPJMD	%	1,22	1,26	1,31	1,34	1,4	1,19	1,07	61,16	26,26				5013,1	2084,1			
14	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	Renstra	IKK	RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	56,76	67,85				56,8	67,9			
15	Prosentase kepesertaan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan	Renstra	IKK	RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100,0	100,0			
16	Prosentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	Renstra	IKK	RPJMD	%	46,15	53,85	63,08	69,23	75,38	38,46	46,15	61,16	66,67				132,5	123,8			
17	Prosentase fasilitas kesehatan yang dibina	Renstra	IKK	RPJMD	%	31,2	43,2	53,6	63,2	69,6	20	24	100	100				320,5	231,5			
18	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	Renstra	IKK	RPJMD	%	99,06	99,09	99,14	99,19	99,25	98,68	99,06	100	99,41				100,9	100,3			
19	Cakupan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	Renstra	IKK	RPJMD	%	70,14	72,69	75,23	77,77	82,86	94,95	70,13	103,2	100				147,1	137,6			
20	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Renstra	IKK	RPJMD	%	98,88	99,04	99,14	99,57	99,62	98,68	98,66	101	100				102,1	101,0			

21	Persentase Cakupan Pelayanan Individu, Keluarga dan masyarakat dalam menumbuhkan perilaku hidup sehat dan mengembangkan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Renstra				80	80	80	80	80	64,87	65,25	62,83	65,99				78,5	82,5			
22	Prosentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	Renstra	IKK	RPJMD	%	90	90	95	100	100	75	80	90	90				100,0	100,0			
23	Meningkatnya jumlah kunjungan pemeriksaan Labkesda (5% per tahun)	Renstra	IKK	RPJMD	%	80	85	90	95	100	70	75	95	89,41				118,8	105,2			
24	Meningkatnya jumlah parameter pemeriksaan Labkesda	Renstra	IKK	RPJMD	%	84,47	88,35	92,23	96,12	100	76,7	80,58	109	83,5				129,0	94,5			
25	Prosentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang masih berlaku	Renstra	IKK	RPJMD	%	83,54	85,23	89,03	93,25	100	78,9	80,17	100	100				119,7	117,3			
<b>B</b>	<b>Indikator pada RPJMD 2018-2023 berdasarkan Perda Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023</b>																					
1	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Renstra	IKK	RPJMD	Opini		BB	BB	BB	BB				BB	BB							100,0
2	Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Renstra	IKK	RPJMD	%		70	75	80	85				65	68							97,1
3	Rerata capaian SPM bidang kesehatan	Renstra	IKK	RPJMD	%		70	75	75	80				67	75							107,1
4	Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	Renstra	IKK	RPJMD	%		90	90	95	95				90	97,67							108,5
5	Pemenuhan tenaga kesehatan minimal (9 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	Renstra	IKK	RPJMD	%		85	90	95	100				80	80							94,1
6	Cakupan sarana farmasi yang dibina	Renstra	IKK	RPJMD	%		88	92	95	100				86	100							113,2

7	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	Renstra	IKK	RPJMD	%		63	63	64	65			62	63,76					101,7				
<b>C</b>	<b>Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Permenkes No 43 tahun 2019)</b>																						
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			97,74	100,53	99,4				100,5	99,4			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			98,67	101,04	92,9				101,0	92,9			
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			103,92	107,17	107,1				107,2	107,1			
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			47,55	71,35	62,5				71,4	62,5			
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			86,74	100	98,2				100,0	98,2			
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			1,05	23,04	26,3				23,0	26,3			
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			42	13,14	18				13,1	18,0			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			6,18	9,44	22,4				9,4	22,4			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			2,17	74,46	73,4				74,5	73,4			
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			118,25	99,85	69,6				99,9	69,6			
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			93,58	88,78	65,9				88,8	65,9			
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Permenkes	IKK	SPM	%	100	100	100	100	100			83,3	48,9	63,5				48,9	63,5			

## Lampiran 3

## Tabel c.24

## Anggaran dan Realisasi Capaian Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

NO	Kode	Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-							Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-							Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
			0	1	2	3		4	5	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
			2018	2019	2020	2021	2021 Parsial 1	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(17)	(18)
(1)	(1.1)	(3)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
	<b>1.02 . 1.02.01</b>	<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>116.758.948.038,00</b>	<b>137.516.871.095,00</b>	<b>168.517.545.050,00</b>	<b>144.034.772.969,00</b>	<b>234.991.255.133,00</b>	<b>151.567.791.595,00</b>	<b>159.494.787.096,00</b>	<b>89.662.768.749,00</b>	<b>114.427.574.136,00</b>	<b>121.732.326.551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,79</b>	<b>83,21</b>	<b>72,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,23</b>	<b>77,00</b>
	1.02 . 1.02.01.01 . 07	Program Dukungan Manajemen Administrasi Perkantoran			14.522.292.900,00							14.150.405.720,00						97,44					
1	1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11.135.160.000,00	12.182.940.000,00						10.839.417.507,00	11.414.224.931,00					97,34	93,69						
2	1.02 . 1.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	918.229.406,00	1.304.000.000,00						854.301.006,00	1.236.673.938,00					93,04	94,84						



3	1.02 . 1.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	270.000.000,00	130.000.000,00					191.440.000,00	106.468.675,00					70,90	81,90								
4	1.02 . 1.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.000.000,00	97.500.000,00					90.000.000,00	88.145.000,00					100,00	90,41								
5	1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	5.177.872.000,00	4.720.897.000,00	3.616.092.000,00				4.901.162.520,00	4.439.396.328,00	3.480.202.132,00				94,66	94,04	96,24							
6	1.02 . 1.02.01 . 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.795.449.000,00	17.116.000.000,00	15.427.727.000,00				12.903.648.214,00	16.048.730.657,00	13.092.679.151,00				93,54	93,76	84,86							
7	1.02 . 1.02.01 . 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	150.000.000,00	175.000.000,00	281.391.000,00				150.000.000,00	175.000.000,00	204.416.000,00				100,00	100,00	72,64							
8	1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	175.000.000,00	1.325.485.000,00	1.510.999.000,00				169.500.000,00	1.186.223.670,00	1.077.649.152,00				96,86	89,49	71,32							

9	1.02 . 1.02.01 . 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	510.000.000,00	380.000.000,00	125.000.000,00					242.593.500,00	211.345.500,00	122.790.000,00					47,57	55,62	98,23			
10	1.02 . 1.02.01 . 24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	59.986.680.632,00	77.488.933.432,00	93.153.308.050,00					38.942.429.477,00	58.586.381.974,00	71.833.378.372,00					64,92	75,61	77,11			
11	1.02 . 1.02.01 . 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	13.089.740.000,00	10.037.291.663,00	13.279.242.000,00					10.985.412.527,00	9.752.397.056,00	11.477.643.300,00					83,92	97,16	86,43			
12	1.02 . 1.02.01 . 28	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	250.000.000,00	350.000.000,00	520.000.000,00					158.314.000,00	307.660.000,00	347.250.653,00					63,33	87,90	66,78			
13	1.02 . 1.02.01 . 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	5.480.662.000,00	3.491.000.000,00	1.145.312.000,00					4.533.805.900,00	3.266.826.800,00	853.203.260,00					82,72	93,58	74,50			
14	1.02 . 1.02.01 . 33	Program Promosi Kesehatan/ Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*)	450.000.000,00	1.850.000.000,00	225.000.000,00					259.300.000,00	1.765.380.000,00	136.110.000,00					57,62	95,43	60,49			





Lampiran 4

Tabel C.25

Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke-					
				TAHUN 2018 (Realisasi)	TAHUN 2019 (Realisasi)	TAHUN 2020 (Realisasi)	TARGET TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	<b>Umur Harapan Hidup</b>	70,54	70,71	70,99	70,98	71,11	71,24
			Persentase kematian ibu	0,13%	0,14%	0,19%	0,12%	0,11%	0,09%
			Persentase kematian bayi	0,49%	0,41%	0,21%	0,46%	0,44%	0,41%

## Lampiran 5

Tabel C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023

	Visi	:	Melanjutkan Purwakarta Istimewa (Purwakarta Berkarakter			
	Misi	:	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial			
	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>		<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1.1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang akuntabel dan dukungan stakeholder dan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi	1 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan melalui pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan, gerakan penyelamatan ibu melahirkan, bayi, balita dan anak remaja sehat, meningkatkan sistem pengamatan, pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap penyakit serta upaya penanggulangan penyakit terhadap penyakit menular dan tidak menular sesuai komitmen global, nasional maupun lokal spesifik, kualitas kesehatan lingkungan yang aman,nyaman, sehat dan layak, dukungan kebijakan pembiayaan dan kemandirian masyarakat terhadap jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage (jaminan kesehatan semesta) serta penyediaan sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat
						2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
						3 Meningkatkan kapasitas, kualitas, pemenuhan dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang aman dan berkualitas serta terlindung dari bahaya dan penyalahgunaan obat dan makanan serta bahan berbahaya lainnya.
						4 Meningkatkan peran serta, kemandirian, perilaku, pola pikir dan gaya hidup yang sehat dan produktif, dan upaya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dukungan lintas sektor dan stake holder terkait kesehatan

## Lampiran 6

## RENSTRA PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2018-2023

6a

NO	TUJUAN/SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN RENSTRA	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TAHUN)			TARGET TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	<b>TUJUAN 1</b>	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<b>Umur Harapan Hidup</b>	70,55	70,71	70,85	70,98	71,11	71,24	71,24		
	<b>SASARAN 1.1</b>	Meningkatnya aksebilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase kematian ibu	0,17%	0,15%	0,13%	0,12%	0,11%	0,09%	0,09%		
			Persentase kematian bayi	0,29%	0,50%	0,49%	0,46%	0,44%	0,41%	0,41%		
											Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang akuntabel dan dukungan stakeholder dan masyarakat yang komprehensif dan terintegrasi	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan melalui pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan, gerakan penyelamatan ibu melahirkan, bayi, balita dan

										anak remaja sehat, meningkatkan sistem pengamatan, pencegahan dan kewaspadaan dini terhadap penyakit serta upaya penanggulangan penyakit terhadap penyakit menular dan tidak menular sesuai komitmen global, nasional maupun lokal spesifik, kualitas kesehatan lingkungan yang aman,nyaman, sehat dan layak, dukungan kebijakan pembiayaan dan kemandirian masyarakat terhadap jaminan kesehatan menuju Universal Health Coverage
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---



												(jaminan kesehatan semesta) serta penyediaan sumber daya kesehatan yang merata, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat
												Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan
												Meningkatkan kapasitas, kualitas, pemenuhan dan pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang aman dan berkualitas serta terlindung dari bahaya dan penyalahgunaan obat dan makanan serta bahan berbahaya lainnya.



6b

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	Kondisi Awal			TARGET			PAGU INDIKATIF(Rp)					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD	Total	BIDANG PADA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023		Rp		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	68	70	73	75,00	75	80	122.171.880.510	64.598.203.010	52.290.511.742	55.025.305.506	57.903.128.984	80,00	351.989.029.752	Bidang Kesmas, P2P, Yankes, SDK	
	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	88,33	90	90	90	95	95						95,00	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	83	85	88	90	95	100			11.484.588.257	12.085.232.223	12.717.289.868	100,00	36.287.110.348	Bidang SDK Seksi SDKM	
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	80,52	85,71	88,31	92,21	94,81	100			597.635.651	628.891.996	661.783.047	100,00	1.888.310.694	Bidang SDK Seksi Farmasi	

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama dan Mandiri	61,62904809	62,02158979	62,70853778	63,30	63,89	65,16			224.991.173	236.758.211	249.140.666	65,16	710.890.050	Bidang Kesmas Seksi Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	BB	BB	BB	BB	12.760.440.000	14.036.484.000	52.290.511.742	55.025.305.506	57.903.128.984	BB	192.015.870.232	Sekretariat Dinas Kesehatan
	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	68	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00						85,00		

## Lampiran 7a

## Tabel C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 (Ringkasan)

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan		Satuan	Data Capaian		Target Kinerja Program dan Kegiatan										
								2019		2020		2021		2022		2023		
								2017	2018	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					Umur Harapan Hidup	Tahun	70,43	70,55	70,71		70,85		70,98					
	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas				Persentase kematian ibu	%	0,11	0,17	0,15		0,13		0,12					
					Persentase kematian bayi	%	0,532	0,29	0,50		0,49		0,46					
		1.02 . 1.02.01		Dinas Kesehatan						137.516.871.095		168.517.545.050		181.934.305.321		191.449.469.489		201.462.276.744
		1.02 . 1.02.01 . 07	I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	%	70,9	70,9	100	13.714.440.000	100	14.522.292.900						
					Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	%	97,34	97,34	100		100							
					Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	93,04	93,04	100		100							

					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	97,34	97,34	100		100								
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	%	100	100	100		100								
					Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	%	100	100	100		100								
			57	kegiatan															
		1.02 . 1.02.01 . 15	II	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan						4.720.897.000		3.616.092.000							
					Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	85	88,33	90		90								
			7	kegiatan															
		1.02 . 1.02.01 . 16	III	Program Upaya Kesehatan Masyarakat						17.116.000.000		15.427.727.000							
					Prosentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja	%	58%	58%	67%		67%								
			50	kegiatan															
		1.02 . 1.02.01 . 17	IV	Program Pengawasan Obat dan Makanan						175.000.000		281.391.000							

					Cakupan sarana farmasi yang dibina		78%	81%	86%		90%							
		1.02 . 1.02.01 . 19	3 V	kegiatan Program Promosi Kesehatan / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat						1.850.000.000		225.000.000						
					Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri		60,94%	61,63%	62,02 %		62,71 %		63,30 %					
					Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS		64,87%	65,25%	65,68 %		65,84 %		65,87 %					
		1.02 . 1.02.01 . 20	8 VI	kegiatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat						1.325.485.000		1.510.999.000						
					Cakupan pelayanan anak balita		68,72%	70,13%	71,54 %		74,35 %							
					Cakupan pelayanan bayi		98,35%	98,43%	98,80 %		98,80 %							
			6	kegiatan														
		1.02 . 1.02.01 . 21	VII	Program Pengembangan Lingkungan Sehat						380.000.000		125.000.000						
					Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)		75,73%	75,79%	75,83 %		75,94 %							







		1.02 . 1.02.01 . 35	XIII	Program Pengemb angan Mutu Pelayana n Keschata n						3.685.600.000		1.597.385.000						
					Prosentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya		75%	80%	90%				90%					
			20	kegiatan														
		1.02 . 1.02.01 . 38	XIV	Program Pelayana n Laborato rium Keschata n								1.157.817.000						
					Meningkatnya jumlah kunjungan pemeriksaan Labkesda (5% per tahun)		70%	75%	80%									
					Meningkatnya jumlah parameter pemeriksaan Labkesda		77%	81%	84%									
			7	kegiatan														
		1.02 . 1.02.01 . 39	XV	Program Pengemb angan Sumber Daya Keschata n								13.290.384.100						
					Prosentase tenaga kesehatan yang memiliki SIP yang masih berlaku	78,90%	80,17%	83,54%	89,03 %				100,00 %					
			4	kegiatan														
			285	kegiatan	jumlah kegiatan pada aplikasi lama (SIMDA)													
		1.02 . 1	I	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA										52.290.511.742		55.025.305.506		57.903.128.984









		1.02 . 1.02.01.01 .20	3.2	Perencanaan Kebutuhan dan Peningkatan Penggunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%							75	11.242.169.950	75	9.884.278.448	80	10.374.492.370
			3	sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan													
		1.02 . 1.02.01.01 .21	3.3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%							75	200.000.000	75	210.000.000	80	220.500.000
			1	sub kegiatan	total sub kegiatan kegiatan													
			6	sub kegiatan	total sub kegiatan Program													
		1.02 .4	IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Cakupan Sarana Farmasi Yang Dibina	%	0,00	0,00					92,21	597.635.651	94,81	628.891.996	100	661.783.047











Lampiran 7b

Tabel C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Satuan	Data Capaian										
							2018	2019		2020							
								Target	Rp	Target	Rp						
1	2	3		4	5	6	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					Umur Harapan Hidup	Tahun	70,55	70,71		70,85		70,98					
	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas				Persentase kematian ibu	%	0,17	0,15		0,13		0,12					
					Persentase kematian bayi	%	0,29	0,50		0,49		0,46					
		<b>1.02 . 1.02.01</b>		<b>Dinas Kesehatan</b>					<b>137.516.871.095</b>		<b>168.517.545.050</b>		<b>181.934.305.321</b>		<b>191.449.469.489</b>		<b>201.462.276.744</b>
		<b>1.02 . 1.02.01 . 07</b>	<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase Pegawai Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	%	70,9	100	<b>13.714.440.000</b>	100	<b>14.522.292.900</b>						
					Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Rumah Tangga dan Sarana /Prasarana Kantor	%	97,34	100		100							

					Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	93,04	100		100								
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	97,34	100		100								
					Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Perundang - Undangan	%	100	100		100								
					Persentase Ketersediaan Data Kinerja OPD	%	100	100		100								
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 02/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 02	1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, kouta	Rek	7	7	260.000.000	7	352.200.000							
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 06/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 06	2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	%	100	100	100.000.000	100	60.000.000							
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 08/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 08	3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	OB	36	36	40.500.000	36	59.800.140							

		1.02 . 1.02.01 . 01 . 10/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 10	4	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	%	100	100	160,000,000	100	65,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 11/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 11	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	%	100	100	275,000,000	100	156,988,500						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 12/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 12	6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	100	25,000,000	100	25,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 14/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 14	7	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	%	100	100	25,000,000	100	25,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 17/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 17	8	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minuman rapat dan tamu kantor	%	100	100	50,000,000	100	40,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 18/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 18	9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	HOK	247	247	125,000,000	247	50,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 23/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 19	10	Penyediaan Jasa Tenaga PTT	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga PTT	OB	1,968	1,968	1,157,100,000	1,968	1,003,800,000						

		1.02 . 1.02.01 . 01 . 24/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 21	11	Penyediaan jasa Tenaga Harian Lepas untuk tenaga kesehatan di Puskesmas rawat inap, Poned dan Puskesmas terpencil	Terlaksananya Penyediaan Jasa THL Untuk Tenaga Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta	OB	4,752	4,752	8,407,340,000	4,752	7,810,273,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 25/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 31	12	Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	Terlaksananya Penyediaan Jasa Tenaga Piket Malam	%	24		33,000,000	24	45,866,760						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 27/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 20	13	Festival Purwakarta Istimewa	Terlaksananya Keikutsertaan dan Partisipasi OPD dalam Festival Purwakarta Istimewa	%	100	100	25,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 30/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 116	14	Penyediaan Jasa Tenaga Kesehatan Keluarga Desa	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga kesehatan keluarga desa	Paket	1 ( Dokter keluarga 6 orang , Perawat 6 orang , dan Bidan 7 orang )	1 ( Dokter keluarga 6 orang, Perawat 6 orang, dan Bidan 7 orang)	1,500,000,000	1 ( Dokter keluarga 6 orang, Perawat 6 orang, dan Bidan 7 orang)	1,551,500,000						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 07/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 27	15	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100,000,000	100	185,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 09/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 29	16	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan Peralatan Gedung Kantor	%	100	100	150,000,000	100	150,000,000						

		1.02 . 1.02.01 . 02 . 10/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 30	17	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur	%	100	100	200.000.000	100	150.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 22/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 34	18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	%	100	100	100.000.000	100	50.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 24/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 36	19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan pusling	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	%	100	100	75.000.000	100	70.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 28/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 40	20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 44/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 47	21	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dan puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional	%	100	100	50.000.000	100	60.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 45	22	Penyediaan Jasa Internet Dinas	Tersedianyan Jasa Internet Dinas	Paket	1	1	24.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 02.46/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 50	23	Peningkatan Pelayanan Mobil Kesehatan selektif masyarakat miskin	Terlaksananya peningkatan pelayanan mobil kesehatan selektif masyarakat miskin	%	100	100	50.000.000	100	3.011.500						
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 49	24	Penataan Lahan Parkir dan Pertanaman Dinas Kesehatan	Tertatanya Lahan Parkir dan Pertanaman Dinas Kesehatan	Paket	1	1	100.000.000								



		1.02 . 1.02.01 . 02 . 51	25	Pengadaan Peralatan CCTV kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan CCTV kantor Dinas Kesehatan	Paket	1	1	25,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 52	26	Penataan Halaman Dinas Kesehatan	Terlaksananya penataan Halaman Dinas Kesehatan	Paket	1	1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 02 . 53	27	Pengaspalan Halaman Parkir Dinas Kesehatan	Terlaksananya pengaspalan Halaman Parkir Dinas Kesehatan	Paket	1	1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 05 . 04/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 71	28	Pengelolaan dan pembinaan tenaga non PNS	Terlaksananya pengelolaan dan pembinaan Tenaga Non PNS	%	100	100	15,000,000	100	25,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 05 . 05/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 72	29	Bimbingan Teknis Kepegawaian	Terlaksananya bimbingan Teknis Kepegawaian	Paket	1	1	15,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 05 . 08/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 73	30	Pelatihan Jabatan Fungsional Ahli Fungsional Administrasi Kesehatan	Terlaksananya pelatihan Jabatan Fungsional Ahli Fungsional Administrasi Kesehatan	Paket	1	1	20,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 05 . 09/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 72	31	Pelatihan Tim Penguji dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Kesehatan	Terlaksananya pelatihan Tim Penguji dan Pelaksanaan Uji Kompetensi Bidang Kesehatan	Paket	1	1	30,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 05 . 11/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 72	32	Standarisasi Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya standarisasi Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Paket	1	1	10,000,000								

		1.02 . 1.02.01 . 05 .12/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 72	33	Workshop dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya workshop dan Bimbingan dan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesehatan	Paket	1	1	10,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 05 .13/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 72	34	Pendampingan Penatusahaan Keuangan	Pendampingan Penatusahaan Keuangan	Paket	1	1	30,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 01/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 72	35	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan	%	100	100	7,500,000	100	20,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 04/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 75	36	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun 2019 dan laporan keuangan semester I tahun 2020	Buku	50	50	30,000,000	50	15,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 06/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 131	37	Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan	Terlaksananya Penyusunan evaluasi Renstra Dinas Kesehatan	%	100	100	7,500,000	100	15,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 07/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 80	38	Penyusunan rencana kerja (renja) dinas	Terlaksananya Penyusunan Renja Dinas Dinas Kesehatan	%	100	100	7,500,000	100	15,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 08/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 79	39	Penyusunan profil kesehatan	Terlaksananya Penyusunan Profil Dinas Kesehatan	%	100	100	10,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 09/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 79	40	Workshop Perencanaan dan Peloporan Puskesmas	Terlaksanya workshop Perencanaan dan Peloporan Puskesmas	%		100	10,000,000								

		1.02 . 1.02.01 . 06 . 10/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 132	41	Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya penyusunan pelaporan Barang Milik Daerah	%	100	100	10,000,000	100	5,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 11/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 129	42	Penguatan Penyelenggaraan SPIP	Terlaksananya penguatan penyelenggaraan SPIP	%	100	100	15,000,000	100	15,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 04/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 106	43	Rehab Rumah Dinas Kantor Kesehatan	Terlaksananya rehabilitasi rumah dinas	%				100	0						
		1.02 . 1.02.01 . 06 . 04/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 115	44	Dukungan Manajemen BOK Kesekretariatan (DAK Non Fisik Tahun 2020)	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring pelaksanaan BOK di Puskesmas	%				100	63,953,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 10/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 117	45	Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan	Terlaksananya pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi penatausahaan Keuangan	Unit				11	50,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 10/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 118	46	Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya pengadaan sarana penunjang SIK Kabupaten	%				100	50,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 10/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 126	49	Bimbingan Teknis dan Monev Terpadu Perencanaan, Data Informasi dan Kinerja Puskesmas	Terlaksananya Bimbingan teknis dan Monev Terpadu Perencanaan, Data Informasi dan Pelaporan Puskesmas	%				100	15,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 01 . 10/ 1.02 . 1.02.01 . 07 . 127	50	Pendampingan Penatausahaan Keuangan	Tersedianya Peningkatan Penatausahaan Keuangan Dinas dan Puskesmas	Kali				6	25,000,000						



		1.02 . 1.02.01 . 15	II	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan					4.720.897.000		3.616.092.000					
					Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	88,33	90		90						
		1.02 . 1.02.01 . 15 . 11	1	Pengelolaan Administrasi DAK obat kesehatan	Terlaksananya pengelolaan Administrasi DAK obat kesehatan	Paket				1	50.000.000					
		1.02 . 1.02.01 . 15 . 09/16	2	Pengadaan Buffer Stock Obat, BMHP, Bahan Gigi, Reagen SIA Kabupaten Purwakarta (DBHPR Tahun 2020)	Tersedianya kebutuhan Obat	PKM	20	20	450.000.000	20	500.000.000					
		1.02 . 1.02.01 . 15 . 10/20	3	Pelayanan dan Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya kegiatan distribusi obat dan e-logistik	PKM	20	20	80.000.000	20	50.000.000					
		1.02 . 1.02.01 . 15 . 11/17	4	Peningkatan Kinerja Administrasi UPTD Perbekalan	Terlaksananya operasional administrasi UPTD Perbekalan Kesehatan	Bulan	12	12	75.000.000	12	43.500.000					
		1.02 . 1.02.01 . 15 . 13	5	Pengadaan Obat Pelayanan Dokter Keluarga Desa	Terlaksananya pengadaan Obat Pelayanan Dokter Keluarga Desa	Paket		1	200.000.000							
		1.02 . 1.02.01 . 15 . 21	6	Distribusi dan e Logistik ( DAK BOK Non Fisik )	Terlaksananya kegiatan distribusi obat dan e-logistik	PKM	20			20	114.440.000					

		1.02 . 1.02.01 . 15 .14/ 22	7	Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik )	Tersedianya kebutuhan Obat	PKM	20	20	3.915.897.000	20	2.858.152.000					
		<b>1.02 . 1.02.01 . 16</b>	<b>III</b>	<b>Program Upaya Kesehatan Masyarakat</b>					<b>17.116.000.000</b>		<b>15.427.727.000</b>					
					Prosentase pencapaian target SPM sesuai wilayah kerja	%	58%	67%		67%						
		1.02 . 1.02.01 . 16 .34/ 20	1	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Purwakarta	Terlaksananya kegiatan admistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	160.000.000	100%	150.000.000.00					
		1.02 . 1.02.01 . 16 .35/ 22	2	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Mulyamekar	Terlaksananya kegiatan admistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	80.000.000	100%	70.000.000.00					
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 36/26	3	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Maracang	Terlaksananya kegiatan admistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	95.000.000	100%	85.000.000.00					
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 37/29	4	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Bungursari	Terlaksananya kegiatan admistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	90.000.000	100%	80.000.000.00					

		1.02 . 1.02.01 . 16 . 38/32	5	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Koncara	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	95.000,000	100%	85.000,000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 .39/ 35	6	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Bojong	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	85.000,000	100%	75.000,000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 40/38	7	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Sukasari	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	65.000.000	100%	55.000,000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 41/41	8	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Pondoksalam	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	70.000,000	100%	60.000,000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 42/44	9	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Munjuljaya	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	90.000,000	100%	90.000,000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 .43/ 47	10	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Jatiluhur	Terlaksananya kegiatan administrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	130.000,000	100%	120.000,000,00						

		1.02 . 1.02.01 . 16 . 44/50	11	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Cempaka	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	105.000.000,00	100%	95.000.000,00							
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 45/53	12	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Pasawahan	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	100.000.000,00	100%	90.000.000,00							
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 46/56	13	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned KiaraPedes	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	115.000.000,00	100%	105.000.000,00							
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 47/59	14	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Plered	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	160.000.000,00	100%	150.000.000,00							
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 48/62	15	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas Poned Tegalwaru	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	115.000.000,00	100%	105.000.000,00							
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 49/65	16	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Maniis	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	140.000.000,00	100%	130.000.000,00							



		1.02 . 1.02.01 . 16 .50/ 68	17	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP cibatu	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	140.000.000	100%	130.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 51/71	18	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Wanayasa	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	175.000.000	100%	165.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 52/74	19	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Darangdan	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	190.000.000	100%	180.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 .53/ 77	20	Peningkatan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan serta Penanganan Gizi Buruk Puskesmas DTP Sukatani	Terlaksananya kegiatan admnistrasi dan pencegahan serta pengendalian gizi buruk di wilayah kerja puskesmas	%	100%	100%	90.000.000	100%	80.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 .54/ 81	21	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Purwakarta (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	730.000.000	100%	702.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 55/82	22	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Munjuljaya (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	740.000.000	100%	659.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 56/83	23	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koncara (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	695.000.000	100%	653.000.000,00						

		1.02 . 1.02.01 . 16 .57/ 84	24	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Campaka (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	470.000.000	100%	641.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 58/85	25	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatiluhur (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	720.000.000	100%	685.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 59/86	26	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plered (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	795.000.000	100%	634.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 .60/ 87	27	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukatani (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	835.000.000	100%	722.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 61/88	28	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Darangdan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	600.000.000	100%	829.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 62/89	29	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maniis (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	480.000.000	100%	711.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 63/90	30	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tegalwaru (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	570.000.000	100%	765.000.000,00						

		1.02.1.02.01.16.64/91	31	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wanayasa (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	510.000.000	100%	731.000.000,00							
		1.02.1.02.01.16.65/92	32	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pasawahan (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	700.000.000	100%	658.000.000,00							
		1.02.1.02.01.16.66/93	33	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bojong (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	700.000.000	100%	595.000.000,00							
		1.02.1.02.01.16.67/94	34	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maracang (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	650.000.000	100%	519.000.000,00							
		1.02.1.02.01.16.68/95	35	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mulyamekar (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	460.000.000	100%	689.000.000,00							
		1.02.1.02.01.16.69/96	36	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bungursari (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	730.000.000	100%	645.000.000,00							
		1.02.1.02.01.16.70/97	37	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cibatu (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	485.000.000	100%	662.000.000,00							

		1.02 . 1.02.01 . 16 . 71/98	38	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukasari (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	665.000.000	100%	667.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 72/99	39	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pondoksalam (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	670.000.000	100%	596.727.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 73/100	40	Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kiarapedes (DAK Non Fisik)	Terlaksananya kegiatan UKM sesuai dengan indikator SPM	%	100%	100%	660.000.000	100%	564.000.000,00						
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 74	41	Pelayanan BOK Sekunder Kesehatan Masyarakat (BOK UKM Sekunder, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya pelayanan BOK Sekunder Kesehatan Masyarakat	%		100%	901.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 75	42	Pelayanan BOK Sekunder Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (BOK UKM Sekunder, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya pelayanan BOK Sekunder Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%		100%	120.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 76	43	Pelayanan BOK Sekunder Pelayanan Kesehatan (BOK UKM Sekunder, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya pelayanan BOK Sekunder Pelayanan Kesehatan	%		100%	100.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 77	44	Pelayanan BOK Sekunder Sumber Daya Kesehatan (BOK UKM Sekunder, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya pelayanan BOK Sekunder Sumber Daya Kesehatan	%		100%	30.000.000								

		1.02 . 1.02.01 . 16 . 78	45	Dukungan Manajemen BOK Sekunder Kesehatan Masyarakat (Dukungan BOK Kabupaten, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya dukungan manajemen BOK Sekunder Kesehatan Masyarakat	%		100%	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 79	46	Dukungan Manajemen BOK Sekunder Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dukungan BOK Kabupaten, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya dukungan manajemen BOK Sekunder Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	%		100%	150.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 80	47	Dukungan Manajemen BOK Sekunder SDK (Dukungan BOK Kabupaten, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya dukungan manajemen BOK Sekunder SDK	%		100%	30.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 81	48	Dukungan Manajemen BOK Sekunder Kesekretariat BOK (Dukungan BOK Kabupaten, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya dukungan manajemen BOK Sekunder Kesekretariatan BOK	%		100%	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 16 . 82	49	Distribusi Obat dan e-Logistik (BOK Kabupaten, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya distribusi Obat dan e-Logistik	%		100%	160.000.000								

		1.02 . 1.02.01 . 16 . 84	50	Dukungan Manajemen BOK Pelayanan Kesehatan (Dukungan BOK Kabupaten, DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya dukungan manajemen BOK Pelayanan Kesehatan	%		100%	70,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 17	IV	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>					175,000,000		<b>281,391,000</b>						
					Cakupan sarana farmasi yang dibina		81%	86%		90%							
		1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	1	Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan	meningkatnya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya terhadap sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan, toko makanan-minuman	sarana	20 puskesmas, 55 klinik, 75 sarana apotik, 50 sarana toko obat/Batra/kios jamu dan 40 Toko makanan-minuman/kosalkes		75,000,000	20 puskesmas, 55 klinik, 75 sarana apotik, 50 sarana toko obat/Batra/kios jamu dan 40 Toko makanan-minuman/kosalkes		50,000,000					

		1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	2	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan konsumen/masyarakat melalui penyebaran informasi tentang penggunaan obat, makanan dan bahan berbahaya.	paket penyuluhan	6		6	100.000.000							
		1.02 . 1.02.01.01 . 17.10	3	Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik Tahun 2020)	Terlaksananya Pengawasan Obat dan Makanan	Paket			1		231.391.000						
		<b>1.02 . 1.02.01 . 19</b>	<b>V</b>	<b>Program Promosi Kesehatan / Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>						<b>1.850.000.000</b>	<b>225.000.000</b>						
					Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri		61,63 %		62,02%		63,30%						
					Cakupan Rumah Tangga ber-PHBS		65,25 %		65,68%		65,87%						





		1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	1	Revitalisasi desa siaga	Terlaksananya Revitalisasi Desa Siaga Aktif melalui kegiatan pembinaan, peningkatan dan monitoring evaluasi Strata Desa Siaga Aktif dan kegiatan MMD di Kabupaten Purwakarta	%				100%	25.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 19 . 11	2	Pembinaan Kabupaten Sehat	Terlaksananya kegiatan sosialisasi PERDA KTR di sekolah, Pondok Pesantren, Desa/Kelurahan dan Lintas Sektor, Terlaksananya Refreshing Petugas Bale Pecandu Rokok	%				100%	150.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 19 . 13	3	Pembinaan PHBS di Berbagai Tatanan	Terlaksananya upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) melalui kegiatan Pembinaan, koordinasi, monev UKBM dan adanya Poster Media Promosi Kesehatan	%				100%	50.000.000						
		<b>1.02 . 1.02.01 . 20</b>	<b>VI</b>	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>							<b>1.510.999.000</b>						
				Cakupan pelayanan anak balita			70,13 %	71,54%		74,35%							

				Cakupan pelayanan bayi			98,43 %												
								98,80%											
		1.02 . 1.02.01 . 20 . 08/15	1	Pengelolaan Pelayanan Gizi di Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi	PKM	20	20	1.000.000,000	20	50.000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 20 . 09/11	2	Peningkatan kapasitas petugas Gizi Puskesmas	Terlaksananya Pembinaan, Sosialisasi dan Evaluasi Pengelolaan Pelayanan Gizi di Masyarakat	PKM	20	20	30.000.000										
		1.02 . 1.02.01 . 20 . 10	3	Penurunan Stunting (DAK Reguler )	Terlaksananya upaya Penurunan Stunting	Paket		1	1.095.485.000										
		1.02 . 1.02.01 . 20 . 11	4	Pencegahan dan Intervensi Stunting (Banprov Tahun 2019)	Terlaksananya pencegahan dan Intervensi Stunting (Banprov Tahun 2019)	Paket		1	100.000.000										
		1.02 . 1.02.01 . 20 . 17	5	Pengadaan Alat Pendukung Penurunan Stunting	Terlaksananya pengadaan Alat Pendukung Penurunan Stunting (DAK Penugasan )	Paket				1	710.999.000								
			6	Pengendalian stunting (DAK Non fisik BOK Stunting)	Terlaksananya pemantauan pengendalian stunting (DAK Non fisik)	Paket					1	750.000,000							

		1.02 . 1.02.01 . 21	VII	Program Pengembangan Lingkungan Sehat					380,000,000		125,000,000						
					Cakupan Sarana Sanitasi dasar (air Bersih, Rumah Sehat, Jamban Keluarga dan SPAL)		75,79 %		75,83%		75,94%						
					Cakupan TTU dan TPM Yang Memenuhi Syarat		55,61 %		57,09%		58,28%						
		1.02 . 1.02.01 . 21 . 05	1	Penyehatan lingkungan pemukiman	Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan sarana sanitasi dasar di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, monitoring dan pengambilan sampel	PKM	20	20	80,000,000	20	25,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 21 . 09	2	Penyehatan Lingkungan Tempat-tempat Umum dan Industri (TTU-I)	Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan sarana tempat-tempat umum, sarana pendidikan dan pasar tradisional	PKM	20	20	100,000,000	20	25,000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 21 . 10	3	Penyehatan Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Terlaksananya kegiatan penyehatan lingkungan tempat pengelolaan makanan melalui kegiatan pengawasan, pembinaan dan pengambilan sampel	PKM	20	20	100,000,000	20	25,000,000						

		1.02.1.02.01.21.12	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	Pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja bagi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan	PKM	20	20	50.000.000	20	25.000.000						
		1.02.1.02.01.21.13	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Pelaksanaan kesehatan olahraga bagi pegawai kesehatan, calon jemaah haji, dan masyarakat	PKM	20	20	50.000.000	20	25.000.000						
		<b>1.02.1.02.01.22</b>	<b>VIII</b>	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>					<b>3.182.224.000</b>		<b>8.665.595.000</b>						
					Prosentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap		84,64 %	84,7%		85,02%							
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)		82,48 %	83,12%		83,92%							
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan penyakit menular (TB paru, HIV)		82,48 %	83,12%		83,92%							
		1.02.1.02.01.34.01	1	Pelayanan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan Imunisasi	Paket	1	1	100.000.000								

		1.02 . 1.02.01 . 34 . 02	2	Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa serta Bencana di bidang kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa serta Bencana di bidang kesehatan	Paket	1	1	100.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 03	3	Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Terlaksananya Pelayanan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Paket	1	1	80.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 04	4	Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi jemaah haji	Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi jemaah haji	Paket	1	1	60.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 05	5	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC dan HIV/ AIDS	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC dan HIV/ AIDS	Paket	1	1	75.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 06	6	Pendampingan Anggaran Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (Kaki Gajah)	Terlaksananya Pendampingan Anggaran Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (Kaki Gajah)	Paket	1	1	100.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 07	7	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang	Paket	1	1	71.160.000								

		1.02 . 1.02.01 . 34 . 08	8	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata Laksana Penyakit Menular langsung dan Bersumber Binatang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata Laksana Penyakit Menular langsung dan Bersumber Binatang	Paket	1	1	30.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 09	9	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam Tata Laksana Penyakit Menular langsung dan Bersumber Binatang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan dalam Tata Laksana Penyakit Menular langsung dan Bersumber Binatang	Paket	1	1	30.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 10	10	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Paket	1	1	75.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 11	11	Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	Paket	1	1	75.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 12	12	Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera	Paket	1	1	75.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 13	13	Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tata Laksana Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas dalam Tata Laksana Penyakit Tidak Menular	Paket	1	1	30.000.000								

		1.02 . 1.02.01 . 34 . 14	14	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Berkomunikasi Dengan Kelompok Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Berkomunikasi Dengan Kelompok Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Paket	1	1	30,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 34 . 16	15	DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan 2019)	Terlaksananya DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Pengendalian Penyakit (DAK Penugasan 2019)	Paket		1	2.251.064.000								
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 14	1	Pelayanan bulan imunisasi anak sekolah	Terlaksananya Pelayanan bulan imunisasi anak sekolah	Paket				1	69.100.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 19	2	Pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Paket				1 kegiatan, 25 orang peserta	75.280.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 20	3	Pelayanan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan Imunisasi	Paket				2 kegiatan, 135 orang peserta	100.000.000						

		1.02 . 1.02.01 . 22 . 22	4	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC dan HIV/AIDS	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit TBC dan HIV/AIDS	Orang				758	150.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 23	5	Pendampingan Anggaran Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (Kaki Gajah)	Terlaksananya Pendampingan Anggaran Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis (Kaki Gajah)	Program				1	25.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 24	6	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang (DBHPR Tahun 2020)	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang (DBHPR Tahun 2020)	Program				1	75.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 25	7	Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata Laksana Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan dalam Tata Laksana Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang	Program				1	25.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 26	8	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Berkomunikasi Dengan Kelompok Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Dalam Berkomunikasi Dengan Kelompok Sasaran Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Bersumber Binatang	Program				1	25.000.000						



		1.02 . 1.02.01 . 22 . 28	9	pengecahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	Terlaksananya pengecahan dan Pengendalian Kesehatan Jiwa	Program				1	22.660.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 29	10	Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera	Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Kesehatan Indera	Program				1	25.660.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 35	11	Pelayanan UKM Sekunder bidang pengecahan dan pengendalian penyakit (DAK Non Fisik BOK Kabupaten Tahun 2020)	Terlaksananya Pelayanan UKM Sekunder bidang pengecahan dan pengendalian penyakit (DAK Non Fisik BOK Kabupaten Tahun 2020)	Orang				20	500.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 36	12	Pengadaan Alat Pencegahan Penyakit, Pengendalian Penyakit dan STBM (DAK Fisik 2020)	Terlaksananya Pengadaan Alat Pencegahan Penyakit, Pengendalian Penyakit dan STBM (DAK Fisik 2020)	Orang				20	4.172.895.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 37	13	Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Bencana Kejadian Luar Biasa dan Penanggulangan n Bencana di Bidang Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Surveilans Epidemiologi, Penanggulangan Bencana Kejadian Luar Biasa dan Penanggulangan n Bencana di Bidang Kesehatan	Orang				20	25.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 22 . 38	14	Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi Jema'ah Haji	Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan dan Vaksinasi Jema'ah Haji	Orang				120	75.000.000						

		1.02 . 1.02.01.01 . 22.40	15	Tindakan Cepat Penanganan Pandemi / Wabah Penyakit COVID - 19	Tersedianya sarana, alat dan bahan medis habis pakai tindakan cepat penanganan pandemi/wabah penyakit Covid-19	Paket				1	2.644.585.000					
		1.02 . 1.02.01.01 . 22.41	16	Operasional Dalam Rangka Tindakan Cepat Penanganan Pandemi / Wabah Penyakit COVID - 19	Terlaksananya tindakan cepat penanganan pandemi/wabah penyakit Covid-19	Paket				1	655.415.000					
		<b>1.02 . 1.02.01 . 24</b>	<b>IX</b>	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>							<b>93.153.308.050</b>					
					Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin		100%			100%						
					Prosentase kepesertaan Penduduk Miskin yang memiliki Jaminan Kesehatan		100%			100%						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 14/ 1.02 . 1.02.01 . 24 . 16	1	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Melalui Pelayanan Kesehatan Masyarakat Purwakarta Istimewa	terlaksanya pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miski melalui JAMPI	Paket	4 Rumah Sakit dengan terlayani 1600 jiwa	4 Rumah Sakit dengan terlayani 1600 jiwa		4 Rumah Sakit dengan terlayani 1600 jiwa	3.031.936.450					

		1.02 . 1.02.01 . 24 . 15/ 1.02 . 1.02.01 . 24 . 17/52	2	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/ Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa barat	terlaksana pembayaran premi BPJS bagi penduduk miskin PBI Prov Jabar	Jiwa	140.946	140.946	6.566.258.000	140.946	14.946.216.400							
			3	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin/ Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Purwakarta	terlaksana pembayaran premi BPJS bagi penduduk miskin	Paket		1	11.000.000.000									
		1.02 . 1.02.01.01 . 24.55	8	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Purwakarta) (Purwakarta, Kel. Nagri Kaler, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta (Banprov Tahun 2020)	terlaksana pembayaran premi BPJS bagi penduduk miskin PBI Prov Jabar	Paket		1			12.908.973.200							
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 16/ 1.02 . 1.02.01 . 24 . 18	4	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin / Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Dana JKN di Kabupaten Purwakarta	terlaksannya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang bersumber dari pemanfaatan dana non kapitasi dana JKN di Kab. Purwakarta	Paket	1 (RI, RJ, Tranpotasi Rujukan)	1 (RI, RJ, Tranpotasi Rujukan)	500.000.000		500.000.000							
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 17/ 1.02 . 1.02.01 . 24 . 19	5	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin / Pendampingan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	terlaksananya pendampingan pengelolaan program JKN di Kab. Purwakarta	Paket	1	1	50.000.000		50.000.000							

		1.02 . 1.02.01 . 24 . 19	6	Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Purwakarta	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Purwakarta	Paket	1	1	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01.01 . 24.53	7	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Iuran (PBI)-(DBH PR tahun 2020)	Terlaksananya Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Iuran (PBI)	Paket				1	10.675.854.000						
		1.02 . 1.02.01.01 . 24.54	8	Pendampingan Jampersal	Terlaksananya Pendampingan Jampersal	Paket				1	50.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 51	9	Jampersal (DAK Non Fisik )	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket				1	5.139.228.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 31	10	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bojong	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	2.152.503.691	1	2.908.800.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 32	11	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Bungursari	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	1.552.746.685	1	1.391.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 33	12	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Campaka	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	1.676.418.240	1	2.215.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 34	13	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Cibatu	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	1.654.409.108	1	1.877.600.000						

		1.02 . 1.02.01 . 24 . 35	14	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Darangdan	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	3.612.744.884	1	3.674.300.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 36	15	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Jatiluhur	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	2.413.151.114	1	2.370.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 37	16	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Kiarapedes	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	1.221.895.326	1	1.481.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 38	17	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Koncara	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	1.144.282.015	1	948.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 39	18	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Maniis	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	2.382.130.297	1	2.670.700.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 40	19	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Maracang	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	993.616.812	1	1.134.700.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 41	20	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Mulyamekar	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	1.213.090.378	1	1.240.400.000						

		1.02 . 1.02.01 . 24 . 42	21	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Munjuljaya	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1		1.665.731.956		1.577.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 43	22	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pasawahan	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1		1.574.466.701		2.021.200.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 44	23	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Plered	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1		4.772.672.575		4.838.200.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 45	24	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Pondoksalam	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1		1.565.676.393		1.673.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 46	25	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Purwakarta	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1		2.068.950.487		1.756.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 47	26	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukasari	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1		828.026.439		1.350.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 48	27	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Sukatani	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1		3.994.713.470		3.606.500.000						

		1.02 . 1.02.01 . 24 . 49	28	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Tegalwaru	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	3.495.895,021	1	4.060.100,000						
		1.02 . 1.02.01 . 24 . 50	29	Pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Wanayasa	Terlaksananya pengelolaan Dana Kapitasi JKN Puskesmas secara baik dan akuntabel	Paket	1	1	2.689.553,840	1	3.057.600,000						
		<b>1.02 . 1.02.01 . 25</b>	<b>X</b>	<b>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya</b>					10.037.291,663		<b>13.279.242,000</b>						
					Prosentase sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik		46%	46%		54%							
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	1	Penataan Halaman dan Pembuatan Garasi Puskesmas Sukasari	Terlaksananya penataan halaman dan Pembuatan Garasi Puskesmas Sukasari	Paket		1	200.000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	2	Rehabilitasi dan Pemagaran Pustu Salem Pondoksalam	Terlaksananya rehabilitasi dan Pemagaran Pustu Salem Pondoksalam	Paket		1	200.000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 32	3	Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Lama	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung UPTD Laboratorium Lama	Paket		1	200.000,000								

		1.02 . 1.02.01 . 25 . 33	4	Rehabilitasi Gedung UPTD Perbekalan Kesehatan	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung UPTD Perbekalan Kesehatan	Paket		1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 34	5	Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap dan Penataan Halaman Puskesmas Plered	Terlaksananya Kegiatan Penambahan Ruang Rawat Inap dan Penataan Halaman Puskesmas Plered	Paket		1	750,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 35	6	Penataan dan Pemagaran Puskesmas Tegalwaru	Terlaksananya Penataan dan Pemagaran Puskesmas Tegalwaru	Paket		1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 36	7	Pemagaran Puskesmas Munnjuljaya	Terlaksananya Pemagaran Puskesmas Munnjuljaya	Paket		1	150,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 37	8	Pemagaran Puskesmas Pondoksalam	Terlaksananya Pemagaran Puskesmas Pondoksalam	Paket		1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 40	9	Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Dokter Keluarga/Desa	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Pelayanan Dokter Keluarga/Desa	Paket		1	50,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 41	10	Pengadaan Mebeulair Pelayanan Dokter Keluarga/Desa	Terlaksananya Pengadaan Mebeulair Pelayanan Dokter Keluarga/Desa	Paket		1	50,000,000								



		1.02 . 1.02.01 . 25 . 42	11	Pengadaan Saung Ambu	Terlaksananya Pengadaan Saung Ambu	Paket		1	750,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 43	12	Pengadaan Media Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Media Promosi Kesehatan	Paket		1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 44	13	Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas	Paket		1	150,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 46	14	Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	Terlaksananya Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	Paket		1	150,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 47	15	Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Sarana Penunjang Sistem Informasi Kesehatan	Paket		1	50,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 57	16	DAK Reguler Bidang Kesehan dan KB Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik 2019)	Terlaksananya DAK Reguler Bidang Kesehan dan KB Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik 2019)	Paket		1	3,567,299,000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 58	17	Pembangunan UPTD Puskesmas Marancang (DAK Fisik 2018)	Terlaksananya Pembangunan UPTD Puskesmas Marancang (DAK Fisik 2018)	Paket		1	1,069,992,663								

		1.02 . 1.02.01 . 25 . 59	18	Pengadaan IPAL Puskesmas Darangdan	Terlaksananya Pengadaan IPAL Puskesmas Darangdan	Paket		1	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 60	19	Pengadaan Alat Fooging	Terlaksananya Pengadaan Alat Fooging	Paket		1	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 61	20	Pembangunan Ruang UGD, Laboratorium dan Selasar Puskesmas Koncara	Terlaksananya Pembangunan Ruang UGD, Laboratorium dan Selasar Puskesmas Koncara	Paket		1	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 62	21	Pembangunan Labororium dan Selasar Puskesmas Cibatu	Terlaksananya Pembangunan Labororium dan Selasar Puskesmas Cibatu	Paket		1	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 63	22	Pemagaran Puskesmas Maracang	Terlaksananya Pemagaran Puskesmas Maracang	Paket		1	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 64	23	Pengadaan Lift Barang UPTD Labororium Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Lift Barang UPTD Labororium Kesehatan	Paket		1	200.000.000								
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 65	24	Penataan Ruangan Sumber Daya Kesehatan (Interior)	Terlaksananya Penataan Ruangan Sumber Daya Kesehatan (Interior)	Paket		1	200.000.000								

		1.02 . 1.02.01 . 25 . 66	25	Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan (Media Promosi dan LABKESDA Keliling)	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan (Media Promosi dan LABKESDA Keliling)	Paket		1	500.000.000									
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	1	Pengadaan Media Promosi Kesehatan	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan	Paket				1	200.000.000							
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	2	Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas	Pembangunan PONED Jatiluhur	Paket				1	200.000.000							
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 27	3	Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	Pembangunan DTP Plered	Paket				1	200.000.000							
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 48	4	Pengadaan Saung Ambu	Pembangunan Poskesdes Karangmukti	Paket				1	2.250.000.000							
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 59	5	Pengadaan air bersih untuk dinas kesehatan dan puskesmas	Pembangunan IPAL Puskesmas	Paket				1	400.000.000							

		1.02 . 1.02.01 . 25 . 78	6	Pembangunan IPAL Puskesmas	Tersedianya Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan yang memadai	%				1	1.200.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 83	7	Pelayanan Kesehatan Dasar (DAK Fisik Tahun 2020)	Tersedianya Lahan Puskesmas Mulyamekasr	%				1	5.985.857.000						
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 84	8	Pengadaan Mebeleur Saung Ambu	Tersedianya Rumah Dinas Keshatan yang layak Huni	%				1	200.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 85	9	Pengadaan Alat Kesehatan Saung Ambu	Tersedianya mebeler yang memadai	%				1	600.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 25 . 86	10	Pengadaan Peralatan Non Medis Saung Ambu	Tersedianya Alat kesehatan yang memadai	%				1	300.000.000						
		1.02 . 1.02.01.01 . 25.91	11	Pengadaan mesin antran di Puskesmas Koncara	Tersedianya mesin antran di Puskesmas Koncara	Paket				1	50.000.000						
		1.02 . 1.02.01.01 . 25.92	12	Pemeliharaan gedung Puskesmas Plered	Terlaksananya pemeliharaan gedung Puskesmas Plered	Paket				1	50.000.000						

		1.02 . 1.02.01.01 . 25.95	13	Pembangunan Gedung Saung Ambu 2(DID III)	Terlaksananya Pembangunan Gedung Saung Ambu	Paket				1	800.000.000					
		1.02 . 1.02.01.01 . 25.96	14	Pengadaan Mebeleur Saung Ambu (DID III)	Terlaksananya pengadaan alat Mebeleur Saung Ambu	Paket				1	100.000.000					
		1.02 . 1.02.01.01 . 25.97	15	Pengadaan Alat Kesehatan, Sarana dan Prasarana Penanganan Covid-19 (DID-III)	Terlaksananya pengadaan alat kesehatan, sarana dan prasarana penanganan Covid-19	Paket				1	493.385.000					
		1.02 . 1.02.01.01 . 25.98	16	Pengadaan Reagent PCR Covid-19 (DID-III)	Terlaksananya pengadaan reagent PCR Covid-19	Paket				1	250.000.000					
		<b>1.02 . 1.02.01 . 28</b>	<b>XI</b>	<b>Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan</b>							<b>350.000.000</b>					<b>520.000.000</b>
					Prosentase fasilitas kesehatan yang dibina	%	24,0 %			31,2%						43%

		1.02 . 1.02.01 . 28 . 10		Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK)	Terlaksananya Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK)	paket	1	1	75.000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 28 . 11/ 1.02 . 1.02.01 . 28 . 10	1	Pelayanan P3K dalam rangka kesiagaan hari jadi purwakarta dan kesiagaan hari raya dan tahun baru	Terlaksananya kegiatan kaji banding, peningkatan kapasitas dan pembinaan bagi petugas program perkesmas	paket	1 (20 org kepala puskesmas dan 20 org petugas puskesmas)	1 (20 org kepala puskesmas dan 20 org petugas puskesmas)	75.000,000	1 (20 org kepala puskesmas dan 20 org petugas puskesmas)	50.000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 28 . 12/ 1.02 . 1.02.01 . 28 . 23	2	Peningkatan Program Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (PERKESMAS)	Terlaksananya pelayanan P3K pada masyarakat	paket	1 (9 kegiatan ( Hari raya idul fitri, hari jadi kab. Purwakarta dan peristiwa2 penting))	1 (9 kegiatan ( Hari raya idul fitri, hari jadi kab. Purwakarta dan peristiwa2 penting))	50.000,000	1 (9 kegiatan ( Hari raya idul fitri, hari jadi kab. Purwakarta dan peristiwa2 penting))	50.000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 28 . 13	3	Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan mulut	Terlaksananya Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan mulut	paket	1	1	50.000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 28 . 14	4	Peningkatan program kesehatan tradisional (Kestrada)	Terlaksananya Peningkatan program kesehatan tradisional (Kestrada)	paket	1	1	50.000,000								

		1.02 . 1.02.01 . 28 . 25	5	Pelayanan Kesehatan Selektif Masyarakat Purwakarta	Terlaksananya pertemuan pelayanan kesehatan rujukan, pertemuan evaluasi standar pelayanan minimal RS, pertemuan sistem informasi Rumah Sakit, pembinaan pelayanan kesehatan rujukan ke Puskesmas dan RS	paket				1	100.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 28 . 29	6	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya pertemuan sistem informasi rujukan terintegrasi, monitoring Jabang Tutuka, pendampingan Jabang Tutuka, promosi Jabang Tutuka, berjalannya call center jabang tutuka	paket	1(20 Puskesmas, 10 Rumah Sakit)	1 (20 Puskesmas, 10 Rumah Sakit)	50.000.000	1	100.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 28 . 30	7	Optimalisasi Sistem Informasi Rujukan Terpadu Terintegrasi Kabupaten Purwakarta	Pelayanan kesehatan selektif masyarakat purwakarta berupa khitanan masal dan pemeriksaan darah gratis bagi masyarakat miskin	paket				1	100.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 28 . 32	8	Pelayanan UKM Sekunder Bidang pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik BOK Kabupaten)	Terlaksananya Pelayanan UKM Sekunder Bidang pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik BOK Kabupaten)	paket				1	120.000.000						
		<b>1.02 . 1.02.01 . 32</b>	<b>XII</b>	<b>Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak</b>					<b>3.491.000.000</b>		<b>1.145.312.000</b>						

					Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	%	99,06 %			99,06%										
					Cakupan Ibu Haamil, Bersalin, Nifas Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	70,13 %			70,14%										
					Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Bidan Atau Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	%	98,66 %			98,88%										
		1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	1	Peningkatan manajemen pelayanan KIA dan KB	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Dalam Rangka Peningkatan Manajemen Pelayanan KIA KB	PKM				20	100.000.000		20	50.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 32 . 05/ 1.02 . 1.02.01 . 32 . 06	2	Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Kegiatan Gerakan Penyelamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	PKM				20	50.000.000		20	50.000.000						
		1.02 . 1.02.01 . 32 . 06/ 1.02 . 1.02.01 . 32 . 07	3	Peningkatan Pelayanan UKS	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan UKS di Sekolah	PKM				20	50.000.000									
		1.02 . 1.02.01 . 32 . 07/ 1.02 . 1.02.01 . 32 . 08	4	Peningkatan Pelayanan Lansia	Terlaksana Pelayanan Kesehatan Bagi Lansia dan Pemberdayaan Lansia	PKM				20	75.000.000		1	50.000.000						



		1.02 . 1.02.01 . 32 . 08	5	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK 2019)	Terlaksananya Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK 2019)	paket		1	3.090.000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 32 . 10	6	Dukungan Manajemen Jampersal (DAK NON FISIK 2019)	Terlaksananya Dukungan Manajemen Jampersal (DAK NON FISIK 2019)	paket		1	126.000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 32 . 14	7	Pelayan UKM Sekunder dan BOK Stunting bidang kesehatan masyarakat (DAK Non Fisik BOK KabupatenTahun 2020)	Terlaksananya pelayan UKM Sekunder dan BOK Stunting bidang kesehatan masyarakat (DAK Non Fisik BOK KabupatenTahun 2020)	paket		1		595.248.000							
		1.02 . 1.02.01 . 32 . 15	8	Pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Penurunan AKI dan AKB (DAK Fisik Penugasan Tahun 2020)	Terlaksananya pengadaan Alat Kesehatan Pendukung Penurunan AKI dan AKB (DAK Fisik Penugasan Tahun 2020)	paket		1		400.064.000							
		<b>1.02 . 1.02.01 . 35</b>	<b>XIII</b>	<b>Program Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan</b>					<b>3.685.600,000</b>	<b>1.597.385.000</b>							
					Prosentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya		80%	90%			90%						
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 01	1	Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berprestasi	Terlaksananya Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berprestasi	paket	1	1	50.000,000								



		1.02 . 1.02.01 . 35 . 10	10	Peningkatan Sarana Prasarana Gedung Baru Labkesda	Terlaksananya Sarana Prasarana Gedung Baru Labkesda	paket	1		1	665,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 12	11	Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK Non Fisik 2019)	Terlaksananya Akreditasi Laboratorium Kesehatan Daerah (DAK Non Fisik 2019)	paket			1	303,430,000								
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 13	12	Pengadaan IPAL Labkesda	Terlaksananya Pengadaan IPAL Labkesda	paket			1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 15	13	Pelatihan Tenaga Puskesmas Pencegahan Pengendalian Penyakit	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Puskesmas Pencegahan Pengendalian Penyakit	paket			1	200,000,000								
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 04	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	paket							1	50,000,000				
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 05	2	Pengelolaan Peningkatan Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Pengelolaan Peningkatan Akreditasi Puskesmas	paket							1	50,000,000				
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 07	3	Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut	Terlaksananya Peningkatan Program Kesehatan Gigi dan Mulut	paket							1	25,000,000				

		1.02 . 1.02.01 . 35 . 08	4	Peningkatan Program Kesehatan Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Program Kesehatan Tradisional	paket				1	25.000.000					
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 21	5	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Tahun 2020)	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik Tahun 2020)	paket				1	1.347.385.000					
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 22	6	Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	Terlaksananya Evaluasi Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)	paket				1	50.000.000					
		1.02 . 1.02.01 . 35 . 23	7	Monitoring Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK)	Terlaksananya Monitoring Pendataan Keluarga Sehat (PIS-PK)	paket				1	50.000.000					
		<b>1.02 . 1.02.01 . 38</b>	<b>XIV</b>	<b>Program Pelayanan Laboratorium Kesehatan</b>							<b>1.157.817.000</b>					
					Meningkatnya jumlah kunjungan pemeriksaan Labkesda (5% per tahun)		75%	80%		85%						
					Meningkatnya jumlah parameter pemeriksaan Labkesda		81%	84%		88%						

		1.02 . 1.02.01 . 38 . 01	1	Kalibrasi Alat Labkes	Terlaksananya kalibrasi alat labkes	Paket				1	20.000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 38 . 02	2	Pengadaan Reagensia dan Alat Laboratorium Kesehatan	Tersedianya pengadaan reagensia dan alat/bahan pakai habis laboratorium	Paket				1	250.000,000						
		1.02 . 1.02.01 . 38 . 03	3	Pengadaan Alat Teknis Khusus Laboratorium Kesehatan	Tersedianya alat teknis khusus laboratorium	Paket				1	558.277,000						
		1.02 . 1.02.01 . 38 . 04	4	Peningkatan Pelayanan Administrasi Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya Operasional kegiatan Pelayanan administrasi labkes	Paket				1	196.500,000						
		1.02 . 1.02.01 . 38 . 05	5	Pemantapan Mutu dan Pelatihan SDM Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pemantapan Mutu, dan Pelatihan SDM Labkes	Paket				1	7.980,000						
		1.02 . 1.02.01 . 38 . 06	6	ISO Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Implementasi SNI ISO/IEC 17025 LAB - KES Labkes	Paket				1	9.060,000						
		1.02 . 1.02.01 . 38 . 08	7	Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan	Terlaksananya kegiatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan oprasional lab	Paket				1	116.000,000						





		1.02 . 1.02.01.01 . 02.01	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun						1	48.858.298.317	1 tahun	52.443.384.351	1 tahun	55.081.302.884
		1.02 . 1.02.01.01 . 02.03	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan Dinas Kesehatan	Tahun						1	60.000.000	1 tahun	63.000.000	1 tahun	66.150.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 02.05	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Dokumen						1	70.000.000	1 dokumen	73.500.000	1 dokumen	77.175.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 02.06	4	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tahun						1	35.000.000	1 paket	36.750.000	1 paket	38.587.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 02.07	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Dinas Kesehatan	Tahun						1	10.000.000	1 tahun	10.500.000	1 tahun	11.025.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 03	1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi barang milik daerah pada Dinas Kesehatan	%						75	35.000.000	75	36.750.000	80	38.587.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 03.05	1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah	Dokumen						1	35.000.000	1 dokumen	36.750.000	1 dokumen	38.587.500



		1.02 . 1.02.01.01 . 05	<b>1.4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi pegawai pada dinas kesehatan	%									75	40.000.000	75	42.000.000	80	44.100.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 05.02	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket									1	15.000.000	1 paket	15.750.000	1 paket	16.537.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 05.11	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	paket									1	25.000.000	1 paket	26.250.000	1 paket	27.562.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 06	<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Meningkatnya kualitas administrasi umum pada Dinas Kesehatan	%									75	500.000.000	75	525.000.000	80	551.250.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 06.01	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	paket									1	40.000.000	1 paket	42.000.000	1 paket	44.100.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 06.03	2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya peralatan rumah tangga Dinas Kesehatan	paket									1	40.000.000	1 paket	42.000.000	1 paket	44.100.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 06.04	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	paket									1	85.000.000	1 paket	89.250.000	1 paket	93.712.500

		1.02 . 1.02.01.01 . 06.05	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	paket					1	175.000.000	1 paket	183.750.000	1 paket	192.937.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 06.08	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya kunjungan tamu Dinas Kesehatan	paket					1	60.000.000	1 paket	63.000.000	1 paket	66.150.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 06.09	6	Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Kesehatan	paket					1	100.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	110.250.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 07	<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan barang daerah pada Dinas Kesehatan	%					<b>75</b>	<b>350.000.000</b>	<b>75</b>	<b>367.500.000</b>	<b>80</b>	<b>385.875.000</b>
		1.02 . 1.02.01.01 . 07.05	1	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel Dinas Kesehatan	paket					1	100.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	110.250.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 07.10	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	paket					1	150.000.000	1 paket	157.500.000	1 paket	165.375.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 07.11	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	paket					1	100.000.000	1 paket	105.000.000	1 paket	110.250.000

		1.02 . 1.02.01.01 . 08	1.7	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%						75	962.600.000	75	2.930.730.000	80	3.083.030.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 08.02	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	paket						1	920.000.000	1 paket	1.010.730.000	1 paket	1.063.030.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 08.04	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa tenaga non ASN lingkup Dinas Kesehatan	paket						1	42.600.000	1 paket	1.920.000.000	1 paket	2.020.000.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 09	1.8	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Meningkatnya kualitas barang milik daerah penunjang urusan pada Dinas Kesehatan	%						75	1.000.000.000	75	1.050.000.000	80	1.102.500.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 09.02	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perijinan kendaraan dinas operasional pada Dinas Kesehatan	paket						1	250.000.000	1 paket	262.500.000	1 paket	275.625.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 09.09	2	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya pada Dinas Kesehatan	paket						1	750.000.000	1 paket	787.500.000	1 paket	826.875.000
		1.02 . 2	II	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>									117.336.578.498		123.473.281.553		129.930.934.179

					Rata-Rata Capaian SPM Bidang Kesehatan	%	0,00					75,00		75		80	
					Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	0,00					90,00		95		95	
		1.02 . 1.02.01.01 . 15	2.1	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%						75	22.014.416.000	75	22.815.136.800	80	24.240.893.640
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.03	1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya pembangunan fasilitas kesehatan	paket						1 paket	2.250.000.000	1 paket	2.362.500.000	1 paket	2.480.625.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.06	2	Pengembangan Puskesmas	Terlaksananya pengembangan Puskesmas	paket						1 paket	2.000.000.000	1 paket	2.100.000.000	1 paket	2.205.000.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.09	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas	paket						1 paket	400.000.000	1 paket	420.000.000	1 paket	441.000.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.10	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas kesehatan	paket						1 paket	1.600.000.000	1 paket	1.380.000.000	1 paket	1.734.000.000

		1.02 . 1.02.01.01 . 15.12	5	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan sarana fasilitas kesehatan	paket						1 paket	650.000.000	1 paket	682.500.000	1 paket	716.625.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.13	6	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	paket						1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.050.000.000	1 paket	1.102.500.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.14	7	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	paket						1 paket	9.181.146.000	1 paket	9.640.203.300	1 paket	10.122.213.465
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.15	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Tersedia dan terpelihara alat kalibrasi	paket						1 paket	499.100.000	1 paket	524.055.000	1 paket	550.257.750
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.16	9	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya obat sesuai kebutuhan esensial pelayanan kesehatan	paket						1 paket	2.610.490.451	1 paket	2.741.014.974	1 paket	2.878.065.723
		1.02 . 1.02.01.01 . 15.17	10	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Tersedianya bahan habis pakai untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Purwakarta	paket						1 paket	1.823.679.549	1 paket	1.914.863.526	1 paket	2.010.606.702
		1.02 . 1.02.01.01 . 16	2.2	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%						75	130.934.686.608	75	42.068.698.262	80	44.189.430.125

		1.02 . 1.02.01.01 . 16.01	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	paket						1	250.000.000	1	362.500.000	1	375.625.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terlaksananya pengelolaan pelayanan ibu bersalin	paket						1	250.000.000	1	362.500.000	1	375.625.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.03	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	paket						1	200.000.000	1	410.000.000	1	420.500.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.04	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	paket						1	200.000.000	1	274.241.000	1	285.500.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.05	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	paket						1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.06	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia produktif	paket						1	300.000.000	1	315.000.000	1	330.750.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.07	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	paket						1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000

		1.02 . 1.02.01.01 . 16.08	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	paket					1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.09	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	paket					1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.10	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	paket					1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.11	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	paket					1	300.000.000	1	315.000.000	1	330.750.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.12	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	paket					1	250.000.000	1	262.500.000	1	275.625.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.15	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	paket					1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.16	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	paket					1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000

		1.02 . 1.02.01.01 . 16.17	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	paket					1	597.454.000	1	627.326.700	1	658.693.035
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.19	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	paket					1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.20	17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	paket					1	379.850.000	1	398.842.500	1	418.784.625
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.21	18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	paket					1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.22	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	paket					1	25.000.000	1	26.250.000	1	27.562.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.23	20	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	paket					1	350.000.000	1	367.500.000	1	385.875.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.24	21	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	paket					1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000



		1.02 . 1.02.01.01 . 16.25	22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	paket						1	600.000.000	1	630.000.000	1	661.500.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.26	23	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	paket						1	32.570.230.440	1	34.198.741.962	1	35.908.679.060
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.27	24	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terpantaunya deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	Kab						1		1	200.000.000	1	210.000.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.28	25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	paket						1	150.000.000	1	157.500.000	1	165.375.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 16.29	26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terlaksananya Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	paket						1	100.000.000	1	105.000.000	1	150.000.000
		1.02 . 1.02.01.02 . 16.33	27	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1		1		1	
		1	1)	Puskesmas Purwakarta	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	2.217.350.000	1	2.328.217.500	1	2.444.628.375

		2	2)	Puskesmas Munjuljaya	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun							1	2.271.720,360	2.385.306,378	1	2.504.571,697
		3	3)	Puskesmas Maracang	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun							1	1.625.979,000	1.707.277,950	1	1.792.641,848
		4	4)	Puskesmas Mulyamekar	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun							1	1.782.696,000	1.871.830,800	1	1.965.422,340
		5	5)	Puskesmas Jatilihur	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun							1	2.851.525,000	2.994.101,250	1	3.143.806,313
		6	6)	Puskesmas Campaka	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun							1	2.736,082,000	2.872.886,100	1	3.016.530,405
		7	7)	Puskesmas Bungursari	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun							1	1.708.460,000	1.793.883,000	1	1.883.577,150
		8	8)	Puskesmas Cibatu	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun							1	2.457.018,000	2.579.868,900	1	2.708.862,345

		9	9)	Puskesmas Pasawahan	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	2.402.966,000	1	2.523.114.300	1	2.649.270,015
		10	10)	Puskesmas Pondoksalam	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	1.919.020,000	1	2.014.971,000	1	2.115.719,550
		11	11)	Puskesmas Wanayasa	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	3.385.540,000	1	3.554.607,000	1	3.732.337,350
		12	12)	Puskesmas Kiarapedes	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	1.860.916,000	1	1.953.961,800	1	2.051.659,890
		13	13)	Puskesmas Sukatani	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	3.416.761,000	1	3.587.599,050	1	3.766.979,003
		14	14)	Puskesmas Darangdan	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	3.975.695,000	1	4.174.479,450	1	4.383.203,738
		15	15)	Puskesmas Bojong	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	3.603.610,000	1	3.783.790,500	1	3.972.980,025

		16	16)	Puskesmas Plered	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	4.297.342.000	1	4.512.209.100	1	4.737.819.555
		17	17)	Puskesmas Tegalwaru	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	4.240.920.000	1	4.452.966.000	1	4.675.614.300
		18	18)	Puskesmas Manis	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	2.599.558.000	1	2.729.535.900	1	2.866.012.695
		19	19)	Puskesmas Sukasari	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	1.485.108.000	1	1.559.363.400	1	1.637.331.570
		20	20)	Puskesmas Koncara	jumlah kebutuhan operasional puskesmas	Tahun						1	1.695.610.000	1	1.780.390.500	1	1.869.410.025
		1.02 . 1.02.01.22 . 16.34	28	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya kebutuhan operasional kesehatan	Tahun						1		1	1.394.400.000	1	1.464.120.000
		1	1)	UPTD Perbekalan Kesehatan	terlaksananya kebutuhan operasional kesehatan	Tahun						1	282.152.000	1	296.259.600	1	311.072.580



		1.02 . 1.02.01.01 . 17.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Terlaksananya pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi	paket						1	200.000.000	1	210.000.000	1	220.500.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 18	2.4	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%						75	268.000.000	75	381.400.000	80	405.470.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 18.03	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terpantaunya mutu pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes tingkat kabupaten	Kab						1		1	100.000.000	1	110.000.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 18.04	2	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	paket						1	268.000.000	1	281.400.000	1	295.470.000
		<b>1.02 .3</b>	<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKAT AN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	Pemenuhan Minimal 9 Jenis Tenaga Kesehatan	%	0,00					90,00	11.484.588.257	95	12.085.232.223	100	12.717.289.868
		1.02 . 1.02.01.01 . 19	3.1	<b>Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Ko ta</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%						75	100.000.000	75	105.000.000	80	110.250.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 19.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	paket						1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000

		1.02 . 1.02.01.01 . 19.02	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	terlaksannaya pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	paket						1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 20	3.2	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%						75	11.242.169.950	75	9.884.278.448	80	10.374.492.370
		1.02 . 1.02.01.01 . 20.01	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	paket						1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 20.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	terlaksananya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	paket						1	11.142.169.950	1	9.779.278.448	1	10.264.242.370
		1.02 . 1.02.01.01 . 20.03	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	paket						1	50.000.000	1	52.500.000	1	55.125.000
		1.02 . 1.02.01.01 . 21	3.3	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%						75	200.000.000	75	210.000.000	80	220.500.000







		1.02 . 1.02.01.01 . 25.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM	paket							1	25.000.000	26.250.000	1	27.562.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 26	4.4	<b>Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%							75	25.000.000	26.250.000	80	27.562.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 26.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	paket							1	25.000.000	26.250.000	1	27.562.500
		1.02 . 1.02.01.01 . 27	4.5	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	%							75	65.544.000	68.821.200	80	72.262.260





## Lampiran 8

## Tabel C.28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

NO	TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL DAN CAPAIAN TAHUN 0 S/D TAHUN KE-2 PERIODE RPJMD(PERUBAHAN RPJMD NO 1 TAHUN 2021)				TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A.	Tujuan										
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	<b>Umur Harapan Hidup</b>	Ind ex	70,43	70,5 5	70.71	70.85	70.98	71.11	71.24	71.24
B.	Sasaran										
	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase kematian ibu	%	0.11	0.17	0.15	0.13	0.12	0.11	0.09	0.09
		Persentase kematian bayi	%	0.53	0.29	0.50	0.49	0.46	0.44	0.41	0.41
B.	Program (PerMendagri Nomor 90/2019)/ KepMendagri Nomor 050-3708/2020										
1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	opini	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	%	65	68	70	70	75	80	85	85
2.1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian SPM bidang kesehatan	%	65	68	70	73	75	75	80	80
		Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	85	88	90	90	90	95	95	95
2.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemenuhan tenaga kesehatan sesuai standar (minimal 9 jenis tenaga kesehatan)	%	81	83	85	88	90	95	100	100
2.3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	78	81	86	88	92,21	94,81	100	100
2.4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Strata Posyandu Purnama Dan Mandiri	%	60,94	61,63	62,02	62,71	63,30	63,89	65,16	65,16

Lampiran 9

Tabel C.28

Indikator Kinerja Bidang/Sekretariat/ Seksi/Sub Bagian/UPTD lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi dan Target Kinerja Renstra						NSPK/IKK/ Indikator Lainnya
					Realisasi			Target			
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	
INDIKATOR KINERJA BIDANG/SEKR/ SEKSI/SUBBAG/UPTD											
A. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT											
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi											
1	Kesehatan Ibu	1	Cakupan pelayanan ibu hamil	%	97,74	100,49	99,41	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan
		2	Cakupan Linfaskes	%	89,38	92,78	92,87	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan
		3	Cakupan Linakes	%	98,66	101	101,2	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		4	Cakupan Penanganan komplikasi kebidanan	%	68,88	156,57	136,48	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		5	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	99,31	102,3	101,4	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		6	Cakupan peserta KB aktif	%	71,48	80,3	85,8	85	90	95	NSPK Kesga Gizi
		7	Cakupan peserta KB pasca persalinan	%		77,6	92,7	95	98	100	NSPK Kesga Gizi

		8	Persentase Puskesmas melaksanakan kegiatan Deteksi Dini IVA (Inspeksi Visual dengan Asam asetat) & SADANIS(Pemeriksaan payudara secara klinis)	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
2	Kesehatan Bayi	9	Cakupan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	84,91	99,94	90,57	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan
		10	Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap (KN3)	%	97,28	98,5	107,1	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		11	Cakupan Penanganan komplikasi Neonatal	%	72,73	82,1	76,5	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		12	Cakupan Pemberian ASI Eksklusif pada bayi	%	57,23	56,6	62,2	63	64	65	NSPK Kesga Gizi
3	Pelayanan Gizi Masyarakat		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	48	71	62,5	65	70	75	80	SPM Bidang Kesehatan
		13	Cakupan Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) dibawah 5%	%	1,94	2,4	2,3	<5	<5	<5	NSPK Kesga Gizi
		14	Cakupan Balita ditimbang (D/S)	%	88,67	88,1	58,1	85	90	95	NSPK Kesga Gizi
		15	Cakupan Balita gizi kurang (BB/umur)	%	0,97	3,5	3,7	<5	<5	<5	NSPK Kesga Gizi
		16	Cakupan Balita pendek dan sangat pendek/ stunting (TB/umur)	%		3,3	3,3	<5	<5	<5	NSPK Kesga Gizi
		17	Cakupan Balita kurus dan sangat kurus/wasting (BB/TB)	%		0,9	0,9	<5	<5	<5	NSPK Kesga Gizi

		18	Cakupan Pemberian Vitamin A pada Bayi	%	98,27	99,08	99,45	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		19	Cakupan Pemberian Vitamin A pada Balita	%	96,79	98,37	97,99	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
4	Kesehatan Anak dan Remaja	20	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (anak kelas 1 s/d 9 di sekolah dan usia 7-15 tahun diluar sekolah)	%			42,5	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan
		21	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 1 SD/MI	%	100	99,83	98,9	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		22	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 7 SMP/MTs	%		100,0	98,0	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		23	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa Kelas 10 SMA/MA	%		99,0	97,8	100	100	100	NSPK Kesga Gizi
		24	Cakupan puskesmas PKPR	%	25	25	40	40	45	50	NSPK Kesga Gizi
		25	Penerapan model sekolah sehat	%	4,9	4,9	4,9	20	20	20	NSPK Kesga Gizi
5	Kesehatan Lansia	26	Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia	%	42	45,8	48,19	50	60	70	SPM Bidang Kesehatan
		27	Cakupan puskesmas santun lansia	%	25	25	40	40	45	50	NSPK Kesga Gizi
2) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga											
1	Kesehatan Lingkungan	28	Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat)	%	77,68	78,1	94,1	95	95	95	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga



		29	Cakupan sarana air minum yang dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL)	%	26,25	51,50	44,65	50	55	60	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga
		30	Cakupan Desa yang melaksanakan STBM	%	76,56	83,9	88,5	90	93	95	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga
		31	Cakupan Desa yang mencapai Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)/ Open Defecation Free(ODF)	%	18,23	25,5	30,7	35	40	45	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga
		32	Cakupan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana Tempat fasilitas Umum (TFU)	%	74,86	77,9	58,8	60	65	70	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga
		33	Cakupan inspeksi kesehatan lingkungan terhadap sarana Tempat Pengelolaan Pangan(TPP)	%	39,79	38,6	44,2	45	48	50	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga
2	Kesehatan Kerja	34	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga
3	Kesehatan Olahraga	35	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Kesling, Kesja dan Olahraga
3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat											
1	Promosi dan Pengembangan Media Kesehatan	36	Cakupan puskesmas memiliki paket media kampanye kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

2	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	37	Cakupan rumah tangga ber PHBS	%	66,07	62,8	65,99	65,9	66,0	66,1	NSPK Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
3	Pemberdayaan Masyarakat	38	Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri	%	61,63	62,02	62,71	63,3	63,89	65,16	RPJMD/ Renstra/ IKU Dinkes
		39	Rasio posyandu per desa	%	5,4	5,4	5,4	≥5	≥5	≥5	NSPK Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		40	Rasio posyandu per 100 balita	%	1,16	1,2	1,2	1	1	1	NSPK Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		41	Persentase Desa Siaga Purnama dan Mandiri	%	4,2	13,5	29,7	30	33	35	NSPK Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
B. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT											
1) Seksi Surveilans dan Imunisasi											
1	Surveilans Epidemiologi	42	Kelengkapan laporan dan ketepatan sistem kewaspadaan dini	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Surveilans dan Imunisasi
		43	Persentase KLB yang yang ditangani < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Surveilans dan Imunisasi
2	Imunisasi	44	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	%	92,40	95,7	90,0	85	90	95	NSPK Surveilans dan Imunisasi



3	Pengendalian Penyakit Pneumoni	54	Persentase penderita pneumoni yang ditemukan dan ditangani	%	96,84	100,0	107,1	100	100	100	NSPK P2 PM
4	Pengendalian Penyakit Diare	55	Persentase penderita Diare ditemukan dan ditangani pada balita	%		102,0	70,0	100	100	100	NSPK P2 PM
5	Pengendalian Penyakit DBD	56	Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani	%	100	100	100	100	100	100	NSPK P2 PM
6	Pengendalian Penyakit Kusta	57	Cakupan Penderita Kusta PB Selesai Berobat (RFT PB)	%	93,3	100	83,33	90	95	100	NSPK P2 PM
		58	Cakupan Penderita Kusta MB Selesai Berobat (RFT MB)	%	100	100	100	100	100	100	NSPK P2 PM
7	P2 HIV/AIDS	59	Cakupan pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standa	%	83,30	49	63,5	65	70	75	NSPK P2 PM
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular											
1	Kesehatan Indera	60	Cakupan deteksi dini gangguan indera	%		14,37	38,37	100%	100%	100%	NSPK P2 PTM
2	Kesehatan Jiwa	61	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (Berat) sesuai standar	%	16,47	28,95	100	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	62	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar	%	22,89	26,34	26,27	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	63	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai standar	%	1,86	14,61	22,03	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan

6	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	64	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai standar	%	59,66	89,68	100	100	100	100	SPM Bidang Kesehatan
7	Pelayanan Posbindu	65	Cakupan Posbindu (PTM)	buah	237	239	192	192	192	192	NSPK P2 PTM
C. Bidang Pelayanan Kesehatan											
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional											
1	Pelayanan Rawat Jalan dan rawat inap	66	Cakupan kunjungan rawat jalan (kunjungan baru) di Puskesmas	%	34,73	36,57	23,7	38	40	42	NSPK Yankesprimer dan Kestrad
		67	Cakupan kunjungan rawat inap di Puskesmas	%		4.3	4.5	5.0	5.5	5.5	NSPK Yankesprimer dan Kestrad
2	Pelayanan Kesehatan Tradisional	68	Cakupan pembinaan penyehat tradisional terdaftar	%		65.0	65.2	65.3	65.4	65.5	NSPK Yankesprimer dan Kestrad
3	Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	69	Cakupan Kunjungan Perkesmas	%		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	NSPK Yankesprimer dan Kestrad
4	PIS PK	70	Indek Keluarga Sehat	%		80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	NSPK Yankesprimer dan Kestrad
5	Pembinaan Yankes	71	Puskesmas yang dilakukan pembinaan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Yankesprimer dan Kestrad
2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Pembiayaan Kesehatan											

1	Pelayanan Kesehatan Rujukan	72	Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap penduduk	%	1,21	1,29	1,37	1,5	1,65	1,8	NSPK Yankesrujukan dan JPK
		73	Persentase Rumah sakit yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Yankesrujukan dan JPK
2	Jaminan dan pembiayaan kesehatan	74	Cakupan masyarakat miskin yang memiliki kartu JKN	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Yankesrujukan dan JPK
		75	Cakupan kepesertaan JKN menuju UHC min 95%	%	81,24	77,6	88,8	90	92	95	NSPK Yankesrujukan dan JPK
		76	Cakupan Rumah sakit bekerja sama dalam jaminan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Yankesrujukan dan JPK
3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan											
1	Mutu Pelayanan Kesehatan FKTP	77	Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Mutu Yankes
		78	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya	%	75	65	65	60	70	60	NSPK Mutu Yankes
		79	Persentase puskesmas yang terakreditasi utama	%	5	25	25	25	25	30	NSPK Mutu Yankes
		80	Persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna	%	0	0	0	0	5	10	NSPK Mutu Yankes
		81	Persentase klinik yang terakreditasi	%	0	2	2	10	15	25	NSPK Mutu Yankes
		82	Persentase klinik yang terakreditasi minimal madya	%	0	0	0	0	0	0	NSPK Mutu Yankes

		83	Persentase klinik yang terakreditasi utama	%	0	1	1	6	8	15	NSPK Mutu Yankes
		84	% Puskesmas hasil PKP yang mencapai strata baik	%	0	1	1	4	7	10	NSPK Mutu Yankes
2	Mutu Pelayanan Kesehatan FKTR	85	Persentase rumah sakit yang terakreditasi	%	70	100	100	100	100	100	NSPK Mutu Yankes
		86	Persentase rumah sakit yang terakreditasi paripurna	%	20	30	30	30	40	50	NSPK Mutu Yankes
D. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN											
1) Seksi Kefarmasian											
1	Pengawasan kefarmasian	87	Cakupan Monitoring obat di puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Kefarmasian
		88	Cakupan sarana Apotek yang dibina	%	100	87,5	77	100	100	100	NSPK Kefarmasian
		89	Cakupan sarana Toko Obat yang dibina	%	100	100	59	100	100	100	NSPK Kefarmasian
		90	Cakupan sarana farmasi yang dibina	%	81	86	88	92,21	94,81	100	RPJMD/ Renstra/ IKU Dinkes
3	Pengawasan Makanan	91	Cakupan sarana distribusi makanan dan minuman yang dibina	%		70	29	80	85	90	NSPK Kefarmasian
		92	Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Yang memiliki SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan)	%	47	149	124	120	130	140	NSPK Kefarmasian

		93	Jumlah Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) yang telah memiliki Sertifikat	%	2	2	2	23	25	27	NSPK Kefarmasian
		94	Jumlah Tenaga Pengawas Makanan (District Food Inspector/DFI) yang telah memiliki Sertifikat	%	2	2	3	13	15	17	NSPK Kefarmasian
2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan											
1	Pengembangan SDM kesehatan	95	Pemenuhan tenaga kesehatan (minimal 9 jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	%	83	85	88	90	95	100	RPJMD/ Renstra/ IKU Dinkes
		96	Cakupan tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	63,25	64,73	67,32	70	75	80	NSPK SDM
3) Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan											
1	Pengembangan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kesehatan	97	Cakupan gedung UPTD Puskesmas dan UPTD lainnya sesuai standar	%		84.6	88.5	92.3	100.0	100.0	NSPK Saprass dan Alkes
		98	Kelengkapan ASPAK Puskesmas yang tervalidasi Dinas Kesehatan	%		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Saprass dan Alkes
E. SEKRETARIAT											
1) Sub Bagian Program dan Informasi											
1	Penyusunan Perencanaan Program	99	Tersusunnya Renja Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
		100	Tersusunnya Renstra Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi



		101	Tersusunnya Rekapitulasi Usulan Dinas Kesehatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
		102	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
		103	Cakupan Puskesmas dan UPTD lainnya yang menyusun Renstra/Perencanaan Lima tahunan dan Renja/Perencanaan Tahunan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
2	Pengelolaan Data dan Informasi	104	Tersusunnya Profil Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
		105	Tersusunnya laporan SPM Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
2	Evaluasi dan Pelaporan	106	Tersusunnya LAKIP Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
		107	Capaian SAKIP Perangkat Daerah/ Nilai opini SAKIP	%	BB	BB	BB	BB	BB	BB	RPJMD/ Renstra/ IKU Dinkes
		108	Tersusunnya LKPJ Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi
		109	Tersusunnya LPPD Dinas Kesehatan sesuai standar	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Program dan Informasi

2). Sub Bagian Keuangan, Akunting dan Aset											
1	Penatausahaan keuangan	110	Ketepatan waktu pembayaran gaji ASN	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Keuangan
		111	Cakupan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Keuangan
		112	Cakupan dokumen Neraca Keuangan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Keuangan
		113	Cakupan laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Keuangan
3) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Hukum											
1	Pengelolaan kepegawaian	114	Cakupan pelayanan kenaikan Pangkat pegawai	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Kepegawaian, Umum dan Hukum
		115	Cakupan pelayanan kenaikan gaji berkala	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Kepegawaian, Umum dan Hukum
		116	Cakupan kehadiran pegawai sesuai jam kerja	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Kepegawaian, Umum dan Hukum
2	Pengelolaan Umum dan Hukum	117	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	68	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00	RPJMD/ Renstra/ IKU Dinkes
		118	Kelengkapan SIMBADA Puskesmas dan Dinas Kesehatan	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NSPK Kepegawaian, Umum dan Hukum



2	Perbekalan Kesehatan	128	Cakupan Tingkat Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial	%	90	90	97,67	95	95	95	Renstra/ RPJMD
		129	Cakupan distribusi Obat dan Vaksin Esensial ke puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	NSPK Perbekkes
3	Laboratorium Kesehatan	130	Angka kesalahan laporan hasil pemeriksaan laboratorium 0%	Kasus	0	0	0	0	0	0	NSPK Labkes
		131	Prosentase pencapaian jumlah pemeriksaan, 20% per tahun	%	12.383	14.860	17.832	21.398	25678	30813	NSPK Labkes
		132	Prosentase jumlah alat lab terkalibrasi $\geq$ 75%	%	75	80	85	90	90	95	NSPK Labkes
		133	Prosentase tersediaan reagen lab	%	80	85	90	95	95	98	NSPK Labkes
		134	Parameter pemeriksaan laboratorium yang terakreditasi	%	10	12	14	16	16	18	NSPK Labkes
		135	Prosentase Jenis Parameter/pemeriksaan yang mengikuti PME/ Uji Banding/Uji silang	%	70	75	80	85	85	90	NSPK Labkes
		136	Tingkat kepuasan Pelanggan	%	80	80	81	83	83	85	NSPK Labkes



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA**

**TAHUN 2021**